



**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**



Desember 2023

PROSIDING DAN SEMINAR MAHASISWA

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

Sambutan Direktur

Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL

Editor

Dr. Icol Dianto, M.Kom.I



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 333A TAHUN 2023
TENTANG**

**PANITIA PEMBUATAN PROSIDING SEMINAR ILMIAH MAHASISWA
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Panitia Pembuatan Prosiding Seminar Ilmiah Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Tim dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 752 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 Tanggal 27 Agusutus 2023 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

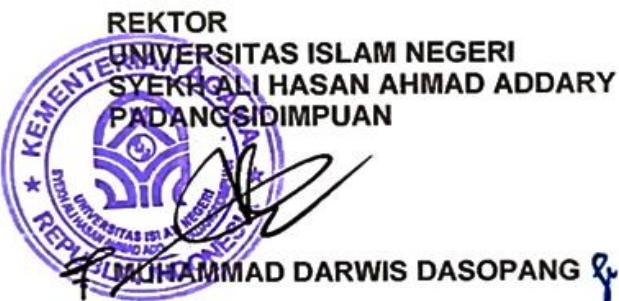
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Biaya Masukan tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBUATAN PROSIDING SEMINAR ILMIAH MAHASISWA PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pembuatan Prosiding Seminar Ilmiah Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023;
- KEDUA : Tugas Tim adalah mempersiapkan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Layanan Umum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 31 Maret 2023



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
4. Bendahara Pengeluaran UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 333A TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PANITIA
PEMBUATAN PROSIDING SEMINAR ILMIAH MAHASISWA
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS
ISLAM NEGERISYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023**

1. Penanggung Jawab : Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd
2. Ketua : Dr. Icol Dianto, M.Kom.I.
3. Sekretaris : Dr. Zulhammi, M.Ag., M.Pd.
4. Anggota : Zulhamri, M.Pd.
: Khalilah Nasution, M.Pd.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 31 Maret 2023



KATA SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, prosiding ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam.

Proses penerbitan prosiding mahasiswa ini tidak hanya menjadi prestasi bagi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tetapi juga menjadi tonggak bersejarah bagi program studi. Melalui prosiding ini, kita melihat bukti konkret dari dedikasi mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan relevan.

Proses penelitian dan penyusunan prosiding tidaklah mudah, tetapi mahasiswa kita telah menunjukkan kemampuan, ketekunan, dan kreativitasnya dalam menghadapi setiap tantangan. Saya yakin bahwa capaian ini bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari banyak prestasi yang akan terus diukir oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di masa mendatang.

Sebagai Direktur Pascasarjana, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan untuk terus berprestasi dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas.

Terima kasih kepada seluruh tim penyelenggara, mahasiswa, dan dosen pembimbing yang telah berperan aktif dalam penerbitan prosiding mahasiswa ini. Semoga kita terus bersinergi dalam meningkatkan kualitas dan kontribusi Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan dalam dunia ilmiah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Direktur,



Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 196807042000031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah shalatan wa salaman ala rasulillah, 'amma ba'd. Pertama-tama, marilah dipanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan proses editing dari penerbitan prosiding seminar mahasiswa ini. Dengan rasa kebahagiaan yang mendalam atas terselenggaranya Prosiding Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan tahun 2023.

Keberhasilan kegiatan ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan semangat para mahasiswa yang telah berjuang untuk menghadirkan wadah diskusi ilmiah yang bermutu. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan terus memperjuangkan pencapaian yang berkualitas, dan semangat itu tercermin dalam setiap kontribusi mahasiswa yang terdapat dalam prosiding ini.

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui riset, pemikiran kritis, dan gagasan inovatif yang terangkum dalam prosiding ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam membuka wawasan, menggugah pemikiran, serta menginspirasi perubahan positif di berbagai sektor masyarakat.

Dalam bagian pertama prosiding ini, Muhammad Mukhlis mengupas tajam tema "Sejarah Politik Islam: Pandangan Islam terhadap Politik". Penelitiannya memberikan pandangan yang kaya dan mendalam mengenai perjalanan sejarah politik dalam perspektif Islam. Dengan cermat, Mukhlis membedah aspek-aspek kunci yang membentuk landasan politik Islam, memberikan wawasan yang bernilai bagi pembaca untuk memahami evolusi politik dalam konteks keislaman.

Politik Islam di Indonesia menjadi sorotan utama dalam pemikiran dan diskusi ilmiah, terutama dalam tulisan yang dibahas oleh Diana Nasution. Dalam konteks Indonesia, Politik Islam tidak hanya mencerminkan dimensi agama, tetapi juga kesejahteraan sosial, keadilan, dan ketahanan nasional. Diana Nasution membahas peran Politik Islam dalam mengisi ruang politik di Indonesia, dengan menyoroti dinamika,

tantangan, dan kontribusi gerakan Islam terhadap proses demokratisasi. Pemikiran ini melibatkan keterlibatan Islam dalam perumusan kebijakan publik, implementasi nilai-nilai moral dalam tatanan sosial, dan upaya menciptakan keadilan sosial.

Dalam tulisan yang ditulis oleh Ikhwan Nasution, "Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi," penulis membahas hubungan yang erat antara demokrasi dan kebebasan pers, serta bagaimana keduanya menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam artikel yang ditulis oleh Rafiqa Syahidah Ritonga dengan judul "Media dan Politik," penulis dengan jelas menggambarkan kompleksitas hubungan antara media dan politik. Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang sering muncul, seperti bias politik dalam pemberitaan, kecenderungan media untuk fokus pada hiburan dan sensasionalisme, serta peran media sosial dalam penyebaran informasi palsu.

Dalam tulisan yang ditulis oleh Elfyda Rahmadani dengan judul "Pendapat Umum (Opini Publik) dan Polling," penulis membahas keterkaitan antara opini publik dan polling sebagai instrumen untuk mengukur pandangan masyarakat. Penekanan pada pengaruh media dan perspektif masyarakat dalam membentuk opini publik menggambarkan kompleksitas dinamika yang melibatkan berbagai variabel.

Dalam tulisan yang disusun oleh Tua Dalimunthe dengan judul "Partai Politik dan Pemilu," pembaca dihadapkan pada analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik yang mencerminkan kompleksitas sistem politik suatu negara. Artikel ini mencakup topik seperti tindakan anarkis, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan wakil presiden, keanggotaan partai politik, dan peran partai politik.

Dalam tulisan yang dibuat oleh Masdewati berjudul "Kampanye untuk Pemasaran Politik," pembaca diperkenalkan dengan konsep pemasaran politik dan pengaplikasiannya dalam dunia politik, yang dikenal sebagai political marketing. Artikel ini menyoroti peran penting pendekatan dan metode pemasaran dalam menarik simpati masyarakat dan mencapai tujuan organisasi politik. Pemahaman bahwa keberhasilan kampanye politik tidak hanya bergantung pada kemampuan politikus dalam memilih tema dan menyampaikan pesan, tetapi juga melibatkan kerja tim, calon pemimpin, dan partai politik, menunjukkan kompleksitas dinamika pemasaran politik. Artikel ini juga

mencakup peran perempuan dalam politik dan fenomena kehadiran artis yang beralih menjadi politisi.

Proseding ini menjadi saksi perjalanan intelektual mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan. Dengan bangga, kami menyajikan hasil karya dan pemikiran para mahasiswa. Kontribusi para penulis muda ini merupakan bukti komitmen mereka terhadap pemahaman mendalam terkait sejarah politik Islam dan pandangan Islam terhadap politik.

Selain itu, penting untuk diapresiasi upaya dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan memberikan arahan kepada para mahasiswa dalam menyelesaikan penelitian mereka. Dukungan ini menjadi kunci keberhasilan dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berdaya saing.

Kepada semua pembaca, saya mengajak Anda untuk meresapi setiap kata dan gagasan yang tertuang dalam prosiding ini. Mari kita gali hikmah dan ilmu yang terkandung di dalamnya, sehingga kita semua dapat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan nilai-nilai keislaman melalui komunikasi dan penyiaran yang berkualitas.

Terakhir, izinkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam kelancaran acara ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi motivasi untuk terus menggali potensi dan memperjuangkan pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Terima kasih kepada seluruh peserta, panitia, dosen pembimbing, dan semua yang telah turut serta dalam kesuksesan Prosiding Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan tahun 2023.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat saya,



Dr. Icol Dianto, S.Sos.I., M.Kom.I
Editor/Kaprodi

Daftar Isi

Cover

Sambutan Direktur Pascasarjana

Kata Pengantar Editor

Daftar Isi

A.	Sejarah Politik Islam: Pandangan Islam terhadap Politik, dan Periode Awal Perpolitikan Islam	1
	Muhammad Mukhlis	
B.	Politik Islam di Indonesia.....	18
	Diana Nasution	
C.	Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi	35
	Ikhwan Nasution	
D.	Media dan Politik	47
	Rafiqah Syahidah Ritonga	
E.	Pendapat Umum (Opini Publik) dan Polling.....	63
	Elfyda Rahmadani	
F.	Partai Politik dan Pemilu	76
	Tua Dalimunthe	
G.	Kampanye untuk Pemasaran Politik.....	86
	Masdewati	

Sejarah Politik Islam: Pandangan Islam terhadap Politik, dan Periode Awal Perpolitikan Islam

Muhammad Mukhlis

Email: muhammadmukhlis@gmail.com

Abstrak: Keberhasilan Islam dalam peradaban dunia tidak terlepas dari aspek geopolitik yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. bahkan politik sangat efektif menjadi sarana media dakwah dan media kesejahteraan bagi umat. Maka pembuatan makalah ini bertujuan untuk mengkaji pengertian politik Islam, politik dalam pandangan tokoh dan perspektif Al-Qur'an dan sejarah politik Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. di Madinah. Periode awal perpolitikan Nabi Muhammad Saw. di Madinah diawali dengan diangkatnya beliau menjadi kepala negara, lalu, beberapa strategi politik yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. adalah dengan pembangunan masjid, mempersaudarakan diantara sesama umat Muslim, membentuk piagam Madinah, mempertahankan wilayah dan kehormatan Islam dan diplomasi.

Kata Kunci: Politik Islam, Piagam Madinah, Politik Rasulullah, Sejarah Politik

A. Pendahuluan

Kehadiran Islam di pentas dunia telah membawa perubahan besar. Perubahan besar itu mencakup segala aspek: politik, ekonomi, sosial, pendidikan, intelektual, kebudayaan dan peradaban. Aspek politik telah membawa Islam pada kekuasaan yang sangat besar dan kuat. Hegemoni Islam sangat dominan mewarnai peradaban dunia pada masanya.

Politik tidak boleh dijauhi oleh umat Islam bahkan jika perlu digauli, sebab umat Islam tidak boleh dijauhkan dari politik dan tidak boleh buta politik, sebab politik tidak bertentangan dengan misi Islam dalam dakwah bahkan politik sangat efektif menjadi sarana media dakwah dan media kesejahteraan bagi seluruh umat.

Keberhasilan politik dakwah Nabi Muhammad Saw. bahkan di aminkan oleh seorang Nasrani, yang bernama Michael H Hart dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, dengan menempatkan Nabi Muhammad Saw. di ranking pertama, karena Nabi Muhammad Saw. telah menunjukkan keberhasilan dakwahnya yang hanya dalam tempo 28 tahun telah berhasil meyakinkan umatnya dan umat manusia yang dengan cepat agama Islam menyebar ke seluruh dunia dan dianut oleh milyaran manusia.¹

Nabi Muhammad Saw. adalah teladan ideal dalam seluruh aspek kehidupan. Di antara yang sangat penting untuk diteladani secara sungguh-sungguh adalah kepemimpinannya, baik dalam konteks kultural maupun politik. Nabi Muhammad Saw. bukan hanya pemimpin agama, sebagaimana dipahami secara keliru oleh kebanyakan orang, tetapi Beliau sesungguhnya juga pemimpin politik. Mandat kepemimpinan politik ini sudah diterimanya sejak awal berhijrah ke Madinah.²

Kedigdayaan Islam di masa lampau itu kini sudah menjadi sejarah. Untuk melihat peran Islam di pentas sejarah tersebut, pembahasan makalah ini dibuat, pemakalah mencoba menguraikan dari pendekatan politik, bagaimana keberhasilan Nabi Muhammad Saw. menjadi Rasul sekaligus kepala negara di Madinah, terhitung dari beliau hijrah pada 12 Rabiul Awwal 1 H.

¹ <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/politik-sosiologi-dakwah-rasulullah>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 16:34 WIB).

² https://umj.ac.id/edisi_fakultas/model-kepemimpinan-nabi-muhammad-saw-di-madinah/, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 17:05 WIB).

Di awal perpolitikan Nabi Muhammad Saw. di Madinah ditandai dengan pengangkatan beliau sebagai kepala negara, lalu mempersatukan umat muslim, dan membuat sebuah perjanjian yang monumental yang disebut dengan Piagam Madinah, serta mempertahankan negara dari gempuran dari dalam dan luar, untuk menghancurkan negara tersebut serta melakukan hubungan baik dengan pemimpin negara yang lain.

Pembatasan dan Rumusan Masalah. Kajian dalam makalah ini membahas mengenai sejarah politik Islam, sejak Hijrahnya Nabi Muhammad Saw. ke Madinah, dan adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah dimulai dari pengertian politik Islam, Politik dalam Pandangan Tokoh dan Perspektif Al-Qur'an, Periode Awal Perpolitikan Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw. di Madinah.

B. Pembahasan

1. Pengertian Politik Islam

Kata politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*”, yang asal katanya adalah “*polis*” yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan “*teia*” berarti urusan.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “politik” diartikan dengan: (1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan); (2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain; (3). Kebijaksanaan; Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).⁴

Dalam catatan sejarah, orang yang pertama kali memperkenalkan kata politik, adalah Aristoteles (384-322 SM) seorang filsuf Yunani Kuno. Ia mengemukakan, bahwa “manusia adalah merupakan binatang politik, atau *political animal*”. Bagi Aristoteles manusia hanya manusia apabila ia hidup di dalam negara, karena di luar negara hanya ada makhluk hidup di bawah manusia yaitu binatang atau yang di atas manusia yaitu dewa. Dengan demikian negara sebagai suatu persekutuan hidup menempati jenjang paling tinggi karena negara memiliki tugas yang mulia, yaitu memanusiakan manusia.⁵

³ Hudajat Imam, *Teori-teori Politik*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 2.

⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1201.

⁵ Rapar, *Filsafat Politik Plato Aristoteles*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 43.

Dalam pandangan Budiardjo, politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan umum yang mengatur alokasi sumber daya yang ada. Dan untuk melaksanakan kebijakan itu perlu ada kekuatan dan kewenangan yang akan dipakai, baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang bisa timbul setiap saat. Lebih jauh Budiarjo menekankan bahwa tujuan politik bukan untuk memenuhi kepentingan atau tujuan pribadi seseorang melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Jadi mendefinisikan “politik” bukanlah pekerjaan mudah, bukan karena tidak adanya definisi politik yang dibuat oleh para pakar, melainkan karena kebanyakan definisi. Begitu banyaknya definisi yang dibuat oleh para pakar sehingga hampir dalam setiap pertemuan yang membicarakan tentang definisi politik berakhir dengan ketidakadaan definisi yang bisa diterima oleh semua pihak.⁶

Politik dalam Islam dikenal dengan kata *siyāsah*, dari bahasa Arab *sasa-yasusu-siyasah* yang artinya mengurus, mengatur, serta memerintah. *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik dan pemerintahan atau menuntut kearifan. *Siyāsah* dapat juga dimaknai sebagai administrasi dan manajerial. Maka secara bahasa *siyāsah* memuat sejumlah makna yakni memerintah, mengatur, mengurus, menyusun kebijakan, memimpin politik dan pemerintahan.⁷

Secara terminologis, *siyāsah* adalah memimpin ataupun mengatur suatu hal dengan jalan membawanya pada kemaslahatan. *Siyāsah* dalam *al-Munjid* menjadikan kemaslahatan manusia dengan mengarahkan mereka ke jalan yang lurus. *Siyāsah* ialah ilmu politik untuk pengendalian tugas dalam ataupun luar negeri yakni politik dalam negeri dan luar negeri dan kemasyarakatan yaitu mengatur kehidupan umum karena dasar keadilan dan konsisten. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyāsah* adalah perundungan yang ditempatkan guna pemeliharaan kemaslahatan dan ketertiban serta pengaturan kondisi.⁸

⁶ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 24-25.

⁷ Istadiantha, “Pengantar Politik Islam dan Islam Politik”, *CMES Center Of Middle Eastern Studies*, Vol 7 No 2 2014, hlm. 186.

⁸ Hamzah Kamma, dkk, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 21-22.

2. Politik dalam Pandangan Tokoh dan Perspektif Al-Qur'an

Dalam pembahasan pada subbab ini, pemakalah membagi pandangan Islam mengenai politik, dilihat dari pandangan tokoh dan ulama Islam serta politik dalam pandangan Al-Qur'an

a. Politik Dalam Pandangan Tokoh

1) Dr. V. Fitzgerald

Menjelaskan bahwa, "Islam bukanlah semata-mata agama (*a religion*) namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain".⁹

2) Pemikiran Ibn Taymiyyah

Ibn Taymiyyah menyatakan, bahwa perintah menunaikan amanat dan perintah berlaku adil merupakan dua prinsip etik utama dan paling dominan dalam *al-siyâsahnya*. Tentang istilah amanat, menurut Ibn Taymiyyah, mencakup dua konsep, yaitu kekuasaan (politik) dan harta benda (ekonomi). Kekuasaan merupakan amanat yang harus ditunaikan. Dan karenanya, seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat amanah. Dia dituntut untuk berlaku amanah dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan kekuasaan politik, amanah menuntut keharusan menunaikan amanat sebagai bentuk tanggung jawabnya, baik amanat itu berasal dari Allah Swt. ataupun dari sesama manusia. Sedangkan amanah yang berhubungan dengan harta benda ekonomi, amanah berarti keharusan mengelola kekayaan negara secara proporsional dan bertanggung jawab untuk kemashlahatan rakyat.

Tentang prinsip keadilan, bagi Ibn Taymiyyah, merupakan prinsip fundamental sebuah pemerintahan. Karena pentingnya keadilan ini, Ibn Taymiyyah hingga berpendapat, bahwa pemerintah yang adil, walaupun dipimpin oleh seorang kafir adalah lebih baik daripada pemerintahan muslim tetapi berlaku zhalim. Karena, keadilan walaupun disertai dengan kekafiran, masih memungkin adanya kesinambungan

⁹ Abdullah Zawawi, "Politik Dalam Pandangan Islam", *Ummul Qura*, Vol 5, No 1, 2015, hlm. 90-91.

kehidupan dunia, tetapi sebaliknya, kezhaliman meskipun dengan keislamannya, akan sulit mempertahankan kehidupan dunia.

Berdasarkan penjabaran di atas bisa dipahami jika *fiqh siyâsah* adalah ilmu yang mempelajari tentang kepentingan umat serta negara dengan segala bentuk hukum, kebijaksanaan, dan pengaturan yang ditetapkan oleh penguasa yang selaras dengan landasan ajaran syariat guna perwujudan kesejahteraan umat.¹⁰

3. Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan *siyâsah* diantaranya an-Nisa (4) ayat 59.¹¹

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيبُوا لِلَّهِ وَأَطِيبُوا الرَّسُولُ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹²

Dalam ayat ini Allah Swt. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah Swt. dan Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah Swt. memberikan ketegasan kepada kaum Muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Swt. akan menjadikan kebijakan tersebut

¹⁰ Muh. In'amuzzahidin, "Etika Politik Dalam Islam", *Wahana Akademika*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 95-103.

¹¹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits", *Al-Imarah*, Vol 3, No. 1, 2018, hlm. 21-23.

¹² Kementerian Agama, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 87.

membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Swt. dalam firmanya QS. al-A'rof (7) ayat 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرْقَانِ آمَّوْا وَأَتَقْوَا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَثُرُوا فَأَخْتَدْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membuka untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.¹³

Dalam ayat ini Allah Swt. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah Swt. bisa terealisir.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam *fiqh siyâsah* adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernalafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa (4) ayat 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تُحْكِمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعَمًا يَعْظِمُهُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁴

Dalam ayat ini, Allah Swt. menjelaskan kepada kita bahwa *fiqh siyâsah* yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah Swt. dimuka bumi ini adalah sistem *siyâsah* yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat olehnya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang

¹³ Kementerian Agama, *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁴ Kementerian Agama, *Ibid.*, hlm. 87.

berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagus apapun kebijakan tersebut dibuat.

Nilai nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam *fiqh siyâsah* adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawaroh jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam QS. as-Syuro (42) ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَمُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ¹⁵

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.¹⁵

Dalam ayat ini Allah Swt. Menjelaskan kepada kita bahwa segela persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum Muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas.

Abdul Rozak, dalam bukunya Pemikiran Politik dan Gerakan Sosio-Kultural Kewarganegaraan, juga menjelaskan etika politik dan prinsip dasar dalam etika politik Islam, yaitu: 1) Penghargaan terhadap pluralisme, 2) Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), 3) Pengembangan solidaritas bangsa, 4) Pengembangan nilai-nilai demokrasi, 5) Perwujudan nilai-nilai keadilan sosial, 6) Penegakan kesamaan-kesetaraan, 7) Pengembangan kebebasan.¹⁶

¹⁵ Kementerian Agama, *Ibid.*, hlm. 487.

¹⁶ Abdul Rozak, *Pemikiran Politik & Gerakan Sosial Kultural Kewarganegaraan*, (Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2002), hlm. 37-43.

4. Periode Awal Perpolitikan Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw. di Madinah

Ada banyak alasan orang menunjukkan bahwa perkembangan Islam sejak sejarah kemunculannya lebih banyak ditandai dengan nuansa politik, sehingga melihat perkembangan Islam harus dikaitkan dengan dengan aktifitas politik. Sejarah menunjukkan, Islam mulai tampil dipentas politik, semenjak Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah, tahun 1 Hijriyah bertepatan dengan tahun 622 Masehi.

Dalam sub bahasan ini, pemakalah mencoba menguak seberapa keteladanan dan ajaran Nabi Muhammad Saw. bersinggungan dengan wacana politik serta tema-tema wacana politik, seperti pengangkatan kepala negara, bentuk pemerintahan, konstitusi dan sebagainya.

a. Pengangkatan Kepala Negara

Kalangan elite suku di Madinah melakukan kesepakatan politik dengan mengangkat Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin politik Kota Madinah. Pengangkatan Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin Kota Madinah merupakan representasi harapan mereka untuk mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut. Nabi Muhammad Saw. dipercaya sebagai utusan terakhir dari Tuhan yang kedatangannya membawa misi perdamaian di muka bumi. Paradigma ini membangun sebuah sugesti bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah seorang yang bijaksana. Oleh karena itu penduduk Yastrib menaruh harapan kepadanya agar menciptakan perdamaian dan keharmonisan.

Simpati penduduk Yastrib kepada Nabi Muhammad Saw. membentuk sikap sosial yang terbuka terhadap kaum Muhajirin. Misi kerasulan yang ditopang dengan kekuatan politis sebagai kepala negara membuat penyebaran ajaran Islam semakin mudah diterima masyarakat. Oleh karena itu Nabi Muhammad Saw. meletakkan pondasi-pondasi peradaban di Yastrib yang kemudian diberi nama *Madīnat al-Nabī* yang berarti Kota Nabi. Pemberian nama Madinah berasal dari kata tamaddun, yang artinya “peradaban”, “civilization”. Maka jika ditelaah secara etimologis kota Madinah merupakan “wadah peradaban yang sarat dengan kehidupan yang beradab, berkesopanan, berertika, tertib, teratur serta taat dengan hukum-hukum, norma-norma

yang telah disepakati bersama. Kehidupan sosial yang berlandakan pada spirit persaudaraan (*ukhūwwah islamiah*), toleransi dan egaliterianisme.¹⁷

Tidak terdapat satu ayat Al-Qur'an pun yang menyebut apalagi memerintah Nabi menjadi seorang kepala negara. Dengan demikian keberadaan Nabi sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai kepala negara melalui proses penunjukan dan kesepakatan orang banyak. Seolah ketika itu ada penyerahan kekuasaan diri dari peserta bai'at kepada Nabi Muhammad Saw. yang diakui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik proses ini disebut "kontrak sosial". Agaknya Al-Qur'an bukan melepas tangan begitu saja terhadap urusan negara dan politik. Setidaknya, bila masyarakat berada dalam sebuah negara mempunyai kewajiban patuh kepada penguasa (*ulul amri*).¹⁸

b. Pembangunan Masjid

Pembangunan masjid ini merupakan bagian dari strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk melebarkan sayap Islam, disamping sebagai tempat untuk beribadah, masjid juga merupakan madrasah yang menghasilkan pemimpin Muslim yang berkompeten serta menjadi pembawa panji keIslam. Di sisi lain, masjid juga menjadi tempat pemilihan khalifah, baiat dan diskusi tentang semua persoalan umat sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Dari masjid pula lahirlah para pasukan tangguh. Di masjid ini pula Nabi Muhammad Saw. menyambut utusan para suku dan delegasi para raja dan penguasa.¹⁹

c. Mempersaudarakan di antara sesama orang-orang Muslim

Langkah konkret lain yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. setelah sampai di Madinah adalah menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin yang berasal dari Mekkah (kaum Muhajirin) dengan umat Islam Madinah (kaum Anshar). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat barisan umat Islam di kota Madinah.

Untuk mencapai maksud tersebut, Nabi Muhammad SAW. mengajak kaum muslimin supaya masing-masing bersaudara demi Allah. Nabi Muhammad SAW. sendiri bersaudara dengan Ali ibnu Abi Thalib, Hamzah ibnu Abdul Mutholib

¹⁷ Suwanto dan Rahmat Hidayat, "Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia", *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 130.

¹⁸ Muh. Zuhri, "Sejarah Politik Islam", *TARJIH*, Edisi 3, Januari 2002, hlm. 1-3.

¹⁹ Ummu Salamah Ali, "Peradaban Islam Madinah (Refleksi Terhadap Primordialisme Suku Auz dan Khazraj)", *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 2, September 2017, hlm. 97.

bersaudara dengan Zaid, Abu Bakar bersaudara dengan Kharijah ibnu Zaid, Umar ibnu Khattab dengan ‘Ithbah ibnu Malik al-Khzraji dan Ja’far ibnu Abi Thalib dengan Mu’adz ibnu Jabal. Muhajirin lainnya dipersaudarakan dengan kaum Anshar yang lain.

Dengan persaudaraan ini, Rasulullah telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Dalam persaudaraan seperti ini, kaum Anshar memperlihatkan sikap sopan dan ramah dengan saudara mereka kaum Muhajirin. Kaum Anshar turut merasakan kepedihan dan penderitaan yang dialami saudarasaudara mereka dari kota Mekkah tersebut, karena mereka datang ke Madinah tanpa membawa harta kekayaan, sanak saudara, dan sebagainya. Sehingga mereka benar-benar menderita dan memerlukan pertolongan.²⁰

Makna persaudaraan ini sebagaimana yang dikatakan Muhammad al-Ghazali, agar fanatism Jahiliyah menjadi cair dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali Islam. Disamping itu, agar perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit dan daerah tidak mendominasi, agar seseorang tidak merasa lebih unggul dan lebih rendah, kecuali karena ketaqwaaannya.²¹

d. Membentuk Piagam Madinah

Piagam madinah bertujuan untuk mengatur dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan keharusan-keharusan, etika hubungan, dan pembatasan hak dan kewajiban bagi setiap individu atau kelompok di Madinah. Adanya piagam Madinah ini mampu mempersatukan seluruh penduduk dalam naungan Islam. Suku Aus dan Khazraj masuk dalam kelompok Anshor, kemudian kaum Muhajirin dan Anshor masuk dalam kelompok Muslim, dan seakan-akan mereka dalam satu kesatuan umat, dimana mereka terikat bukan dalam ikatan darah tetapi dalam ikatan akidah.²²

Maka dari itu beberapa dasar-dasar kenegaraan yang terdapat dalam Piagam Madinah adalah: 1) Umat Islam merupakan satu komunitas (umat) meskipun berasal dari suku yang beragam, 2) Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas-komunitas lain didasarkan atas

²⁰ Ahmad Anas dan Hendri Hermawan Adinugraha, “Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antar Budaya”, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm. 62.

²¹ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 210-212.

²² Muhammad Burhanuddin, “Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosioultural Piagam Madinah)”, *Jurnal Al-Ijtima’iyah*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 10.

prinsip-prinsip: a) Bertetangga baik, b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, c) Membela mereka yang dianaya, d) Saling menasehati, e) Menghormati kebebasan beragama.²³

e. Mempertahankan Wilayah dan Kehormatan Islam

Politik Islam yang telah dilakukan Nabi Muhammad Saw. baik dalam lingkungan intern umat Islam maupun di luar umat Islam, namun satu dalam negara. Nabi Muhammad Saw. di dalam menunjukkan kemampuannya menyadarkan orang lain dalam rangka bela negara, beliau telah berhasil mempengaruhi Bani Dhamrah (saat itu belum Islam), untuk bersama-sama mempertahankan negara dari serangan musuh.

Perang yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. bukanlah dalam rangka dakwah, tetapi perang adalah rangka membela dakwah. Dalam berbagai fakta sejarah menunjukkan bahwa umat Islam tidak pernah memerangi suatu kaum sebelum dakwah sampai kepadanya, dan tidak menghina umat Islam.²⁴

Pertama: Sikap Membela Dan Mempertahankan Diri

Di antara sikap dan kebijakan yang di praktekkan Nabi Muhammad Saw. adalah sikap membela dan mempertahankan diri, dimana hal ini tampak jelas dalam periode Madinah dengan pergerakan sejumlah pasukan sariyah, utusan serta berbagai peperangan yang di ikuti Nabi Muhammad Saw. melawan orang-orang musyrik.²⁵

Kedua: Tujuan-tujuan Perjuangan di Jalan Allah Swt: 1) Menjaga kebebasan dan kemerdekaan berkeyakinan, 2) Menjaga simbol-simbol agama dan ibadah, 3) Menghilangkan kerusakan di muka bumi, 4) Ujian, pendidikan dan perbaikan, 5) Menakuti orang-orang kafir, menghinakan, merendahkan dan meremehkan tipu daya mereka, 6) Mengungkap jati diri orang munafik, 7) Menegakkan hukum allah dan aturan islam di muka bumi, 8) Menghadapi gangguan orang-orang kafir, dalam hal ini, gangguan yang dimaksud adalah: a) Apabila orang-orang kafir itu mengganggu orang-orang yang beriman, b) Apabila orang-orang kafir itu melancarkan serangan ke wilayah umat Islam, c) Jika musuh tersebut menebarkan kezhaliman diantara rakyatnya

²³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 65.

²⁴ Mahmuddin, "Strategi Dakwah Rasulullah di Madinah", *Jurnal Tabligh*, Vol. 21, No. 1, Juni 2020, hlm. 99.

²⁵ Ali Muhamad Ash-Shalabi, *Ghazawat Ar-Rasul Durus Wa 'Ibar Wa Fawa 'Id*, Terj. Masturi Irham dan M. Asmui Taman, *Ketika Rasulullah Harus Berperang*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2017), hlm. 8.

meskipun mereka kafir, d) Orang-orang kafir itu melawan para juru dakwah kepada Allah Swt. dan menghalangi mereka menyampaikan risalah-Nya.²⁶

f. Diplomasi Melalui Surat

Pada pembahasan bab ini, pemakalah menguraikan beberapa surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad Saw. kepada beberapa raja, dan analisis tema mayor dan minor surat-surat Nabi Muhammad Saw. diantaranya:

- 1) Surat untuk Raja Najasy (Kerajaan Habasyah/Etiopia).
- 2) Surat Raja Heraklius (Kerajaan Romawi).
- 3) Surat untuk Raja Kisra Eperwiz (Kerajaan Persia).
- 4) Surat untuk Raja Muqawqis (Pemerintahan Mesir di bawah kekuasaan Romawi).
- 5) Surat untuk Raja al-Harits al-Ghissani (Pemerintahan Gasasinah, Siria di bawah kekuasaan Romawi).²⁷
- 6) Surat untuk Raja al-Munzir bin Sawa (Pemerintahan Bahrayn di bawah kekuasaan Persia).
- 7) Surat untuk Raja Jaifar dan Abdu Waqil, dua bersaudara putra al-Julandai (Pemerintahan Oman di bawah kekuasaan Persia).
- 8) Surat untuk Raja Hauzah al-Hanafi (Pemerintahan Yamamah, Nejd di bawah kekuasaan Persia).
- 9) Surat untuk Raja al-Harits al-Himyari (Pemerintahan Yaman di bawah kekuasaan Persia).²⁸

Secara umum materi yang disampaikan dalam semua surat-surat Nabi Muhammad Saw. yang pernah ditujukan kepada para penguasa itu mengandung hal-hal seperti:

- 1) Seruan untuk menyembah Allah Swt. dan ajakan untuk meninggalkan tuhan-tuhan yang selain Allah Swt. Tema yang berkonsep ketauhidan ini menjadi salah satu materi pokok dan yang selalu dicantumkan dalam setiap surat-surat Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana diketahui monotheisme Islam dalam konsep Tauhid adalah merupakan salah satu pilar utama dari ajaran Islam. Nabi selalu menekankan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 13-18.

²⁷ Abdul Ghoni, “Mengagas Dakwah Korespondensi Nabi Muhammad Saw”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 162-173.

²⁸ Ubaidillah, “Surat Dakwah Nabi Muhammad Saw (Analisis Tematik Atas Surat-Surat Nabi Muhammad Kepada Para Raja)”, *IBDA’: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 13, No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 31.

materi mengenai ketauhidan ini karena beliau menyadari bahwa obyek surat itu adalah para pemimpin yang memeluk keyakinan lain seperti Nasrani dan Majusi.

- 2) Materi selanjutnya adalah pemberitahuan bahwa Islam adalah ajaran dan kepercayaan baru yang memberikan jaminan dan janji keselamatan bagi siapa saja yang mau mengimannya. Nabi Muhammad Saw. berani untuk mengajukan konsep Islam sebagai ajaran yang menyelamatkan terkait dengan konflik keagamaan yang sedang berlangsung pada masa-masa itu, khususnya di kalangan Nasrani yang terpecah dalam berbagai golongan dengan klaim kebenaran dan keselamatannya masing-masing.
- 3) Peringatan terhadap tanggung jawab dari masing-masing pemimpin terkait dengan kedudukan yang sedang mereka emban saat itu. Nabi Muhammad Saw. mengingatkan bahwa sebagai seorang pemimpin mereka mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan sekaligus dituntut untuk bersungguh-sungguh dengan tanggung jawab yang mereka emban.

Tema dan isi yang terdapat dalam semua surat Nabi Muhammad Saw. ditulis secara ringkas, padat, tegas serta jelas. Seperti mengulang cara beliau saat pertama kali memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Mekkah yang sama sekali belum mengenal ajaran Islam.²⁹

C. Penutup

Sebagai kesimpulan dalam makalah ini, makal pemakalah menulis beberapa poin, yaitu:

1. Politik diartikan dengan: (1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan); (2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain; (3). Kebijaksanaan; Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Dalam bahasa arab, politik juga disebut dengan *Siyāsah* dalam *al-Munjid* menjadikan kemaslahatan manusia dengan mengarahkan mereka ke jalan yang lurus.
2. Dalam pandangna tokoh, Islam bukanlah semata-mata agama (*a religion*) namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Islam juga memikirkan

²⁹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam (Bagian I dan II)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 33.

persoalan internal (yang mencakup diantaranya: mengurusi persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, memerinci hak dan kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa) dan eksternal umat (yang meliputi diantaranya: memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak lain). Dalam pandangan Al-Qur'an, siyasah dimuat dalam QS. an-Nisa (4) ayat 59, QS. al-A'rof (7) ayat 96, QS. an-Nisa (4) ayat 58, QS. as-Syuro (42) ayat 38.

3. Awal perpolitikan di mulai sejak Nabi Muhammad Saw. hijrah dari Makkah ke Madinah, dan saat itu pula Nabi Muhammad Saw. diangkat menjadi kepala negara, dan saat itu pula konsep politik di bangun atas dasar Islam, dimulai dengan membangun masjid, mempersaudarakan umat Muslim, piagam Madinah, mempertahankan negara dan melakukan diplomasi sebagai gerakan politik dakwah Islam.

REFERENSI

- Ali, Ummu Salamah, (2017), "Peradaban Islam Madinah (Refleksi Terhadap Primordialisme Suku Auz dan Khazraj)", *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 2, September, hlm. 97.
DOI: <https://doi.org/10.21111/klm.v15i2.1495>
- Al-Mubarafuri, Syaikh Shafiyurrahman, (2012), *Sirah Nabawiyah*, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anas, Ahmad dan Hendri Hermawan Adinugraha, (2017), "Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antar Budaya", *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 11, No, 1, hlm. 62. DOI: <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>
- Ash-Shalabi, Ali Muhamad, (2017), *Ghazawat Ar-Rasul Durus Wa 'Ibar Wa Fawa 'Id*, Terj. Masturi Irham dan M. Asmui Taman, *Ketika Rasulullah Harus Berperang*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Burhanuddin, Muhammad, (2019), “Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiolultural Piagam Madinah)”, *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember, hlm. 10.

DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v5i2.5233>

Cangara, Hafied, (2016), *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ghoni, Abdul, (2017), “Menggagas Dakwah Korespondensi Nabi Muhammad Saw”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37, No. 1, Januari-Juni, hlm. 162-173. DOI: 10.21580/jid.v37.i1.2623

<https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/politik-sosiologi-dakwah-rasulullah>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 16:34 WIB).

https://umj.ac.id/edisi_fakultas/model-kepemimpinan-nabi-muhammad-saw-di-madinah/, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 17:05 WIB).

Imam, Hudajat, (2009), *Teori-teori Politik*, Malang: Setara Press.

In’amuzzahidin, Muh., (2015), “Etika Politik Dalam Islam”, *Wahana Akademika*, Vol. 2 No. 2. hlm. 95-103. DOI: 10.21580/wa.v2i2.382

Istadiantha, (2014), “Pengantar Politik Islam dan Islam Politik”, *CMES: Center Of Middle Eastern Studies*, Vol 7 No 2, hlm. 186.

DOI: <https://doi.org/10.20961/cmes.7.2.13470>

Jafar, Wahyu Abdul, (2018), “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits”, *Al-Imarah*, Vol 3, No. 1, hlm. 21-23. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

Kamma, Hamzah, dkk, (2023), *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia.

Kementerian Agama, (2012), *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.

Lapidus, Ira M., (1999), *Sejarah Sosial Umat Islam (Bagian I dan II)*, Jakarta: Rajawali Press.

Mahmuddin, (2020), “Strategi Dakwah Rasulullah di Madinah”, *Jurnal Tabligh*, Vol. 21, No. 1, Juni, hlm. 99. DOI: <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.12428>

Rapar, (2002), *Filsafat Politik Plato Aristoteles*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rozak, Abdul, (2002), *Pemikiran Politik & Gerakan Sosial Kultural Kewarganegaraan*,

Pasaman: CV. Azka Pustaka.

Supriyadi, Dedi, (2008), *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Suwanto dan Rahmat Hidayat, (2020), “Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia”, *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 2, hlm. 130.

DOI: 10.30829/juspi.v3i2.4469

Tim Penyusun, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Ubaidillah, (2015), “Surat Dakwah Nabi Muhammad Saw (Analisis Tematik Atas Surat-Surat Nabi Muhammad Kepada Para Raja)”, *IBDA’: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 13, No. 1 Januari-Juni, hlm. 31.

DOI: <https://doi.org/10.24090/ibda.v13i1.487>

Zawawi, Abdullah, (2015), “Politik Dalam Pandangan Islam”, *Ummul Qura*, Vol 5, No 1. hlm. 90-91.

<https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2204>

Zuhri, Muh., “Sejarah Politik Islam”, TARJIH, Edisi 3, Januari 2002, hlm. 1-3.

<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/3101>

Politik Islam di Indonesia

Diana Nasution

Email: diananasution569@gmail.com

Abstrak: Makalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan antara Islam dan politik di Indonesia, serta dampaknya terhadap perkembangan politik dan sosial di negara ini. Penelitian ini menggunakan metode holistik, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk merinci pemikiran politik Islam, menganalisis kebijakan partai politik Islam, dan memahami persepsi masyarakat terhadap perubahan politik. Penelitian tentang Politik Islam di Indonesia menyoroti kerumitan dan dinamika yang melibatkan kontinuitas dan perubahan dalam perjalanan politik Islam di negara ini. Seiring evolusi waktu, terlihat bahwa politik Islam di Indonesia bukanlah entitas yang statis; sebaliknya, terjadi transformasi ideologis, taktik politik, dan respons masyarakat. Kesimpulannya, pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi dinamika politik Islam di Indonesia, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan politik, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual. Oleh karena itu, pemahaman yang holistik dan interdisipliner terhadap politik Islam di Indonesia menjadi kunci untuk merespons dan menggambarkan dinamika kompleks dalam evolusi politik Islam di negara ini.

Kata Kunci: Politik Islam, Pra-Orde Baru, Ideologis, Identitas Nasional, Demokrasi.

A. Pendahuluan

Negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Namun, Islam memiliki aturan politik yang bisa membuat negara itu adil. Dalam Al-Qur'an memang aturan politik tidak disebutkan, tetapi sistem politik pada zaman Rasulullah SAW sangatlah baik. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mendorong masyarakatnya menjalankan syariat Islam. Indonesia adalah sebuah negara Islam terbesar di dunia, namun bila dikatakan negara Islam, dalam praktiknya Islam kurang di aplikasikan dalam sistem pemerintahan baik itu politik maupun demokrasinya, hal itu berpengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia di Indonesia, terutama pada sistem yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia, contoh kecil adalah maraknya korupsi yang dikarenakan kurang transparannya pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut di atas membuat penulis membahas tentang Islam dalam aspek politik dan demokrasi dalam suatu Negara dalam laporan ini.

Kondisi Ideal Politik dalam Islam telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, menurut keyakinan mayoritas Muslim menerapkan model masyarakat Islam ideal era Nabi SAW bukanlah utopia, sebab model itu pernah terbukti dalam sejarah. Jika pada periode Mekah kaum muslimin masih menempati posisi marginal dan senantiasa tertindas, maka pada periode Madinah mereka telah mengalami perubahan yang sangat dramatis: umat Islam menguasai pemerintahan dan bahkan merupakan *a self-governing community*. Di Madinah peran Nabi Muhammad SAW selain sebagai *agamawan* beliau juga sebagai *negarawan*.¹ Sejak saat itu oleh pakar politik modern, Islam dipandang sebagai suatu sistem pemerintahan politik dan sekaligus agama.³⁰

Setelah Rasulullah SAW wafat, paradigma politik Islam terus berkembang. Dien Syamsuddin,³¹ mengkategorisasikannya pada tiga paradigma: (1) Agama dan negara tidak bisa dipisahkan (*integrated*);³² (2) Agama dan negara berhubungan secara

³⁰ Rahmat Effendi, "Kekuasaan Negara dalam Perspektif Dakwah Islam", Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM Unisba, September 2003), hlm.

³¹ Din Syamsudin, "Usaha Pencarian konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Islam", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan ICMI, No.2/IV/1993), hlm.5

³² Din Syamsuddin menjelaskan, bahwa dalam pemikiran pertama (*integrated*=Islam dan negara bersifat *integrated*) terdapat dua bentuk paradigma, yaitu: (a) Pemikiran *teokratis* dalam perspektif Syi'ah; dan (b) Pemikiran *teo-demokratis* dalam perspektif Maududi.

simbiotik,³³ dan (3) Islam tidak mempunyai kaitan apaupun dengan sistem pemerintahan (*sekularistik*).

Pada bagian lain, Din Samsudin³⁴ mengungkapkan bahwa dalam proses pencarian konsep tentang negara, para pemikir politik Islamberhadapan dengan dua tantangan yang saling tarik menarik, yaitu: (1) tantangan realitas politik yang harus dijawab; (2) tantangan idealitas agama yang harus dipahami untuk menemukan jawabannya. Namun, sepanjang sejarah yang dilalui hingga kini nampaknya pemikiran politik Islam terus berjalan “secara paralel” antara integrated, simbiotik, dan sekularistik. Pemikiran-pemikiran tersebut menampilkan perbedaan mendasar pada aktualisasi keyakinan keagamaan (religious belief) ke dalam aksi politik (political action).

Jika mengamati pandangan para pakar politik Islam di Indonesia, maka paradigma hubungan antara agama dan negara di Indonesia cenderung agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Pemikir-pemikir lain yang dapat digolongkan pada pandangan simbiosa adalah al-Gazali (dalam *Nasihat al-Mulk*), beliau mengutarakan, jika Tuhan telah mengirim nabi- nabi dan memberi mereka wahyu, Maka Dia juga mengirim mereka raja-raja dan memberi mereka “kekuatan Ilahi” . Keduanya antara Nabi dan raja memiliki tujuan yang sama yaitu kemaslahatan kehidupan manusia.

Salah seorang pemrakarsa paradigma sekularistik adalah „Ali Abd al-Raziq, ia mengemukakan bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apaupun dengan sistem pemerintahan ke-hkalifah-an, termasuk kekhilafahan al-Khulafa al-Rasyidin bukan sebuah sistem keagamaan atau keislaman, tapi sebuah sistem duniawi. Isu sentral diantara pokok pandangan Abd al-Raziq antara lain: “Islam tidak menetapkan suatu

³³ Salah seorang tokoh pemikir *simbiosa* yaitu Al-Mawardi (w. 1058), dalam bukunya *al- Ahkam al- Sulthoniyah*, menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara *simbiotik*. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Pemikir-pemikir lain yang dapat digolongkan pada pandangan simbiosa adalah al-Gazali (dalam *Nasihat al-Mulk*), beliau mengutarakan, jika Tuhan telah mengirim nabi- nabi dan memberi mereka wahyu, Maka Dia juga mengirim mereka raja-raja dan memberi mereka “kekuatan Ilahi” . Keduanya antara Nabi dan raja memiliki tujuan yang sama yaitu kemaslahatan kehidupan manusia

³⁴ Din Syamsuddin, Upaya. hal.9

regim pemerintahan tertentu, tidak pula mendesakkan kepada kaum Muslimin suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi yang kita miliki, dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.

Berkembang di antara pemikiran formalistik dan substantivistik. Kelompok formalisme keagamaan cenderung melakukan politisasi agama, sedangkan kelompok substantivisme keagamaan cenderung melaksanakan substansi agama ke dalam proses politik.

Pemikiran politik Islam di atas nampak terutama setelah berakhirnya pemerintahan Demokrasi Terpimpin (pemerintahan yang dipandang oleh kaum muslimin Indonesia lebih dekat dengan Partai Komunis Indonesia), yaitu pada pemerintahan Orde Baru. Munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan umat Islam karena mereka ikut andil dalam pembentukannya. Namun, karena pemerintah Orde Baru lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi, maka demi terjaminnya stabilitas sosial rezim ini, pemerintah mengotrol partai politik dengan mencampuri urusan intern partai dan melakukan penyegaran ideologi, puncaknya pada pemberlakuan asas tunggal (Pancasila) terhadap semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Berkaitan dengan paparan di muka, maka pembahasan pemikiran politik Islam di Indonesia dalam tulisan ini diarahkan pada pemikiran politik Islam *pra*, *masa*, dan *pasca* Orde Baru.

B. Islam Dan Umat Islam Pra Orde Baru

1. Islam dan umat Islam pra Orde Baru

Gerakan tajdid yang muncul pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20an yang dikenal sebagai gerakan pemikiran Islam modern di Indonesia. Salah satu ciri khasnya ialah berdirinya organisasi-organisasi Islam, seperti Syarekat Dagang Islam (SDI) berdiri th. 1909; Syarekat Islam (SI) berdiri th. 1911; Muhammadiyah berdiri th. 1912; Persatuan Islam (Persis) berdiri th. 1923; Nahdlatul Ulama (NU) berdiri th. 1926, semua organisasi ini di dirikan di Jawa, sedangkan Tawalib yang berdiri th. 1918 di Sumatera.

Proyek garapannya diarahkan pada perjuangan: Pertama, Pembentukan dan penyempurnaan Tauhid; Kedua, Mencapai Kemerdekaan.³⁵

2. Kemerdekaan Republik Indonesia (1945)

Perjuangan bangsa Indonesia melalui *Era Orde Lama* (1945-1966), era ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada era ini pemikiran bangsa Indonesia terbagi menjadi *nasionalis sekuler* dan *nasionalis Islam*. Jika kita mencermati perjuangan umat Islam di era ini, tidak seorang pun yang menafikan bahwa umat Islam memainkan peran yang sangat besar dalam menghancurkan kekuatan Komunis di Indonesia.

Orde Lama, ide Negara Islam (gagasan Negara Islam sebagai gejala awal abad ke-20-an) harus berhadapan dengan ide Negara Nasional berdasarkan Pancasila. Akhirnya melalui Dekrit 5 Juli 1959, ide Negara Islam “dikalahkan” sementara dasar Pancasila “dimenangkan”. Dalam kesempatan ini *K.H. Ahmad Siddiq (Alm.)* menfatwakan, bahwa Negara Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila sudah merupakan bentuk final bagi umat Islam. Sebuah fatwa politik yang tampaknya ingin menghapus trauma masa lalu antara umat Islam dengan pihak penguasa. Perjuangan selanjutnya, menjadikan Negara Pancasila itu sebagai kendaraan untuk mewujudkan suatu tata sosiopolitik yang adil, demokratis, dan egaliter di atas landasan *moraltransendental*.

C. Pemikiran Politik Islam Masa Orde Baru

Sebuah *sintesis* dari Demokrasi Liberal tahun 1950-an dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang minus demokrasi itu. Namun, karena disintegrasi nasional dan instabilitas politik yang terjadi sepanjang 20 tahun pertama pasca kemerdekaan merupakan trauma politik yang terus menerus menghantui rezim Orde Baru, maka rezim Orde Baru sangat menaruh perhatian terhadapnya. Sedemikian besarnya perhatian ini sehingga Orde Baru tampak sangat *represif* atau *quasi-represif* dalam menangani isu-isu di sekitar integrasi nasional dan stabilitas politik. Sehingga pemerintah Orde Baru dalam mengelola konflik politiknya melakukan *depolitisasi* dan puncaknya memberlakukan politik “*Asas Tunggal*”.

Karena prioritas difokuskan kepada pembangunan ekonomi yang harus ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan nasional, maka pembangunan demokrasi mengalami kelambanan. Dalam kaitan ini, ide politik Islam selama periode Orde Baru

³⁵ H.A.R Gibb, *Modern Trends in Islam*, (1932), hlm. 43-84

harus disampaikan dengan sangat hati-hati. Trauma politik masa lampau dengan pihak ABRI berangsur-angsur hilang, tetapi ide tentang Negara Islam sudah gugur dengan sendirinya dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas orpol dan ormas.³⁶

Pada tahun 1966, muncul suatu kerinduan dan optimisme terhadap partai politik Islam yang besar dan kuat itu. Mantan ketua *Masyumi* ketika dibubarkan pada tahun 1960, *Prawoto Mangkusasmito*, sangat aktif ingin mewujudkan rehabilitasi *Masyumi* sebagai Partai politik. Akan tetapi, usaha tersebut mendapat tantangan yang sangat keras dari pelbagai pihak, terutama dari Angkatan Darat, kalangan Kristen/Katolik, dan para tokoh Partai Nasional Indonesia. Bahkan ketika tuntutan umat Islam semakin menguat, pemerintah justru mengambil kebijakan untuk memperkecil ruang gerak politik mereka. Militer kemudian semakin tegas mengklaim kedudukannya sebagai pembela utama UUD 1945 dan Pancasila. Militer juga tidak segan-segan melawan kekuatan yang dipandang hendak menggantikan UUD 1945 dan Pancasila. Keberatan militer terhadap rehabilitasi *Masyumi* dilatarbelakangi traumanya akan simpati *Masyumi* kepada pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan banyak tokoh-tokohnya yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Secara formal alasan penolakan terhadap rehabilitasi *Masyumi* adalah persoalan “*hukum dan psikologis*”. Padahal yang sebenarnya akibat dari kekhawatiran dihadirkannya kembali *Masyumi*, kekuatan politik Islam akan dengan mudah dimobilisasikan sehingga menjadi satu kekuatan politik yang sangat besar.

Pada masa transisi menuju Orde Baru, hubungan yang mulai membaik antara Angkatan Darat dengan umat Islam sedikit demi sedikit semakin melemah, bahkan dalam perjalanan berikutnya timbul saling mencurigai dan tidak jarang timbulnya konflik. Keberatan pemerintah untuk merehabilitasi *Masyumi* mendorong sebagian umat Islam untuk mencari jalan lain untuk menghidupkan partai Islam. Pada tanggal 7 April 1967 Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM) membentuk Kelompok Tujuh untuk merancang pembentukan partai baru menggantikan *Masyumi*.⁹ Maka pada tanggal 5 Februari 1968 pemerintah menyetujui berdirinya Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) sebagai gabungan partai Islam, sebagaimana diusulkan BKAM.

Namun pemerintah mensyaratkan Parmusi bukanlah *Masyumi* (mantan pemimpin *Masyumi* tidak boleh memimpin Parmusi).³⁷ Persetujuan berdirinya Parmusi

³⁶ Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Thaimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya : Risalah Gusti, 1995, hlm 58

belum menjamin terakomodasinya aspirasi politik Islam. Buktinya pemerintah selalu mencampuri Parmusi dalam hal kepemimpinan. Ketika *Partai Muslimin Indonesia* (PARMUSI) untuk pertama kalinya hendak mengadakan Muktamar pada tanggal 4 – 7 November 1968 di Malang Jawa Timur, peserta Muktamar sepakat memilih *Mr. Muhammad Rum* sebagai *Ketua Umum Partai* yang baru itu. Menurut Muktamirin, walaupun Roem salah seorang anggota bekas pimpinan Partai Masyumi, ia bersih dari “dosa” politik Masyumi (yaitu simpati kepada pemberontakan PRRI), bahkan tidak jarang Muhammad Roem bersebrangan dengan tokoh karismatik Masyumi M. Natsir. Dengan latar belakang demikian, Parmusi optimis bahwa pemerintah tidak akan keberatan dengan naiknya Roem sebagai *Ketua Umum* Parmusi. Akan tetapi pemerintah dan *Angkatan Darat* berkebaratan terhadap *Mr. Muhammad Rum* karena beliau merupakan tokoh *Masyumi* yang masih sangat berpengaruh. Hal ini diperlihatkan dalam kebijakan Presiden yang meminta Jendral Alamsyah Ratuprawiranegara sebagai Sekretaris Negara mengirim telegram ke Malang untuk menginformasikan bahwa pemerintah tidak dapat menerima *Muhammad Rum*. Sebagai jalan keluar yang terbaik pada waktu itu kongres memilih duet antara *Djarnawi Hadikusumo* sebagai *Ketua* dan *Lukman Harun* sebagai *Sekretaris Jendral Partai Muslimin Indonesia*. Keduanya berasal dari *Muhammadiyah* sebagai komponen terbesar dari partai tersebut.

Dalam waktu yang tidak lama, kepemimpinan *Djarnawi Hadikusumo* dan *Lukman Harun* tidak dapat bertahan dengan baik. Pihak pemerintah tampaknya kesulitan untuk menerima kedua tokoh tersebut karena dianggap keras sekali, dan dipandang tidak *akomodatif*. Atas rekayasa dari pihak *opsus* yang dipimpin oleh Ali Murtopo, kepemimpinan Partai Muslimin Indonesia diambil alih oleh *Jaelani Naro* dan *Imran Kadir* yang menimbulkan konflik internal dalam tubuh partai. Akibatnya, pemerintah menunjuk *MHS. Mintareja* salah seorang anggota kabinet Soeharto sebagai *Ketua Partai Muslimin* menggantikan Djarnawi Hadikusumo (20 November 1970). Sejak saat itu ketegangan antara pemerintah dan Islam mulai muncul di permukaan karena para aktivis dan pemimpin partai agama mulai menunjukkan oposisi yang jelas.

Cendekiawan Muslim yang muncul pada 1970-an telah menerima dengan mantap ide Negara Nasional berdasarkan Pancasila, baik secara teoritis maupun praktek. Menjelang dijadakannya Pemilihan Umum (pemilu) pertama masa

³⁷ Allan Samson, “Islam in Indonesian Politics,” *Asian Survey*, vol. VII, no. 12 Desember 1968.

pemerintahan Orde Baru, Nurcholis Majid³⁸ melontarkan gagasan yang kemudian memicu kontroversi di kalangan umat Islam. Sekalipun gagasan itu tidak secara langsung ditawarkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu, namun karena waktu itu dekat dengan pelaksanaan Pemilu, manjadikan lontaran Nurcholish Majid sangat penting dari dilihat sudut politik. Dalam ceramah di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 21 Oktober 1972, Nurcholis menggarisbawahi perlunya pembaharuan pemikiran dalam Islam. Anjurannya terpusat pada dua gagasan utama, yaitu: (1) Gagasan sekulerisasi; dan (2) Penolakan terhadap dijadikannya Islam sebagai ideologi politik dengan pernyataannya yang terkenal ISLAM “YES”, PARTAI ISLAM “NO”.

Ketika menghadapi pemilihan umum tahun 1971, konflik antara kebijakan partai yang membawakan aspirasi Islam dengan pihak pemerintah berkelanjutan. Konflik ini disebabkan oleh: **Pertama**, berkaitan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri No.12 yang dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan pengebirian terhadap partai-partai politik di Indonesia.

Kedua, Lembaga Pemilihan Umum yang diketuai oleh Mendagri memangkas dalam jumlah yang sangat besar calon-calon yang diajukan oleh *Partai Muslimin Indonesia* yang sangat berpengaruh. Sebab kalau mereka dibiarkan aktif dalam proses penyelenggaraan Pemilu tentu saja akan sangat melemahkan partai pemerintah, “Golkar”.³⁹

Situasi yang terkait dengan karakteristik pemerintahan Orde baru yang dipandang *authoritarian* dalam membentuk format politik baru terutama dalam masa-masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, pemerintah mengambil langkah *depolitiasi* yang dilakukan secara *sistematik* lewat sejumlah kebijakan termasuk didalamnya adalah: (1) monoloyalitas; (2) kebijakan massa mengambang (*floating mass*); (3) emaskulasi dari parta- partai politik (kasus pengangkatan Mintareja dan Naro bagi Ketua PARMUSI); dan (4) pemilihan umum yang sama sekali tidak *kompetitif*. Kebijakan tersebut menjadikan Islam sebagai target sasaran yang besar sekali dan memancing reaksi umat Islam.

³⁸ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, dinyatakan bahwa Jaelani Naro melakukan “kudeta” terhadap kepemimpinan Djarnawi dan Lukman Harun. Naro adalah salah seorang Ketua Parmusi yang dikenal memiliki hubungan khusus dengan Ali Murtopo salah seorang arsitek politik Orde Baru

³⁹ Afan Gaffar, *Islam dan Politik Dalam Era Orde Baru: Mencari Bentuk Artikulasi YangTepat*, (Jakarta: Ulmul Qur'an,1993), hlm.19-20

D. Partai Politik Islam

1. Puncak kegagalan politik Islam

Pemilu pertama Orde Baru pada 1971, yang membawa kemenangan mutlak kepada *Golkar*, ia mengantongi: 62,80 % suara. Partai Islam memperoleh jatah suara yang kecil. Hanya *NU* yang relatif tidak diintervensi pemerintah memperoleh jumlah suara relatif besar yaitu: 18,67 %, sedikit lebih baik dibandingkan dengan perolehan suara *NU* pada 1955 (18,4 %). *Parmusi*, yang digambarkan sebagai pengganti *Masumi*, benar-benar hancur dan hanya memperoleh 5,36 %, jauh dari perolehan *Masyumi* pada Pemilu 1955 (20,9%). Partai Islam lain, *Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)* dan *Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)*, masing-masing hanya memperoleh 2,39 % dan 0,70 % suara.⁴⁰

Kenyataan pahit Pemilu 1971 semakin mengentalkan rasa putus asa, bahkan kemarahan umat Islam. Kedepidhan itu mengingat kecurangan dan pemaksaan pemerintah dalam proses Pemilu tersebut. Melalui kekuatan *Golkar*, pemerintah memanfaatkan biroksasi sebagai mesin suara. Di samping itu, dukungan militer yang kuat terhadap *Golkar* menjamin kemenangan mutlak organisasi sosial-politik tersebut. Sesuai dengan perolehan suara pada Pemilu 1971, *Golkar* mendapat 392 kursi, ABRI 230 kursi, utusan daerah dan golongan 130 kursi, partai Islam (*NU*, *Parmusi*, *PSII*, dan *Perti*) 126 kursi, dan partai lain (*PNI*, *Parkindo*, *Parkat*, *IPKI*, dan *Partai Murba*) memperoleh 42 kursi. Dengan hanya memperoleh jumlah wakil yang kecil, ruang gerak politik Islam sangat terbatas. Sebaliknya, kedudukan pemerintah relatif aman untuk menggolkan agenda politiknya di parlemen. Kemenangan mutlak *Golkar* juga memberikan legitimasi bagi pemerintah dan militer untuk melakukan kontrol terhadap kehidupan politis.

Belum sembuh luka akibat perolehan suara yang tidak memuaskan pada Pemilu 1971, umat Islam dihadapkan kepada program pengembangan sistem politik hegemonis. Pada bulan Januari 1973 pemerintah memutuskan untuk melakukan *restrukturalisasi sistem kepartaian*. Dalam struktur politik yang baru ini, seluruh partai kecuali *Golkar*, harus bergabung ke dalam dua partai politik. Keempat partai Islam *NU*, *Parmusi*, *PSII*, dan *Perti* digabung kedalam *Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*, sedangkan lima partai lainnya yang berlatar belakang nasionalis (*PNI*, *IPKI*, dan *Murba*), Kristen

⁴⁰ Dewan Editor, *Ensiklopedi Tematis. (jld 6)*, hlm. 359

Protestan (*Parkindo*) dan Katolik (*Parkat*), digabung ke dalam *Partai Demokrasi Indonesia (PDI)*.

Sebagai akibat dari penggabungan yang dipaksakan, konflik internal di dalam kedua partai baru, *PPP* dan *PDI*, tak terhindarkan. Walaupun *PPP* lebih diuntungkan oleh karakter keislaman dan karena elite partai adalah juga elite organisasi keagamaan, hal itu tidak menjamin kesatuan yang utuh. Konflik di tubuh *PDI* tampaknya lebih kompleks jika dibandingkan dengan konflik di *PPP*. Selain itu, meskipun pemerintah telah merestrukturisasi sistem kepartaian, intervensinya dalam dua partai tidak menyusut. Setiap ada konflik internal partai, pemerintah turut campur dengan alasan sebagai pembina politik.

Kekhawatiran umat Islam, adalah akan digunakannya legitimasi kemenangan mutlak Pemilu 1971 oleh pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yang dianggap menyusutkan mereka terwujud. Karena Golkar yang ditambah wakil ABRI dan Utusan Golongan serta Utusan Daerah memperoleh mayoritas anggota parlemen. Usulan pemerintah seperti mensejajarkan aliran kebatinan dengan agama yang diakui di Indonesia dengan mudah dapat disetujui lembaga tersebut. Contoh lainnya adalah RUU Perkawinan, yang dianggap umat Islam melecehkan agama karena beberapa pasalnya bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut para ulama seperti Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada saat itu, ada beberapa pasal dalam RUU yang bertentangan dengan ajaran Islam, utamanya tentang sistem parental, perkawinan antar agama, pertunangan, tata cara gugatan perceraian, dan pengangkatan anak (adopsi). Karena muncul demonstrasi besar di luar MPR DPR, bahkan pendudukan gedung tersebut oleh massa pemuda Islam, akhirnya pasal yang ditentang oleh umat Islam itu dicoret dari RUU Perkawinan.

Walaupun demonstrasi penolakan RUU Perkawinan mampu memaksa pemerintah untuk memperhatikan aspirasi umat Islam, namun keinginan pemerintah menggolkan agenda politik yang tidak sesuai dengan cita-cita umat Islam tetap saja dilakukan. Hal ini terlihat dari usul pemerintah untuk mewajibkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi bagi semua organisasi politik dan sosial di Indonesia. Bidikan utama kebijakan itu adalah *PPP*, yang menggunakan Islam sebagai asas partai. Gambar *PPP* pun (ka'bah) menunjukkan ciri khas Islam. Walaupun Partai Kristen, Katolik, dan Partai lainnya juga menggunakan ideologi bukan Pancasila, namun asas

Islam lah yang dirasakan oleh pemerintah mempunyai potensi untuk menghimpun kekuatan perlawanan. Gagasan tentang asas tunggal ini tertulis dalam pidato kenegaraan Presiden di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus.⁴¹

2. Perumusan Kembali Politik Islam

Politik Islam mencapai puncaknya dengan diberlakukannya asas tunggal yang berarti juga melemahnya gerakan politik Islam yang bersifat formalistis dan legalistis, mendorong sebagian dari mereka untuk merumuskan kembali makna dan strategi politik Islam lebih jauh. Dengan dipersempitnya ruang gerak bagi politik Islam dalam *bentuk formal*, dijadikan peluang untuk memasuki wilayah politik melalui jalan lain yang dipandang masih sangat terbuka. Mereka menganggap perlu mengakomodasi gagasan pemerintah untuk mengikis kecurigaan antara Islam dan negara. Realitas politik Islam yang dipandang gagal memotivasi umat Islam, terutama kalangan cendekiawan mudanya yakni mencari rumusan baru politik agar dapat berperan dalam negara. Salah satunya adalah melakukan reorientasi terhadap makna politik Islam yang selama itu dielaborasi dalam corak *legalistis dan formalisteis*. orientasi politik baru tersebut lebih mengarah kepada *politik substantif dan integratif*. artinya, pendekatan baru mengutamakan kandungan nilai islam sebagai sumber inspirasi bagi kegiatan politis serta sikap saling menerima dan menyesuaikan antara umat islam dan negara.

Pada periode 1982 - 1985 terjadi perubahan fundamental, mengenai hubungan yang baik antara Islam dan pemerintah orde baru mulai terwujud walaupun belum sampai pada tarap yang ideal. sekalipun hubungan baik ini tidak serta merta dinisbatkan kepada keberhasilan merumuskan orientasi baru politik Islam, namun ada konteks sosial yang ikut mendukungnya, yaitu perbaikan ekonomi, pendidikan, dan mobilitas sosial yang tinggi dari umat dan saling mendukung.⁴²

Periode terakhir dekade 1980-an pemerintah orde baru secara perlahan- lahan mengambil kebijakan yang akomodatif terhadap Islam. indikator- indikatornya dapat dilihat sebagai berikut:⁴³

⁴¹ Wilaela. *Sejarah Islam Klasik*. Pekanbaru : Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016, hlm 76

⁴² Muhammad, Ali Abdul Mu'tti. *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1998, hlm. 35

⁴³ Tim, Jamhari, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini (Islam DiIndonesia)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru VanHoeve, 2002), hal.354.

- a. Sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Diknas) dipercayakan kepada menteri Fuad Hasan, sejumlah kebijakan yang selama itu dianggap sangat merugikan Islam mulai ditinggalkan. Misalnya dihapuskannya larangan berbusana Muslimah (yang pernah diberlakukan semasa Menteri Daud Yusuf).
- b. Ketika rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dibicarakan di DPR, sejumlah pemuka agama Islam mengingatkan bahwa RUU tersebut tidak memberikan tempat yang sebenarnya bagi Pendidikan Agama. Sejumlah organisasi massa Islam berhasil melakukan diskusi dan lobbying yang serius sehingga ketika RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 beberapa pasal yang menyangkut peranan pendidikan Agama dapat dimaksukkan. Bahkan **PPP** (Partai Persatuan Pembangunan) berhasil melakukan amandemen di dalam penjelasannya bahwa “antara pengajar dan anak didik harus memiliki agama yang sama”.
- c. Pemerintah dengan sangat cepat *membreidel Mingguan Monitor* yang memuat berita yang dipandang menghina Islam dan Umat Islam.
- d. Memberlakukan *RUU Peradilan Agama Islam* yang cukup mendapat reaksi dari kalangan non-Islam.
- e. Fenomena kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (*ICMI*) Yang memperlihatkan kecenderungan ke arah akomodatif.
- f. Bantuan pembangunan sarana peribadatan melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.
- g. Diangkatnya sejumlah intelektual muslim menjadi anggota MPR yang mewakili golongan.

Salah satu sumber lain yang penting dari perubahan pada masa Orde Baru adalah semakin banyaknya dari kelompok Muslim yang terpelajar. Di satu sisi, dari mereka ini tumbuh persepsi baru tentang hubungan Islam dan negara-bangsa, yang tidak lagi berpegang pada pandangan lama, Islam sebagai ideologi negara. Dan di sisi lain mereka semakin kuat, tidak tetap berada di wilayah pinggiran. Dari situ terjadi akomodasi politik antara pemerintah dan kelompok Muslim, antara kedua belah pihak saling membutuhkan.⁴⁴

⁴⁴ Herry, Mohammad. *Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta : Gema Insani, (2006), hlm 19

Nuansa akomodatif tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam, sehingga kecuali memunculkan pemimpin-pemimpin umat juga sejumlah generasi muda Muslim memperoleh kenikmatan untuk mengenyam pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri pada perguruan tinggi yang sangat menonjol. Misalnya: Amin Rais, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Kuntowijoyo, Yahya Muhamimin, Ahmad Watik Pratignya, Umar Anggoro, Jeni, Jamaluddin Ancok, Sofiyan Effendi.

Implikasi dari kepemimpinan di atas, adalah terjadinya pergeseran fundamental yang menyangkut persepsi tentang tujuan perpolitikan Islam dan modus dalam berpolitik. Sedangkan yang menyangkut tujuan perpolitikan Islam dapat dikatakan bahwa apa yang hendak diperjuangkan tidak lagi seperti generasi kepemimpinan pasca kemerdekaan yang menghendaki terwujudnya Islam sebagai dasar negara, akan tetapi bagaimana Islam memperoleh representasi yang wajar dan proporsional sesuai dengan besarnya potensi umat Islam. Artinya, bagaimana Islam supaya selalu diperhitungkan dalam perpolitikan nasional dan bagaimana Islam mempunyai akses yang besar dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Dengan demikian nilai-nilai Islam akan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air.

Berkaitan dengan itu, *Afan Gaffar* mengusulkan untuk mempertimbangkan bagaimana penampilan yang *low profile*, menjelma dalam artikulasi politik. Sebab penampilan demikian merupakan alternatif yang sangat efisien dan efektif. Dengan demikian, komunikasi yang intensif baik yang dilakukan secara internal dalam arti antar sesama organisasi massa Islam, maupun secara eksternal terutama dengan kalangan Angkatan Bersenjata. Posisi ABRI sangat strategis di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada, dan karena itu ia harus selalu dipertimbangkan. Sebaliknya, salah pengertian dengan ABRI akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan seperti pengalaman-pengalaman masa lampau.⁴⁵

Namun demikian, sekalipun politik Islam Orde Baru sudah mengalami perubahan yang sangat fundamental, akan tetapi *bagaimana mencari bentuk artikulasi kepentingan Islam yang tepat dalam rangka meningkatkan tujuan perpolitikan Islam*, masih tetap menjadi pekerjaan rumah umat Islam. Paparan di atas, menggambarkan bahwa perjalanan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru mengalami pasang surut. Awal berdirinya Orde Baru, tumbuh semangat baru umat Islam untuk kembali

⁴⁵ Toqiruddin, Moh. *Relasi Agama dan Negara : Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*. Malang : UIN-Malang Press, 2009, hlm 116

menghidupkan gagasan politik mereka. Namun optimisme tersebut terbukti surut setelah pemerintah yang didukung militer tidak memberikan ruang gerak. Walaupun ada peluang yang diberikan pemerintah untuk politik Islam, namun kontrol dan intervensi pemerintah yang kuat menjadikan kesempatan politik tidak lebih dari sekedar “aksesoris politik”.

Berlatar belakang itu, lalu muncul gagasan pembaharuan pemikiran Islam yang dipelopori cendekiawan muda tahun 1970-an. Pemikiran yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an yang lebih menekankan pada perjuangan formal politik Islam, pemikiran yang berkembang era 1970-an lebih menitik beratkan pada substansi Islam. Gagasan itu diwujudkan dengan mencoba menghubungkan substansi ajaran Islam dengan isu kontemporer sosial seperti modernisasi, sekularisasi, pluralisme, isu demokrasi, masyarakat madani, hak asasi manusia, dan gender.⁴⁶

3. Pasca Orde Baru

Naiknya Abdurrahman Wahid (Gus Dur)⁴⁷ memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia (Presiden) memberikan indikasi yang cukup jelas betapa Islam telah menjadi “pusat” dari wacana ke-Indonesiaan. Di sisi lain, tampilnya Amin Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR RI mencerminkan peran umat Islam yang menonjol. Naiknya ketiga tokoh ini mencerminkan keberhasilan pendidikan Islam, baik tradisional maupun modernis.

Setelah Presiden Suharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, dan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan B.J. Habibie menyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1999, beberapa partai Islam didirikan oleh kaum muslimin. Berdirinya Partai Islam yang banyak menurut Jamhari, paling tidak ada tiga tipe partai berlatarbelakang Islam yang berdiri.⁴⁸

- a. Partai yang menginginan dipakainya Islam sebagai asas dan memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Partai dalam kelompok ini adalah: Partai Keadilan (PK); Partai Kebangitan Umat (PKU), Partai Nahdatul Ummah (PNU), Partai Indonesia Baru (PIB); Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

⁴⁶ Jurdji, Fatahullah. *Ilmu Politik :Ideologi dan Hegemoni Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, hlm 91

⁴⁷ Gus Dur berpendapat bahwa seharusnya agama jangan dihadapkan dengan negara. Karena realitas sosial budaya Indonesia menunjukkan keberagamaan yang kompleks, maka tuntutan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya penentu warna akan mengalami kesulitan. Ketika Gus Dur memimpin NU.

⁴⁸ Jamhari, dalam Ensiklopedi Tematis hlm. 374.

- b. Partai yang berasaskan Pancasila, tetapi tetap mempertimbangkan konstituante tradisional Islam. Dalam katagori ini adalah: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- c. Partai yang memiliki hubungan khas dengan kalangan muslim, tetapi tidak membatasi diri pada umat Islam dan kepentingan khasnya. Partai dalam katagori ketiga ini adalah: Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Daulah Ummah (PDU). Keinginan untuk menjadikan Islam sebagai asas negara agaknya tidak lagi populer.

Bahkan tidak ada lagi partai Islam yang mencita-citakan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Pendirian Partai Islam menimbulkan pro dan kontra. Sebagian umat Islam menyambut antusias berdirinya partai Islam sebagai sarana menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagian yang lainnya menyuarakan ketidaksetujuannya karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa partai politik hanya menjadikan umat Islam terkotak-kotak.⁴⁹

Berdirinya partai Islam menurut kalangan yang setuju, jika dilihat dari proses demokratisasi, keberadaan partai Islam sesungguhnya mencerminkan kesediaan umat Islam untuk masuk ke dalam wacana demokrasi. Jadi, partai Islam sesungguhnya merupakan wujud partisipasi umat dan pengakuannya terhadap demokratisasi di Indonesia.⁵⁰

E. Penutup

Pemikiran di atas, memberikan corak Islam di Indonesia beberapa dekade terakhir, sejak Orde Baru hingga sekarang, tampak berubah-ubah. Jika indikasi politik yang digunakan, maka proses pergeseran (politis) dalam hubungan antara Islam dan negara dapat diamati dengan jelas. Periode ini dimulai dengan hubungan yang baik antara umat Islam dan ABRI (TNI dan Polri) sebagai penopang utama kekuatan Orde Baru hingga kemudian posisi politik umat dipinggirkan. “Mereka telah memperlakukan kita (umat Islam) seperti kucing kurap,” begitu komentar M. Natsir mengenai cara pemerintah Orde Baru menghalangi bangkitnya peran politik Islam. Namun, gabungan keterpaksaan mengikuti alur politik yang diterapkan Orde Baru membatasi jumlah dan peranan partai politik dan mengubah ideologi politik dan reaksi intelektual yang

⁴⁹ Yahya, Zamharil. *Islam dan Modernisasi Politik : Suatu Refleksi Terhadap PartaiPartai Islam*(Jurnal Ushuluddin : Jurnal tentang Kajian Pemikiran Islam Klasik dan Modern). Pekanbaru : Badan Penelitian dan Pengembangan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Riau, 2005, hlm. 29

⁵⁰ Chaniago, Andrino A. *Teori Politik Modern*. Jakarta :Rajawali Pers, 2010, hlm. 23

memadai dari kaum muslim sendiri telah mengubah hubungan umat Islam dengan negara. Hubungan yang pada awalnya antagonis kemudian berubah menjadi akomodatif, untuk kemudian, meminjam istilah Bahtiar Effendy, “berkembang ke dalam hubungan yang *integratif* antara Islam dan negara.”

Namun dalam hal *paradigma simbolis* dan *paradigma substansialis* dalam pemikiran politik Islam di Indonesia yang bersifat paralel hingga kini masih terus berlanjut. Oleh karena itu, *bagaimana mencari bentuk artikulasi kepentingan Islam yang tepat dalam rangka meningkatkan tujuan perpolitikan Islam masih tetap menjadi PR Umat Islam*. Dalam hal ini bagaimana representasi Islam secara wajar dan proporsional sesuai dengan potensi Islam sehingga tidak menimbulkan reaksi yang negatif baik dari kalangan internal Islam sendiri maupun yang berasal dari kalangan non- Islam, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan politik Islam itu sendiri.

REFERENSI

- Gaffar, Afan. 1993. “*Islam dan politik Dalam Era Orde Baru: Mencari Bentuk Artikulasi Yang Tepat*”. Jakarta. Jurnal Ilmiah. Ulumul Qur'an, N0. 2, Vol. IV.
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad. 1995. “*Muhammadiyah dan hig politics*”. Jakarta, Jurnal Ilmiah Ulumul Qur'an.No. 2 Vol . VI.
- Dewan Editor. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, 2 dan 6*. Jakarta : PT Ikhtiar Baru VanHoeve.
- Saefullah Fatah, Eep. 1994. “*Manajemen Konflik Politik dan Demokratisasi Orde Baru*”. Jakarta. Jurnal Ilmiyah Ulumul Qur'an : No. 5 dan 6, VolV.
- Gerakan Massa dan Demokratisasi: Potret Pergeseran Politik Orde Baru”, *Prisma*, N0. 4 dan No. 8 / XXIII/ April.
- Gibb, HAR, 1945: 36. *Modern Trends in Islam*, , dalam Mukti Ali: 1971. *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, Yayasan Nida, Jogyakarta.
- Amien Rais, M. 1998. *Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma,ruf Nahi Munkar*. Bandung : Zaman Wacana Mulia.
- U. Tanthowi, Pramono. “*Muhammadiyah dan N.U. dalam Kompetisi Makna “Civil society”*”, Jakarta, *Kompas*. Juli:2001.
- William Liddle, R. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Bade Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik: Terj.* Jakarta. Grafiti,

- Soeharto. 1985. *Amanat Kenegaraan I 1967-1971*. Jakarta. Inti Idayu Pers Hasyim,
- Umar. 1979. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Agama*. Surabaya Bina Ilmu.
- Chaniago, Andrino A. *Teori Politik Modern*. Jakarta :Rajawali Pers, 2010.
- Herry, Mohammad. *Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta : Gema Insani, (2006).
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Thaimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Jurdi, Fatahullah. *Ilmu Politik :Ideologi dan Hegemoni Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.
- Muhammad, Ali Abdul Mu”ti. *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1998
- Toqiruddin, Moh. *Relasi Agama dan Negara : Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*. Malang : UIN-Malang Press, 2009.
- Wilaela. *Sejarah Islam Klasik*. Pekanbaru : Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
- Yahya, Zamharil. *Islam dan Modernisasi Politik : Suatu Refleksi Terhadap PartaPartai Islam*(Jurnal Ushuluddin : Jurnal tentang Kajian Pemikiran Islam Klasik dan Modern). Pekanbaru : Badan Penelitian dan Pengembangan Fakultas Ushuluddin UIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Riau, 2005.

Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Ikhwan Nasution

Email: Ikhwanas@yahoo.com

Abstrak Demokrasi dan kebebasan pers merupakan suatu hal yang tak terpisahkan, keduanya saling keterkaitan, dimana suatu system yang besar akan mempengaruhi sub system yang berada di dalamnya. Di dalam Al-Quran telah diatur bagaimana pers harusnya bergerak dan berkembang dalam menyediakan informasi dan mencerdaskan masyarakat melalui pesan-pesan dakwah. Dalam hal ini penulis membahas bagaimana demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia berjalan dengan baik. Kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan amanat undang-undang. Bagaimana negara berfungsi sebagai pengawas, pelindung, dan menjadi fasilitator hak-hak warga negara.

Kata Kunci: Demokrasi, Kebebasan Pers, Negara Indonesia

A. Pendahuluan

Demokrasi dan kebebasan pers merupakan suatu hal yang tak terpisahkan, keduanya saling keterkaitan, dimana suatu system yang besar akan mempengaruhi sub system yang berada di dalamnya. Demokrasi dan kebebasan pers adalah dua pilar penting dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat. Keduanya saling terkait dan saling mendukung dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi dan Kebebasan Pers memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keselamatan dan perdamaian dunia. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta dalam proses pengambilan keputusan melalui perwakilan. Selain itu, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengedepankan prinsip persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Konsep demokrasi muncul pada zaman Yunani kuno dan diaplikasikan dalam kehidupan bernegara dari Abad ke-4 Sebelum Masehi hingga Abad ke-6 SM. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama.

Meskipun demokrasi telah diadopsi di Indonesia, namun pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti politik uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi menjadi kunci untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memperbolehkan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan masa depan negara, baik melalui pemilihan umum atau lembaga tertentu. Sementara itu Kebebasan Pers, dan perannya dalam membangun dan mempertahankan kestabilan sosial.

Sejarah pers Indonesia telah menunjukkan bagaimana keterkaitan antara system politik, system pers itu berjalan. Sistem pers yang otoriter cenderung melahirkan pers yang otoriter, demikian juga system politik yang demokratis akan melahirkan pers yang bebas. Sebuah demokrasi tidak akan tercapai tanpa pers yang bebas (kebebasan pers). Kebebasan pers dilandasi dengan aturan perundang-undangan. Dalam perspektif liberal, kebebasan mensyaratkan tidak ada pemaksaan pemerintah, pembatasan peran pemerintah, dan kedaulatan individu. Demokrasi liberal memegang teguh prinsip

otonomi individu. Oleh karenanya, negara tidak memiliki hak untuk mencampuri kehidupan warga negaranya, kecuali dalam keadaan tertentu. Peran pemerintah adalah menjaga hak fundamental individu untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Jika pemerintah menyalahgunakan kekuasaan, rakyat memiliki hak untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan dan mengantikannya dengan pemerintahan baru yang dapat melindungi kebebasan mereka. Menurut Munir Fuady, pembatasan terhadap kebebasan pers merupakan bagian dari anti demokrasi yang meliputi pengekangan pers (restraint), pembredelan pers (breide), sensor (censor), atau pelarangan sebelum terbit (prior restraint). Persoalan pers yang berkenaan dengan adanya intervensi dimungkinkan lahir dari pemerintahan yang otoriter. Namun, pasca reformasi dan ditetapkannya undang-undang pers di tahun 1999 menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintahan dalam kebebasan pers. Oleh karena, kebebasan dan kemerdekaan pers tersebut harus dijaga secara bersama

Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional.

Dalam prespektif Islam pun pers memiliki tempat tersendiri yang juga sangat penting. Pers yang diidamkan oleh Islam yang bisa memberikan pencerahan melalui pesan dakwah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Didalam Al-Quran telah diatur bagaimana pers harusnya bergerak dan berkembang dalam menyediakan informasi dan mencerdaskan masyarakat melalui pesan-pesan dakwah. Pers Islam juga seogianya mengatvokasi isu-isu keumatan dari Islam itu sendir. Berdasarkan paparan latarbelakang yang telah dikemukakan diatas maka pembahasanya bagaimana kebebasan pers itu berjalan di era demokrasi seperti negara Indonesia.

Adapun pembahasan dalam makalah ini di fokuskan pada bagaimana kebebasan pers itu berjalan di Negara Demokrasi Indonesia. Untuk mengetahui kebebasan pers di Negara Demokrasi Indonesia. Bagaimana Demokrasi Berjalan Di Tengah Kebebasan Pers Saat ini? Apakah Kebebasan Pers sudah sesuai dengan regulasi yang ada?

B. Pengertian Demokrasi dan Kebebasan Pers

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi diistilahkan pertama kali oleh sejarawan Yunani, Herodotus, pada abad ke-5 SM. Demokrasi berasal dari kata “demos (masyarakat) dan “kreteria” (aturan) atau kekuasaan). Menurut ahli seperti Lane dan Errsson, bahwa demokrasi berarti

kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan oleh dan untuk mayoritas.⁵¹ Kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang melibatkan kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide-ide tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memperbolehkan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan masa depan negara, baik melalui pemilihan umum atau lembaga tertentu.

2. Karakteristik Demokrasi

Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, respect terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan keterbukaan dalam kebijakan pemerintah.⁵² Adalah hak seluruh warga Negara yang diatur dengan Undang-undang.

3. Tujuan Demokrasi

Menjaga hak-hak rakyat, mengurangi ketidakadilan sosial, menciptakan keseimbangan kekuasaan yang seimbang antara negara dan rakyat, dan meningkatkan kualitas hidup warga Negara⁵³.

C. Pengertian Kebebasan Pers

1. Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Pers adalah salah satu sarana komunikasi bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas memberikan kontrol kepada pemerintah agar agar pemerintan tetap menjalankan peranan dan tugas dengan baik.⁵⁴ Namun alangkah baiknya jika dalam melaksanakan tugasnya pers tetap professional, melaksanakan kode etik jurnalistik dengan baik serta pemberitaan yang berimbang. Kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang melibatkan kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide-ide tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain⁵⁵. Fungsi utama pers sendiri yakni mencerdaskan publik, mendukung sistem politik, dan menjaga kebebasan sipil. Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan komunikasi bebas terhadap

51 Adelia Masrifah Cahyani, “Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melayani Dan Menggali Potensi Masyarakat Melalui Media Sosial,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (10 April 2020): 1–16, <https://doi.org/10.15642/jik.2020.10.1.1-16>.

52 Tri Wahyudiono dan Faizah Rizky Muna, “Historis Negara Demokrasi Pancasila,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 02 (19 September 2023): 77–96.

53 “View of Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan.”

54 Wahyudiono dan Muna, “Historis Negara Demokrasi Pancasila.”

55 Saptohadi, “Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia.”

informasi dan berbagi tips, ide, dan gagasan dengan publik⁵⁶.

Di Indonesia pers sebagai terjemahan dari bahasa Inggris press dapat mempunyai pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas pers mencangkup semua media komunikasi massa, seperti, televisi, radio, cetak dan juga online yang berfungsi melancarkan atau menyebarkan informasi seperti berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang dan sekelompok orang kepada orang lain.¹³ Pers di Indonesia pada masa reformasi memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menyampaikan informasi kepada kalayak.

Informasi dimaksud adalah karya jurnalistik tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Pengertian demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat oleh warga negara atau wakil rakyat yang mereka pilih melalui proses demokrasi.⁵⁷ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, memberikan dukungan yang besar terhadap berjalannya demokrasi masyarakat secara luas.

2. Kebebasan Pers dan Per Bebas

Kebebasan Pers mengacu pada keberadaan media massa yang tidak dipengaruhi oleh campur tangan dan kontrol tertentu, sementara Pers Bebas mengacu pada kebebasan meliput dan mengalirkan informasi secara legal. Kebebasan pers yang dimaksud dalam hal ini pers bebas menyampaikan informasi lewat media massa akan tetapi harus mentaati kode etik jurnalistik dan juga UU No 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini fungsinya menjaga kekekbasan pers dimaksud. Sebagia pers tidak boleh melanggar ini bila tidak ingin berurusan dengan hukum.

Kebebasan Pers juga mencakup kebebasan warga untuk memiliki akses pada informasi tanpa dibatasi oleh organisasi politik dan kepentingan tertentu. Namun kebebasan dimaksud harus tetap memenuhi etika. Landasan hukum kepada warga yang menyampaikan pesan lewat media sosial misalnya dia harus mematuhi ITE sebagai landasan hukumnya.⁵⁸ Kebebasan pers adalah salah satu pilar utama dalam mendukung

⁵⁶ Tod Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke 20 Hingga Era Reformasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015). ¹³ Jones.

⁵⁷ Cahyani, “Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melayani Dan Menggali Potensi Masyarakat Melalui Media Sosial.”

⁵⁸ Bagir Manan, *Menjaga kemerdekaan pers di pusaran hukum*, Cet. 1. (Jakarta: Dewan Pers, 2010).

¹⁶ “Tampilan Pers Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Islam,” diakses 17 Oktober 2023, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/25/8>.

demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat dan beragam tentang isu-isu politik dan publik¹⁶. Pasca reformasi dan ditetapkannya undang-undang pers di tahun 1999 menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintahan dalam kebebasan pers. Oleh karena itu kebebasan dan kemerdekaan pers tersebut harus dijaga secara bersama-Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional. Kebebasan pers adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Kebebasan pers juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pemerintah, mengungkapkan pendapat mereka, dan berpartisipasi dalam debat politik.

D. Sejarah Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang melibatkan beberapa fase perkembangan, yang mencerminkan dinamika politik dan sosial negara ini. Berikut adalah ringkasan sejarah demokrasi di Indonesia dan fungsi serta peran demokrasi di negara ini:

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959). Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan menerapkan sistem demokrasi parlementer.⁵⁹ Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959.
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Sistem demokrasi berubah menjadi demokrasi terpimpin. Periode ini berakhir pada tahun 1965.⁶⁰
3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966-1998). Sistem demokrasi berubah menjadi demokrasi Pancasila. Periode ini berlangsung hingga tahun 1998.
4. Demokrasi Pasca Reformasi (1998-sekarang):⁶¹ Jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 membuka era reformasi politik.

Proses reformasi ini membawa perubahan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia. Para tokoh dan founding fathers, seperti Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir, memainkan peran penting dalam membentuk konsepsi demokrasi di Indonesia. Gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi nilai-nilai yang mendasari demokrasi Pancasila. Fungsi dan Peran Demokrasi di Indonesia yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat kemudian

⁵⁹ Paizon Hakiki, "Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959" (Journal:eArticle, Riau University, 2014), <https://www.neliti.com/publications/206618/>.

⁶⁰ Hakiki

⁶¹ Hakiki.

demokrasi berfungsi untuk memberikan kekuasaan kepada rakyat, menjadikan mereka sebagai pemegang kedaulatan.⁶²

Demokrasi di Indonesia diharapkan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Demokrasi dapat menjadi landasan untuk pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diimplementasikan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi politik masyarakat, termasuk pemilihan umum dan kebebasan bereksresi.

Sebagai negara dengan masyarakat yang beragam, demokrasi di Indonesia terus berkembang, mencerminkan tantangan dan dinamika dari berbagai kelompok dan kepentingan dalam masyarakat.

Di dalam sebuah negara demokratis, pemerintah seharusnya tidak memiliki kendali penuh atas media atau menghambat akses ke informasi yang kritis terhadap pemerintah.⁶³ Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

E. Peran Negara dalam Menjaga Kebebasan Pers

Negara dalam konteks demokrasi seharusnya melindungi dan mendukung kebebasan pers sebagai salah satu hak asasi manusia. Ini mencakup melindungi wartawan dan media dari ancaman, kebijakan yang dapat menghambat kebebasan pers, dan tindakan represif terhadap media independen. Terkadang, di berbagai negara, kebebasan pers bisa menjadi terbatas oleh pemerintah atau kelompok tertentu yang ingin mengendalikan informasi dan narasi. Tantangan lain adalah masalah kredibilitas dan etika dalam jurnalisme, yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap media. Dalam sebuah negara demokratis yang kuat, negara bertindak sebagai penjaga hak-hak individu, termasuk kebebasan pers, sehingga warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik dengan bijak dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Kebebasan pers dan demokrasi saling melengkapi dan harus dijaga untuk menjaga kesehatan sistem demokrasi Negara, demokrasi, dan kebebasan pers adalah tiga pilar penting dalam sistem demokrasi yang bekerja sama untuk menciptakan

62 Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia: pemikiran politik Bung Hatta* (Penerbit Buku Kompas, 2010).hlm.280

63 Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*.

masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.⁶⁴

F. Demokrasi Islam

Demokrasi dalam pandangan islam didukung Ajaran Agama Islam yang terus mendorong sifat demokratis dalam kehidupan sosial dan politik, mendukung pengambilan keputusan melalui musyawarah dan berperan dalam memandu umat manusia ke titik bahagia yang dicita-citakan. Dalam asas Islam juga disebutkan bahwa asas keadilan yang menempati posisi penting dalam Islam melengkapi prinsip-prinsip demokrasi dalam bentuk hubungan nalar pelaksanaan pemerintahan. Implementasi negara Islam dalam demokrasi dapat bervariasi secara signifikan antara negara-negara dan bahkan dalam konteks yang sama. Hal ini mendorong adanya perdebatan yang mendalam dan sering kali menjadi subjek perubahan seiring waktu. Para tokoh dalam memberi pengertian demokrasi itu sendiri, terutama yang dipahami oleh tokoh-tokoh barat. Hal ini kemudian dapat memberi gambaran kepada kita apakah demokrasi diperjuangkan oleh Barat dapat diterapkan di negeri-negeri muslim. Dalam realita di lapangan sekarang ini demokrasi yang diperjuangkan dan dikembangkan oleh Barat telah diadopsi oleh umat Islam di negara-negara yang mayoritas muslim. Meskipun timbul pertanyaan, apakah demokrasi yang dikembangkan oleh barat sama dengan syura yang ada dalam Islam. Kita juga perlu terlebih dahulu mengemukakan pengertian syura yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam. Karena konsep syura telah disebutkan dalam Alquran dan pada awal lahirnya Islam telah diperaktekkan oleh Rasulullah Muhammad Saw. Kita sebagai umatnya, diperintahkan untuk senantiasa mengikuti sunnah-Nya.⁶⁵

G. Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Demokrasi Dinegara Indonesia suatu Proses perjuangan menuju demokrasi dimulai pada gerakan kemerdekaan Indonesia walaupun Indonesia sempat berjatuhan kepada pengaruh praktik kolonialisme dan pemberontakan politik. Demokrasi di implementasikan di Indonesia melalui terciptanya Undang-Undang Dasar 1945 dan diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Benturan antara partai politik dan elite, korupsi, dan kesenjangan sosial masih menjadi tantangan bagi perkembangan Negara.²⁴

Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi suatu rangkaian yang sangat kuat dalam

⁶⁴ Wahyudiono dan Muna, "Historis Negara Demokrasi Pancasila."

⁶⁵ "Tampilan Pers Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Islam."

⁶⁶ Wahyudiono dan Muna, "Historis Negara Demokrasi Pancasila." ⁶⁷ Manan, *Menjaga kemerdekaan pers di pusaran hukum.*

tatanan pemerintahan di Indonesia. Berbicara demokrasi dan kebebasan pers merupakan suatu hal yang tak terpisahkan, keduanya saling keterkaitan, dimana suatu system yang besar akan mempengaruhi sub system yang berada di dalamnya. Sejarah pers Indonesia telah menunjukkan bagaimana keterkaitan antara sistem politik, sistem pers. Sistem pers yang otoriter cenderung melahirkan pers yang otoriter juga, demikian juga sistem politik yang demokratis akan melahirkan pers yang bebas. Sebuah demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya pers yang bebas dan kebebasan pers tidak akan tercapai tanpa sistem yang demokratis. Di Indonesia kebebasan pers memiliki landasan hukum yaitu UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, UU Penyiaran 2002 dan UU ITE²⁵.

Sistem pers di Indonesia tidak terlepas dari sistem komunikasi yang dipengaruhi oleh sistem politik yang diterapkan di Negara tersebut. Teori sistem pers yang dikemukakan Wilbur Schramm merupakan teori-teori yang diterapkan sistem pers diberbagai Negara di belahan dunia ini, teori pers diterapkan sesuai dengan sistem komunikasi yang dianut oleh Negara-negara tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya dikembangkan secara bersamaan. Adapun teori pers menurut Wilbur Schramm yaitu the authotarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory. Teori pers otoriterian merupakan sistem dimana pers menjadi alat kekuasaan bagi kepentingan Negara dan semua media massa berada di bawah kontrol pemerintah. Teori pers libertarian yakni sistem pers di mana media dikuasai oleh sekelompok orang yang memiliki modal yang besar.⁶⁶

Selama tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, kebebasan pers di Indonesia cukup tinggi. Pemerintah mengizinkan penerbitan berbagai macam surat kabar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pers ditujukan hanya untuk keperluan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kebebasan pers diberikan oleh pemerintah untuk menyebarkan kabar mengenai kemerdekaan Indonesia.

Kebebasan pers pada masa awal Orde Lama dikaitkan dengan kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat yang dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai bagian dari demokrasi. Dampak dari kebebasan Pers tersebut mulai dirasakan pemerintah pada massa orde lama hingga orde baru. Pemerintahpun mulai menunjukkan powernya dengan cara

68 Saptohadi, "Pasang surut kebebasan Pers di Indonesia." ²⁷ Saptohadi.

pembereindelan media bagi yang tidak sejalan dengan pemerintah. Pada awalnya, pemerintah orde baru menjanjikan kebebasan pers melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang prinsip-prinsip dasar-dasar Pers.²⁷

Seiring perjalanan waktu, kebebasan pers pada orde baru tidak lagi terwujud. Baru kemudian kebebasan pers itu kembali di rasakan sejak bergulirnya reformasi Tahun 1998 adanya itikad baik dari pemerintahan dalam kebebasan pers. Dampak dari kebebasan pers tersebut pertumbuhan pers semakin pesat hingga sekarang. Media cetak mulai ditinggalkan media digital menjadi terdepan menyuarakan. Kita menyebut revolusi digital karena karena perubahan era yang sangat cepat. Digitalisasi yang menumbuh kembangkan media-media baru berbasis internet (media siber) di akhir 90-an awalnya diharapkan bisa menjadi jalan terang dan katalis untuk meningkatkan kualitas jurnalisme yang semakin suram. Pertama karena medium internet membuka peluang lebar-lebar bagi masuknya pemain-pemain baru. Media konvensional yang sebelumnya sudah mapan dan berakar. Masuknya pemain baru diharapkan bisa lebih mendemokrasi industri media yang sebelumnya berpusat ditangan segelintir pemilik grup media. Kedua media online memungkinkan komunikasi interaktif dua arah.⁶⁷

Perkembangan menunjukkan kemunculan media online justru menambah kerumitan masalah antara lain mempeulerkan kiplat baru jurnalisme dengan menghambakan kecepatan.yang acap kali mengabaikan kelengkapan data dan mengorbankan akurasi. Sejarah Singkat Revolusi Digital dalam perkembangan teknologi dunia kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan dan mendorong pergeseran yang disebut sebagai transformasi digital.

Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Tetapi di sayangkan semakin berkembangnya teknologi justru semakin banyaknya kejahatan yang terdeteksi. Maka dari itu segala sesuatunya harus memiliki perlindungan hak cipta dan mengontrol anak-anak dan remaja khususnya. Begitu banyak game online yang menyebabkan kerusakan mental anak saat ini, pornografi dan pelanggaran hak cipta.⁶⁸ Dierah digitalisasi semuanya mudah. Mencari informasi apa saja tinggal membuka pencarian di google atau masin pencari lainnya di internet.

69 Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*.

70“View of Demokrasi Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan”

Memudahkan pekerjaan manusia dan terjadinya pengematan biaya.

H. Penutup

Negara adalah entitas politik yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam suatu wilayah tertentu. Negara bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintahan, penegakan hukum, dan pengaturan kehidupan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, negara harus berfungsi sebagai pengawas, pelindung, dan pemfasilitator hak-hak warga negara. Negara harus menjalankan kebijakan dan hukum yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan proses pemilihan yang adil. Peranan pers dalam Negara ini cukup besar bahkan pers dinilai mampu menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif. Begitu juga dalam pemerintahan peranan pers sangat besar baik dalam mewartakan kegiatan pemerintahan maupun menyampaikan kritik kebijakan pemerintah.

Peranan pers ini diapresiasi sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia. Pasca reformasi dan ditetapkannya undang-undang pers di tahun 1999 menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintahan dalam kebebasan pers. Dalam membentuk, memelihara, dan mengembangkan kebebasan, informasi kritis sangatlah penting. Kebebasan pers membantu membuat masyarakat lebih peduli dan terlibat dalam kehidupan politik, mengekspresikan kekhawatiran tentang perubahan sosial, dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Oleh karena, kebebasan dan kemerdekaan pers tersebut harus dijaga secara bersama-Perlindungan Hukum Terh

REFERENSI

- Badrin, Ubedilah. *Sistem Politik Indonesia*. Bumi Aksara, 2022.
- Cahyani, Adelia Masrifah. "Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melayani Dan Menggali Potensi Masyarakat Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (10 April 2020): 1–16.
<https://doi.org/10.15642/jik.2020.10.1.1-16>.
- Fuqoha, Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, dan Arga Eka Sanjaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2 Juli 2019): 75.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>. Hakiki, Paizon. "Sistem

- Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 19491959.” Journal:eArticle, Riau University, 2014. <https://www.neliti.com/publications/206618/>.
- Ichsan, Muhammad. “Demokrasi dan Syura: Persepektif Islam dan Barat.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (21 April 2014): 1–12. <https://doi.org/10.22373/substantia.v16i1.4913>.
- Jones, Tod. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke 20 Hingga Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Manan, Bagir. *Menjaga kemerdekaan pers di pusaran hukum*. Cet. 1. Jakarta: Dewan Pers, 2010.
- Nasution, Jl Kaharuddin. “Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia,” t.t.
- Rohmanurmeta, Fauzatul Ma’rufah. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Cv. Ae Media Grafika, 2022.
- Saptohadi, Satrio. “Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (1 Februari 2011): 127–38. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.85>.
- Suleman, Zulfikri. *Demokrasi untuk Indonesia: pemikiran politik Bung Hatta*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- “Tampilan Pers Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Islam.” Diakses 17 Oktober 2023. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/25/8>.
- Umar, Bukhari. *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis*. Amzah, 2022.
- “View of Demokrasi: Tinjauan terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan.” Diakses 1 November 2023. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48/47>.
- Wahyudiono, Tri, dan Faizah Rizky Muna. “Historis Negara Demokrasi Pancasila.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 02 (19 September 2023): 77–96.

Media dan Politik

Rafiqah Syahidah Ritonga
Email: rapiqasyahidah@gmail.com

Abstrak: Hubungan antara media dan politik sering kali dihadapkan pada berbagai masalah yang memengaruhi dinamika informasi, opini publik, dan proses politik itu sendiri. Media sering kali dikritik karena memiliki bias politik yang dapat memengaruhi cara penyajian berita dan opini yang disampaikan kepada masyarakat. Media kadang-kadang lebih cenderung mengutamakan aspek hiburan atau konten yang sensasional daripada memberikan liputan yang mendalam dan berimbang terhadap isu politik yang kompleks. Media, terutama media sosial, sering menjadi wadah penyebarluasan informasi palsu atau hoaks, yang dapat memengaruhi pemahaman masyarakat tentang isu politik dan memicu ketidakpastian informasi. Ada perdebatan mengenai etika dalam pemberitaan, terutama terkait dengan privasi, cara pengambilan gambar atau rekaman, dan bagaimana media melaporkan situasi tertentu. Pemahaman akan masalah-masalah ini penting untuk membantu meningkatkan literasi media masyarakat, mendorong transparansi dalam pemberitaan, dan mempromosikan sumber informasi yang dapat dipercaya serta berimbang untuk mendukung proses politik yang sehat. Media massa tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk opini publik dan proses politik. Dengan memahami kompleksitas hubungan antara media dan politik serta tantangan yang dihadapi, penting untuk terus memperjuangkan transparansi, integritas, dan pluralisme dalam informasi politik yang disampaikan kepada masyarakat. Ini menjadi landasan penting dalam mendukung proses politik yang sehat dan partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam kehidupan politik.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Media, Politik

A. Pendahuluan

Media informasi dan komunikasi terus berkembang dengan pesat. Sekarang ini siapapun dapat berkomunikasi kapanpun dan di manapun. Informasi berseliweran begitu cepatnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan bumi manapun dapat segera diketahui. Dalam hitungan detik informasi dan peristiwa yang terjadi dapat disaksikan oleh penduduk bumi. Dunia yang dikatakan luas dan lebar dilipat menjadi global village (desa global) yang terbuka untuk semua akibat kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Benar kata futurolog Alvin Toffler sebagaimana dikutip Marwah Daud Ibarahim (1994), bahwa manusia sekarang ini memasuki gelombang ketiga yang ditandai dengan era kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang mencengangkan dunia. Ini menandai berkembangnya generasi millenial zaman now yang akrab dengan media informasi. Mulai dari teknologi informasi berupa telephone, terus handphone, dan sekarang melompat ke smartphone (telepon pintar). Inilah era digital yang semua informasi dunia dapat diakses langsung dengan cara di-klik dengan jari di depan komputer. Sehingga sekarang ini mengakses internet untuk mencari dan mendapatkan informasi. menjadi kebutuhan utama. Tak ketinggalan penduduk Indonesia, ternyata merupakan pengguna akses internet yang tinggi dibandingkan dengan negaranegara lainnya di dunia. Berdasarkan laporan Tetra Pak Index 2017 yang belum lama diluncurkan, bahwa tercatat ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia, dan hampir setengahnya adalah pengguna media sosial, atau berkisar di angka 40%. Kemudian terdapat data lain yang diungkap oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam hasil surveinya, bahwa ada tiga (3) media sosial yang paling banyak dikunjungi. Menurut survei tersebut, Facebook berada di posisi pertama sebagai media sosial yang paling banyak menyedot pengguna internet Indonesia, dengan 71,6 juta pengguna (54 persen).

Kemudian di tempat kedua, media sosial untuk berbagi foto dan video pendek Instagram berhasil merebut hati para pengguna internet Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai 19,9 juta (15 persen). Media sosial berikutnya yang paling banyak dikunjungi pengguna internet. Politik adalah kajian tentang kekuasaan (power) atau seni memerintah. Dibahas dan didiskusikan berbagai pendapat tentang definisi politik, antara lain Harold D Laswell dalam bukunya “Who gets what, when, and how”, ilmu politik

adalah ilmu tentang kekuasaan. G.E.G Catlin mengatakan politik adalah “Kekuasaan dan pemegang kekuasaan”, dan Joyce Mitchell mengatakan “Pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya”, Di dalam Kamus Analisa Politik, Jack Plano dkk mendefinisikan politik sebagai “Seni memerintah”; “Penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan, dan persaingan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat dan “Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan , khususnya dalam negara; Seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara; Kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Dan Nimmo⁹ mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain, yaitu dari sisi jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Nimmo juga menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.

B. Media dan Politik

1. Defenisi Media

Van Dijk dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media social dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Meike dan Young dalam Nasrullah (2015) mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi diantara individu (to be share one-to-one) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Menurut Boyd dalam Nasrullah (2015) media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain.

Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa. Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Sosial media diawali dari tiga hal, yaitu Sharing, Collaborating dan Connecting (Puntoadi, 2011).

Media sosial mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat karena mempermudah penggunanya memperoleh serta memberikan informasi secara cepat. Berkat media sosial, Barack Obama memenangkan Pemilu di Amerika Serikat sebanyak dua kali (Suhendra, 2012). Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye juga dimplementasikan di Indonesia. Menjelang Pemilu, Partai Politik terlihat aktif membuat akun sosial media demi keperluan kampanye (Efriani, 2020). Akun sosial media tersebut memuat konten pengenalan dalam bentuk visi dan misi dengan harapan menarik simpati pemilih. Secara tidak langsung mengharapkan tingkat keaktifan partisipasi politik masyarakat (Priyono, 2014). Partisipasi politik dimaknai sebagai kegiatan perseorangan, organisasi atau grup yang berkontribusi dalam dunia perpolitikan. (Nur & Sukma, 2018). Meningkatnya partisipasi politik mencerminkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap politik mengalami peningkatan. Partisipasi Politik menurut Sitepu (Wardhani Nur, 2018) adalah Aktifitas yang dilakukan secara individu maupun kelompok secara tidak langsung mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Disisi lain dapat dipahami bahwa sebuah aktifitas.

Aktifitas tersebut bisa dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung, baik dengan memilih calon pemimpin atau mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara tidak langsung. Definisi Partisipasi politik oleh Verba dan Nie (Putri, 2017) yakni Sebuah kegiatan untuk mempengaruhi pemilihan pemimpin secara langsung oleh individu atau warga negara yang bertujuan untuk kebersamaan dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya partisipasi Politik menurut Gaventa dan Valderama (Sahid, 2015) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah Tindakan-tindakan politik seperti kampanye yang melibatkan oleh individu atau kelompok organisasi biasanya para partai politik dan negara dengan tujuan untuk meningkat partisipasi dalam kegiatan politik. Kemudian pendapat selanjutnya adalah Samuel P. Huntington dan Joam M. Nelson (Budiarjo, 2012) menyatakan bahwa partisipasi politik

adalah kegiatan yang dilakukan warga Negara sebagai individu untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah yang bisa bersifat perseorangan ataupun kelompok.

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah, Makna komunikasi politik disini sudah bukan hal yang baru bagi dunia politik ataupun disiplin ilmu komunikasi. Komunikasi politik disini menurut (Djuyandi, 2017) yaitu sebuah gabungan yang lebih dari dua disiplin ilmu akademik kedalam suatu aktivitas, terutama dalam ada hubungannya yang terkait dengan komunikasi dan politik. Tersedianya komunikasi politik paling sering terjadi di media sosial maupun di media cetak, untuk dari itu media sosial mempunyai peran penting dalam sistem politik dan suksesnya komunikasi politik sangat akan berpengaruh pada pemantapan politik.

Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan. Anwar arifin ada 4 tujuan dari komunikasi politik. Pertama, membangun dan membentuk citra dan opini publik; kedua, mendorong partisipasi politik; ketiga, memenangi pemilihan; keempat, mempengaruhi kebijakan negara atau publik. Keempat hal tersebut harus berjalan karena penting demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera (Arifin, 2015).

Salah satu tokoh politisi yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan komunikasi politik adalah Ganjar Pranowo. Pentingnya perkembangan teknologi dan media sosial saat ini menjadikan keuntungan untuk menyapa warga atau sebagai fasilitator sebuah aspirasi dari masyarakat. Ganjar Pranowo berpendapat bahwa pemilikan media sosial dilakukan agar pejabat bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Sehingga beliau meminta kepada seluruh pejabat maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Magelang, Jawa Tengah untuk memiliki akun media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, WhatApps, Instagram dan media sosial lainnya.

Demikian juga dengan masyarakat . Kini, komunikasi politik telah beralih ke media sosial. Karena media sosial memungkinkan mereka yang menggunakan untuk berinteraksi secara virtual dengan orang lain tanpa memandang jarak, ruang, dan waktu. Dengan kebebasan tersebut, seseorang dapat menembus batas-batas yang ada di dunia nyata. Hal ini memungkinkan hal yang tidak mungkin terjadi. Citra seorang politisi harus efektif dan tersalurkan agar efektif. Media sosial merupakan media yang populer

digunakan dan diikuti oleh banyak orang, serta berpotensi mengubah opini publik dengan berbagai cara. Ganjar Pranowo adalah tokoh politik yang sangat aktif di media sosial dan sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan rakyatnya.

2. Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi dalam politik merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah Partai politik dalam memenangkan pemilu. Kampanye politik adalah bentuk aplikasi komunikasi politik yang dilakukan seseorang, sekelompok orang atau organisasi politik untuk membentuk dan membina citra dan opini publik yang positif, agar terpilih dalam suatu pemilihan pemilu, pemilukada dan pilpres. Beberapa bentuk atau jenis seni dan bentuk aplikasi (penerapan) komunikasi politik yang sudah lama dikenal dan dilakukan oleh para politikus atau aktivis politik, antara lain retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, lobi politik, dan tindakan politik yang dapat dilakukan dalam kegiatan politik yang terorganisasi seperti: public relation post politic, pemasaran politik dan kampanye politik. Semua bentuk komunikasi politik itu berkaitan dengan pembentukan citra dan opini publik yang positif. Hal itu dapat berkaitan dengan upaya memenangkan pemilu agar dapat meraih kekuasaan dan kedudukan politik di lembaga legislatif atau eksekutif sehingga dapat membuat kebijakan politik yang sesuai dengan visi misi dan program politik para komunikator politik terutama para politikus dan partai politiknya. strategi dan komunikasi politik adalah suatu keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan.

Keputusan strategis yang tepat bagi komunikator politik adalah (1) Merawat ketokohan, (2) Memantapkan kelembagaan politik, (3) Menciptakan kebersamaan dan (4) Membangun konsensus. Hemofili dan empati adalah salah satu syarat untuk membangun dan merawat ketokohan bagi politikus, aktivis, dan profesional sebagai komunikator politik. Untuk menciptakan hemofili dan melakukan empati melalui persamaan kepentingan tersebut, komunikator politik harus terlebih dahulu mengenal, mengerti dan memahami daya tangkal serta daya serap khalayak, baik yang bersifat psikologis maupun yang bersifat sosiokultural. Hal itu memerlukan berbagai aktifitas seperti penjajakan dan survei atau pembuktian. Dengan cara memahami khalayak, menyusun pesan persuasi, menetapkan metode, dan memilih milih media.

Salah satu bentuk kegiatan politik yang diketahui banyak masyarakat luas adalah kampanye politik. Dalam hal ini kampanye sendiri sudah terbagi dalam beberapa kategori seperti kampanye legislatif, kampanye capres dan juga kampanye dalam pemilu kepala daerah dan lain sebagainya. Sebelum berkembangnya teknologi komunikasi masih sangat banyak dijumpai bagaimana cara kampanye dengan memasang umbulumbul besar, spanduk-spanduk diseluruh badan jalan, berbagai poster juga baliho memenuhi seluruh sudut kota yang sebenarnya cukup begitu banyak memiliki dampak baik positif dan negative di dalamnya. Sekarang, seiring berjalannya waktu, dan perkembangan teknologi komunikasi yang juga begitu pesat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang munculnya media-media baru menjadikan terjadinya pergeseran dalam kampanye tersebut. Banyak yang menggunakan media baru dalam kampanye untuk menarik massa sebanyak-banyaknya dan untuk memilih.

Dari perspektif lembaga politik, penting untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi politik menggunakan media sosial, terutama selama kampanye pemilihan. Karena media sosial dapat menjadi channel untuk merepresentasikan informasi yang ideal, mengukur opini publik, serta mendapatkan dukungan dari publik kepada kandidat politiknya (Zeng, Chen, Lusch, & Li, 2010). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa politisi di era demokrasi yang modern ini dengan semangat mengadopsi media sosial untuk melibatkan publik, berdialog dengan warganya sehingga memunculkan diskusi politik yang ‘hidup’ (Hong & Nadler, 2011).

Selain itu, dengan adanya media sosial memungkinkan masyarakat untuk mendapat informasi dan pengaruh pilihan politik, dari mulai sikap, kepercayaan, dan perilaku mereka terhadap kandidat politik tertentu (Victor, Ikechukwu, Gerald, & Chinedum, 2017). pengaruh pemanfaatan media sosial Facebook terhadap elektabilitas, efektivitas, dan popularitas calon legislatif anggota DPR RI pada Pemilu legislatif 2019 dengan nilai Sig masing-masing variabel $< 0,05$. Pemanfaatan media sosial membuat calon kandidat dapat melakukan komunikasi untuk mempromosikan program serta prestasi yang ia miliki, selanjutnya publik dapat dengan mudah mengumpulkan informasi, opini, dan menganggap kandidat layak untuk dipilih pada pemilihan nanti, sehingga elektabilitas kandidat dapat naik.

Penggunaan media sosial Facebook juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kampanye politik, dimana fitur-fitur pada Facebook memperluas ruang

publik untuk menjadi media promosi yang melibatkan publik lewat agenda politiknya yang dibagikan di media sosial ini. Popularitas calon anggota legislatif juga dapat terdongkrak dengan adanya pemanfaatan media sosial Facebook, dimana kandidat dapat mengunggah pesan politik sehingga mendapatkan dan mempertahankan pendukung yang membuat popularitas mereka semakin tinggi. Jika pesan yang disampaikan kandidat di Facebook dianggap menarik, maka pendukung dapat dengan mudah membagikan kepada temannya sehingga menambah popularitas dari kandidat politik ke publik.

Saat ini kampanye terbuka memang dinilai sudah tidak efektif lagi karena sangat menyedot anggaran sangat besar. Kehadiran massa yang begitu besar dalam sebuah kampanye terbuka bukan menjadi indikator kemenangan dalam pemilu (pemilihan umum) karena dibalik keramaian massa disesaki beragam atribut dan terselip makna yang berarti. Segencar atau seproduktif apapun sebuah partai politik melakukan kampanye di media sosial jika partai politik tersebut gagal menyampaikan ideologi atau pesan ke audiens atau massa maka kampanye tersebut menjadi hal yang percuma atau sia-sia. Oleh sebab itu, melalui media sosial partai politik dapat menyuarakan gagasan atau visi dan misi partai politik secara lebih komprehensif dan luas.

Hal ini telah terbukti setelah kemenangan yang diraih oleh Barrack Obama, Jarvis (2010) melalui tulisannya mengungkapkan bahwa pada pemilihan presiden Amerika Serikat periode 2008, Obama menggunakan internet dengan berbagai jejaring sosial, seperti twitter, myspace, youtube facebook dan e-mail. Bahkan, situs kampanye yang dimiliki Obama mampu mengorganisasi lebih dari 150.000 kegiatan, menciptakan lebih dari 35.000 kelompok, memiliki lebih dari 1,5 juta akun dan mendapatkan lebih dari USD 600 juta dari 3 juta masyarakat yang medonasikan dananya untuk memenangkan Obama. Untuk memahami lebih jauh bagaimana teknologi komunikasi mampu mempengaruhi proses interaksi, maka kita jangan melihat pada sudut pandang negative. Akan tetapi kita justru harus melihat bagaimana teknologi komunikasi dan informasi mampu dijadikan sebagai sebuah dunia baru yang menjadi bagian dari kebutuhan primer setiap individu masyarakat global. Menjelang pilpres, terjadi mobilisasi dalam berbagai bentuk, salah satu saluran yang paling banyak digunakan adalah melalui media. Melalui media massa dapat menjangkau audiens dimanapun

melalui berita atau iklan, namun yang paling sering digunakan audiens ialah media sosial, facebook, Instagram, menjadi saluran informasi dunia politik.

Menurut Firmanzah (2008) citra atau image dibutuhkan untuk membedakan satu partai politik dengan partai politik lain, sebagai strategi positioning. Ia merupakan konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat akan suatu partai politik atau individu mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik. Menurut Firmanzah, walaupun citra politik tidak real, tetapi ia dapat diciptakan, dibangun, dan diperkuat. Citra politik memiliki kekuatan untuk memotivasi aktor atau individu agar melakukan suatu hal. Ia dapat memengaruhi opini publik sekaligus menyebarkan makna-makna tertentu. Citra politik yang bagus akan memberikan efek yang positif terhadap pemilih guna memberikan suaranya dalam pemilihan kelak. Bandwagon, teknik ini digunakan dalam rangka mempengaruhi masa untuk mengikuti apa yang digagas oleh pemberi propaganda dengan cara meyakinkan masa bahwa banyak orang lain di dalam komunitas kelompok masa tersebut telah mengikuti gagasannya.

3. Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik

Penggunaan media sosial saat ini tidak terbatas pada percakapan sehari-hari, tetapi telah diperluas ke komunikasi politik. Sifat interaktif dan fleksibel dari mediasosial telah membuatnya sekarang banyak digunakan oleh baik anggota masyarakat, politisi, dan partai politik dalam komunikasi politik. Media sosial kini telah menjadi sarana utama untuk kampanye dan komunikasi politik. Namun, politisi harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk komunikasi politik karena penggunaan komunikasi menengah ini menghadirkan beberapa kelebihan dan kekurangan, terutama bagi penonton. Menggabungkan media tradisional dan sosial untuk komunikasi mungkin menjadi solusi terbaik untuk menjaga keterlibatan dan komunikasi dengan audiens.

Dalam menjalankan peran sebagai mediator dalam dialog politik, media massa memiliki tujuan utama untuk mencapai pemahaman bersama, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pembentukan opini publik yang informasional. Media massa menyediakan platform dan saluran komunikasi yang luas untuk pertukaran gagasan, pandangan, dan informasi politik. Melalui pemberitaan yang seimbang, analisis mendalam, dan penyajian perspektif yang beragam, media

massa membantu memoderasi dialog politik dengan memberikan informasi yang berkualitas dan relevan. Namun, peran media massa dalam memoderasi dialog politik juga dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Pertama, adanya bias politik atau kepentingan komersial dapat memengaruhi independensi dan obyektivitas media massa dalam menyajikan informasipolitik. Bias ini dapat muncul dalam pemilihan berita, penonjolan sudut pandang tertentu, atau pengabaian terhadap perspektif yang berbeda. Kedua, polarisasi politik yang semakin meningkat di masyarakat dapat mempengaruhi peran media massa dalam memoderasi dialog politik. Media massa bisa terjebak dalam polarisasi ini dan cenderungmemperkuat kesenjangan yang ada, bukan memfasilitasi dialog dan pemahaman bersama.Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh media massa adalah penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik pada media.

Dalam eradigital, berita palsu dapat dengan mudah disebarluaskan secara massal, membingungkan masyarakat, dan mengaburkan fakta. Hal ini mempengaruhi kehandalan media massa sebagai sumber informasi yang terpercaya dan dapat memengaruhi kualitas dialog politik. Media sosial juga menjadi wadah untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat lebih mengenal mereka, meskipun ada yang belum terpilih pada periode ini, namun dengan adanya hubungan yang baik dengan masyarakat, menjadi modal kuat bagi seseorang untuk mencalonkan diri pada periode berikutnya, hal tersebut sesuai dengan penuturan informan calon anggota dewan yang tidak terpilih.

Dalam Philip L, K (2009: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu: Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity) Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama –seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

4. Pengaruh Berita Hoax Terhadap Politik Pada Media Sosial

Hoax merupakan berita palsu yang belum tentu faktanya biasanya berisi tentang ujaran kebencian, memprovokasi, melibatkan tentang SARA atau apapun yang bisa menyebabkan konflik antar sesama masyarakat Indonesia. Pengaruh berita hoax terhadap bangsa Indonesia sangatlah berbahaya karena dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Karena masyarakat Indonesia masih terbiasa percaya terhadap berita yang belum jelas sumbernya berasal, masyarakat seringkali terbawa berita hoax juga karena tidak membaca keseluruhan isi di dalam berita, hal ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena masyarakat jadi mudah terprovokasi setelah melihat berita yang belum jelas sumbernya yang mengakibatkan kesalah pahaman antar pihak.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang salah satunya yaitu Mastel, menyatakan bahwasannya media yang paling banyak digunakan untuk menjadi penyebaran hoax adalah situs web sebesar 34,90%, aplikasi chatting(whatsapp, line, telegram) sebanyak 62,80%, dan melalui media sosial (facebook, twitter, Instagram, dll) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sedangkan data yang dicatat oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax (Juditha, Cristtiany, 2019). Fenomena hoaxkini menjadi keresahan bagi khalayak, serta menimbulkan beragam masalah. Pada saat Pemilihan Umum Presiden atau Pemilihan Kepada Daerah berlangsung, hoax semakin beredar di mana-mana dan semakin banyak beredar. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Pilkada Jakarta 2017. Saat itu, hoax atau berita bohong banyak tersebar di masyarakat. Dewan Pers Indonesia menilai hoax telah memasuki tahap serius. Apabila hoax memiliki rentang uang sangat lebar, mulai dari yang satir untuk menyindir hingga yang dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi. Pada awalnya masyarakat mencari informasi melalui media mainstream. Tapi pada saat ini hoax justru masuk ke dimensi lain di media sosial dan diadopsi begitu saja di media mainstream tanpa klarifikasi (Jemadu, 2020). Pengertian media sosial sendiri menurut beberapa ahli yakni, definisi sosial dalam media sosial adalah individu yang ada dalam komunitas tidak hanya ada pada sebuah lingkungan, melainkan

harus berkolaborasi dengan lingkungan lain sehingga tercipta suatu kerja sama karena kerja sama merupakan karakter dari sosial (Rulli, Nasrullah, 2017). Dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan para penggunanya untuk merepresentasikan dirinya, sehingga dirinya dapat berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan juga membentuk ikatan sosial secara virtual (Rulli, Nasrullah, 2017). Lebih luas lagi, media sosial merupakan salah satu wadah yang sangat rentan dan sangatlah sering digunakan sebagai media penyebaran berita hoax. Banyaknya pengguna aktif bahkan dapat dikatakan sebagai penggila media sosial di Indonesia ini memberikan kemudahan bagi para penyebar hoax dalam menjalankan aksinya.

Selain itu pengawasan di media sosial juga tidak terlalu ketat yang mengakibatkan para oknum penyebar hoaxbebas dalam menyebarkan arksinya, sehingga berita apapun yang dibagikan dapat tersebar dengan mudahnya. Dengan hadirnya media sosial ini juga memberikan dampak yang positif dan juga negatif (Marwan, Rayii, 2019). Dengan hadirnya media sosial banyak memberikan dampak positif bagi sang pengguna, dan tidak sedikit pula dampak negatifnya. Di Indonesia sendirikehadiran media sosial juga memberikan pengaruh politik, sosial, budaya dan juga ekonomi dimedia sosial menggeser serta menembus batas-batas dari pola relasi interaksi hirarki menjadi egaliter, baik di ruang politik maupun budaya. Informasi yang kurang bahkan tidak bermutu bertebaran secara masif tanpa verifikasi dan konfirmasi. Hoax, fitnah serta hujatan bersahut-sahutan nyaris tanpa henti(Marwan, Rayii, 2019) Contoh hoax dengan konten isu sosial-politik di media sosial adalah yang banyak terjadi menjelang pemilihan presiden tahun 2019 lalu, misalnya kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet. Kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet pertama kali beredar di Facebook, melalui unggahan postingan akun Swary Utami Dewi. Unggahan tersebut disertai tangkapan layar dari aplikasi pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 disertai foto wajah Ratna Sarumpaet yang lebam. Kabar tersebut kemudian menyebar lewat Twitter melalui akun para tokoh, seperti Rachel Maryam, Fadli Zon, dan lainnya.

Pada pemilu presiden 2019 lalu, ada banyak berita hoaks yang tersebar mengenai calon pemimpin, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno. Isi berita hoaksnya berkaitan dengan agama dan juga budaya. Adanya berita

tersebut juga menimbulkan konflik antar para tim sukses. Adanya berita hoaks yang menimbulkan konflik tersebut juga akan berdampak pada pemikiran pemilih pemula. Mereka bisa saja menjadi tidak tertarik untuk memilih dalam pemilu karena tidak percaya pada kedua pasangan calon, akibat tim sukses yang berkonflik satu sama lain. Karena hal tersebut, kami tertarik untuk membahas mengenai permasalahan hoaks saat pemilu yang berpengaruh pada partisipasi pemilih pemula. Terkadang banyak buzzer yang tidak bertanggung jawab membuat akun media sosial khusus dengan identitas anonim. Buzzer anonim kemudian menyebarkan berita bohong (hoax) yang biasanya disertai dengan ujaran kebencian dan isuisu sensitif yang ditujukan kepada lawan atau pesaing kandidat yang didukungnya. Buzzer melakukan hal tersebut untuk menurunkan citra kompetitor dan memicu masyarakat untuk tidak mempercayai (distrust) lawan politiknya. Salah satu contoh kasus terkait berita bohong atau hoaks yang dilakukan para buzzer adalah isu yang berkembang pada Pemilu 2014 dan 2019. Isu ini relatif tidak banyak berubah dibanding pemilu sebelumnya yang menyangkut politik identitas.

5. Penyampaian pendapat politik di era milenial

Milenial atau generasi Y merupakan sebuah istilah yang dikembangkan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Penggolongan generasi ini digolongkan bagi kelompok masyarakat yang lahir pada medio akhir 1980 hingga awal 2000. Media sosial menjadi instrument baru dalam menyampaikan pendapat. Jika sebelumnya cara mengemukakan pendapat dalam sebuah sistem demokrasi dapat dilakukan dengan cara keterwakilan di parlemen (Anggota DPR), berdemonstrasi, atau melalui Media Massa yang mewakili kepentingan publik. Namun bagi generasi milenial, Media sosial menjadi pilihan yang paling mudah dan cepat dalam mengemukakan suatu pendapat di ranah publik. Hal ini tidak lepas dari hilangnya citra keterwakilan rakyat yang direpresentasikan oleh DPR, hingga citra media massa yang cenderung sarat kepentingan dan tidak mampu memberikan gambaran utuh tentang aspirasi publik. Sementara melalui media sosial, setiap konten yang disampaikan pengguna bersifat utuh sesuai dengan kehendak penggunanya. Setiap pengguna media sosial tidak lagi khawatir jika pendapatnya kemudian disunting atau diubah sesuai kepentingan tertentu.

Media sosial sangat berperan penting sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan efek positif dalam peningkatan partisipasi politik di kalangan

generasi milenial sebagai pemilih pemula. Namun partisipasi politik tidak semata-mata diukur berdasarkan pemberian suara pada saat pemilu. Pada dasarnya ada banyak bentuk partisipasi politik seperti: mengirim surat (pesan) kepada pejabat pemerintahan, ikut serta dalam aksi protes atau demonstrasi, menjadi anggota partai politik, menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, mencalonkan diri untuk jabatan publik, memberikan sumbangan kepada partai atau politisi, hingga ikut serta dalam acara penggalangan dana (Kompas.com, 2018). Dengan demikian meskipun hanya pemula, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan Indonesia ke masa depan. Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik menjadi salah satu indikator politik di Indonesia yang secara tidak langsung memiliki peran strategis dalam membentuk partisipasi politik. Berbagai macam informasi politik dapat diperoleh melalui media massa dan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dalam menentukan partisipasi politiknya.

C. Penutup

Penggunaan sosial media oleh karena itu perlu adanya penataan kembali personil di internal partai agar dikemudian hari team yang dibentuk lebih paham mengenai strategi komunikasi. Media, baik itu media massa maupun sosial media merupakan bagian besar daripada komunikasi politik. Karena media dapat mempengaruhi pemikiran-pemikiran khalayak terhadap apa yang dapat ia sampaikan. Meskipun media memang benar-benar dapat mempengaruhi pemikiran khalayak, namun ada sebuah teori yang mengatakan bahwa khalayak itu bersifat pasif atau hanya mengikuti apa yang sudah ada. Namun akhirnya teori tersebut dipatahkan dengan teori-teori yang lain yang dihasilkan melalui penelitian terhadap tindakan masyarakat. Oleh karena itu teori dalam komunikasi politik mengalami perkembangan sesuai dengan penelitian dan penemuan para ahli terhadap tingkah laku khalayak.

Televisi dan media online menjadi sumber yang paling tinggi yang digunakan untuk mencari informasi politik. Jenis konten yang sering dibuka oleh para responden adalah tautan berita online, dan konten berita yang sering dibuka adalah penolakan masyarakat terhadap kandidat. Temuan lainnya yaitu tingkat partisipasi politik offline yang paling sering dilakukan para responden adalah berdiskusi mengenai isu Pilkada bersama teman, rekan kerja/ keluarga, sementara partisipasi politik online yang paling

tinggi dilakukan oleh para responden adalah memperhatikan diskusi (silent reader) mengenai isu Pilkada di sosial media/ aplikasi chatting

REFERENSI

- Andriyendi O.D, S.Nurman , Dewi F.S. (2023) *Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada*, Journal of Education, Cultural and Politics Volume 3 No 1
- Alfiyani Nur, (2018) *Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik*, POTRET PEMIKIRAN – Volume 22, No. 2
- Deni, Deni A dkk. *Demokrasi dan Komunikasi Politik*. CV. Eureka Media Aksara. (researchgate.net)
- Farid S.A, (2023) *Peran Media Massa Dalam Memoderasi Dialog Politik*, Al-Adalah, Volume 1, NO. 3
- Febriansyah, Muksin N.N, Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa, Sebatik.
- Haris Aidil, (2022) *Strategi Komunikasi Politik Interaktif Di Era Virtualitas*, Jurnal Publik Reform Vol: 9 No.1
- Hayat A.M, Jayadiningrat S, dkk. “Peran Media Sosial dalam Komunikasi Politik.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Lestari J.F, Pebrianti S, dkk. “Strategi Kampanye Ridwan Kamil Dalam Media Instagram.” *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, 2018.
- Meifilina A. “Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Melakukan Pendidikan Politik,” *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Nurhidayat I, Garis R.R. (2023) *Trend Komunikasi Politik Di Media Sosial*, Jurnal Lanskap Politik Volume 1, Nomor 2
- Prasetya E.A, Kazia B, dkk. Pengaruh Berita Hoaks Terhadap Cara Pandang Pemilih Pemula: Pemilihan Umum Presiden, 2019.
Pengaruh_Berita_Hoaks_Terhadap_Cara_Pandang_Pemilih_Pemula_Pemilihan_Umu m_Presiden_Tahun_2019-libre.pdf (d1wqxts1xzle7.cloudfront.net)
- Indonesia, POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam Vol. 2 No.1 Tahun

- Rustandi Dudi, Pencitraan Politik Daring: Strategi Memenangkan Massa Digital Menjelang Pemilu 2014, Vol. 11, Nomor 2, 2013.
- Rusmarina N, Mufarikhin, dkk. (2019) Strategi Mobilisasi Politik Pada Pemilu Susanto Irwansyah. “Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial di Era Pasca Reformasi,” *Jurnal Lontar*, Volume 9 Nomor 1, 2021.
- Setiadi Ahmad , *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*,
- Suratno, Irwansyah, dkk (2020). *Pemanfaatan Media Sosial Facebook Sebagai Strategi Komunikasi Politik*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 6, Nomor 1
- Supit M, Lapian M ,dkk (2022). Peran Media Sosial dalam meningkatkan elektabilitas Calon anggota Legislatif dalam Pemilihan umum Tahun 2019, Eksekutif Volume2 No. 1
- Sulistyo, Najicha U.F, “Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 1, 2022.
- Zakirah, Pengaruh Hoax di Media Sosial Terhadap Preferensi Sosial Politik Remajadi Surabaya, hlm. 4,
- Utami F, “Media Sosial dan Partisipasi Politik Milenial Riau,” *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Vol.3, No. 1, 2020.

Pendapat Umum (Opini Publik) dan Polling

Elfyda Rahmadani

Email: fydasimbolon@gmail.com

Abstrak: Opini publik sangat terpengaruh oleh banyak variabel diantaranya adalah media dan perspektif masyarakat. Wujud paling nyata dari ekspresi pendapat umum yang sifatnya privat dan terstruktur adalah polling. Dalam polling, pendapat umum menjadi sangat pribadi, anonim dan hanya diketahui oleh diri mereka sendiri. Meskipun mungkin dapat diketahui pendapat mereka yang diwawancara, ketika hasil polling dipublikasikan. Polling adalah hasil agregat (kumpulan) yang sama. Pembahasan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam mengambarkan sebuah pendapat umum dan polling di dalam sebuah negara dengan sistem demokrasinya. Pembahasan ini menjabarkan bagaimana pengertian pendapat umum, manfaat pendapat umum dan polling, tujuan pendapat umum dan polling, pendapat umum dalam mengambil keputusan, proses pembentukan pendapat umum, pendapat umum dalam kebijakan publik. Temuan dalam artikel ini adalah Pendapat umum, atau opini umum, merujuk pada pandangan atau keyakinan yang diterima atau dipegang oleh sebagian besar orang dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Ini mencerminkan suatu konsensus atau pola pikir yang dominan di antara individu-individu dalam komunitas tertentu pada waktu tertentu. Pendapat umum bisa terkait dengan berbagai hal, termasuk nilai-nilai moral, kebijakan politik, isu-isu sosial, atau bahkan tren budaya. Terkadang, pendapat umum tercermin dalam hasil polling atau survei di mana orang-orang diwawancara atau memilih untuk menyatakan pandangan mereka terhadap suatu topik tertentu. Polling adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur opini, preferensi, atau pandangan masyarakat terhadap suatu isu atau topik tertentu. Proses ini biasanya melibatkan pengumpulan tanggapan dari sejumlah orang yang diwakili sebagai sampel yang mewakili populasi yang lebih besar. Hasilnya kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang mungkin menjadi pendapat umum.

Kata Kunci: Komunikasi politik, Pendapat Umum dan Polling

A. Pendahuluan

Era digital telah memperkenalkan bentuk komunikasi baru yang lebih cepat, praktis, dan tersebar luas. Dalam konteks yang lebih luas, konten politik dalam komunikasi publik sehari-hari sudah menjadi hal yang lumrah. Proses ini disebut komunikasi politik, dan kini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, pendirian, agama, ras, latar belakang, dan perbedaan lainnya.^{69⁷⁰} Dalam konteks ini, proses komunikasi politik dapat dipahami sebagai upaya yang disengaja untuk mempengaruhi lingkungan politik dengan cara mengubah atau mempertahankan sesuatu. Oleh karena itu, banyak kegiatan komunikasi politik yang berkaitan dengan upaya membujuk khalayak. Persuasi dilakukan melalui berbagai media yang ada, dan akhirnya opini publik terbentuk.⁷¹

Pendapat umum atau yang lebih kita kenal dengan opini publik merupakan pilar yang penting di suatu Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Opini publik terlihat menjadi sebuah pengimplementasian dasar demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan opini publik, maka pemerintah akan seyogyanya akan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan suara rakyat yang salah satunya berasal dari opini publik.⁷²

Opini publik dilukiskan sebagai proses yang menggabungkan pikiran, perasaan dan usul yang diungkapkan oleh warga Negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas dicapainya ketertiban social dalam situasi yang mengandung konflik pertahanan dan perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya.⁷³

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dimana

69 Wiguna, Media Sosial dan Komunikasi Politik Era Digital, jurnal Komunikasi Indonesia Vo.3, No.2,

70 , <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1176&context=jkmi>

71 Faris Budiman Annas, Opini Publik Dalam Polarisasi Politik Di Media Sosial Public Opinion Of Political Polarizationon Social Media, JURNAL PIKOM(Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkp/article/view/2006/pdf>.

72 Nadilla Ryana Ananda, Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat Dari Transisi Politik Hukum Di Indonesia, Jurnal Sharia dan Humanities, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/94/77>.

73 Eko Harry Susanto, DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM, Jurnal

Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember 2013 hlm 163-172, <https://media.neliti.com/media/publications/102943-ID-dinamika-komunikasi-politik-dalam-pemili.pdf>

semua orang bebas berpendapat dan beropini. Kemudian pendapat itu jadilah opini publik. Istilah Opini Publik berasal dari terjemahan bahasa Inggris Publik Opinion Sesuai dengan kata asalnya opini dan publik.⁷⁴ Opini adalah pendapat dari seseorang mengenai sesuatu hal tertentu. Hal atau pokok permasalahan dalam pengertian tersebut itu bisa konkrit dan bisa juga abstrak, bergantung kepada tertariknya seseorang.⁷⁵ Misalnya pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan. Karena aktual atau hangat persoalan atau hal yang dibicarakan itu bisa bermacam-macam bidang, seperti sosial, hukum, politik, ekonomi atau apa saja yang menarik perhatian orang saat itu. Sekalipun apa yang hari ini dibicarakan publik, besok atau luasnya mungkin tidak menarik lagi. Apalagi setelah satu atau dua minggu kemudian. Persoalan atau masalah yang dibicarakan orang bisa beralih dari satu masalah ke masalah lain yang lebih aktual lagi.

Berbicara mengenai opini publik, tentu saja tidak terlepas adanya relevansi dengan sistem demokrasi pada suatu negara. Unsur esensial pemerintahan demokrasi itu sendiri adalah mengenai kepekaan terhadap opini publik. Pemerintah sebaiknya tanggap terhadap apa yang telah di aspirasi publik, baik yang pro maupun kontra terhadap pemerintah. Walaupun ada pihak-pihak yang kontra, pemerintah sebaiknya juga memberikan appreciate terhadap mereka. Untuk mempraktekkan unsur kepekaan, pemerintah dapat lebih kritis lagi, yaitu dengan mencari tahu alasan/latar belakang mengapa masyarakat lebih memilih untuk kontrak dengan pemerintah. Hal tersebut justru dapat membantu pemerintah untuk melihat segala sesuatu permasalahan dari berbagai sudut pandang, tidak sekedar demi kepentingan golongan/kaum mayoritas saja.

B. Menurut Para Ahli

Hafied Cangara mendefinisikan pendapat umum dengan defensi sebagai gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat memengaruhi orang lain, serta memungkinkan seseorang memengaruhi pendapat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat umum hanya bisa terbentuk kalau menjadi pembicaraan umum, atau jika banyak orang penting (elite) mengemukakan pendapat mereka tentang

⁷⁴ Pangi Syarwi, Diskursus Teori dan Praktik Model Demokrasi Konsensus Di Indonesia, Jurnal Communitarian Vol.3 ,No.2, 24 Februari 2022, file:///C:/Users/u/Downloads/174-394-1-PB.pdf

⁷⁵ Raden Mas Jerry Indrawan, Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat, Jurnal WACANA, Volume 16 No. 2, Desember 2017, hlm. 171 – 179, file:///C:/Users/u/Downloads/14-562-2-PB%20(8).pdf

isu sehingga bisa menimbulkan pro kontra di kalangan anggota masyarakat.⁷⁶ Sedangkan Opini menurut Cutlip dan center dalam bukunya Oli dan Erlita adalah pernyataan tentang sikap mengenai masalah tertentu yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat berbeda-beda. Opini adalah serapan dari bahasa asing (opinion) yang merupakan tanggapan atau jawaban terbuka terhadap suatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata (intangible), baik dalam bentuk opini tertulis maupun lisan. Bisa juga sebagai perilaku, sikap tindak, pandangan dan tanggapan dan lain sebagainya.⁷⁸

Dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi yang terjadi, hal yang menjadi opini publik menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Opini publik juga dinilai memberikan gambaran mengenai kondisi sosial yang sedang berkembang di tengah masyarakat. *Public opinion, it is maintained, is something more than individuals opinions. Obviously, the final expression of a public opinion is more than the individual opinion with which the process starts. There has been interaction.*⁷⁷

Dari penjelasan beberapa defenisi diatas jelas bahwsanya pendapat umum adalah sebuah pemikiran seseorang yang dapat diambil dari sebuah interaksi oleh beberapa individu dalam melihat suatu masyarakat. Dan pendapat juga merupakan sebuah pandangan tentang sesuatu yang dianggap itu penting.

C. Manfaat Mempelajari Pendapat Umum

Sistem politik di Indonesia mengalami perkembangannya yang cukup drastis sejak tahun 1998. Hal ini memicu berkembangnya sistem demokrasi, yang berwujud dalam bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat bagi setiap masyarakat.⁷⁸ Faktor ini pula yang membuat “Pendapat Umum” (*Public Opinion*) menjadi semakin penting, mengingat syarat mutlak tumbuh dan berkembangnya “Pendapat Umum” adalah kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Melalui Pendapat umum pemerintah dapat mengetahui pendapat masyarakat tentang satu hal, baik masalah politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Opini publik sangat terpengaruh oleh banyak variabel diantaranya

76 Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, teori, dan Strategi*, Edisi Revisi, cet ke 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 127.

77 William Albig, *Modern Public Opinion*, (New York : McGraw – Hill Book Company and Inc, 1956), hlm. 6.

78 Sahya Anggara, *Sistem Politik di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 22.

adalah media dan perspektif masyarakat. Wujud paling nyata dari ekspresi pendapat umum yang sifatnya privat dan terstruktur adalah polling. Dalam polling, pendapat umum menjadi sangat pribadi, anonim dan hanya diketahui oleh diri mereka sendiri. Meskipun mungkin dapat diketahui pendapat mereka yang diwawancara, ketika hasil polling dipublikasikan. Polling adalah hasil agregat (kumpulan) yang sama.⁷⁹

Begitu pentingnya pendapat umum atau opini publik dalam mendapatkan dukungan dari publik terutama sasaran pada semua level baik di tingkat lokal nasional maupun internasional, minat untuk mempelajari pendapat umum makin banyak. Hal ini disebabkan karena:

1. Ada rasa ingin tahu tentang orang lain, karena mereka jadi sasaran suatu usaha sehingga perlu diketahui pendapat, saran, dan keinginan mereka untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
2. Keinginan untuk memahami sistem politik, apakah negara itu memiliki kebebasan menyatakan pendapat atau tidak karena sebuah negara yang menganut sistem demokrasi akan memberi keleluasaan bagi setiap orang untuk menyatakan keinginan dan pendapatnya.
3. Untuk mendapatkan dukungan public dalam bentuk pemberian suara dalam pemilu;
4. Untuk memberi masukan terhadap pembuatan kebijakan publik.⁸⁰

D. Pendapat Umum dalam Mengambil Keputusan

Pengambilan keputusan (decisions Making, Besluitneming) merupakan suatu proses dan berlangsung dalam suatu sistem, walaupun merupakan suatu keputusan atau desisi pribadi sekalipun yang menyangkut suatu masalah pribadi pula. Hal tersebut perlu kita sadari agar supaya kita dapat berhasil di dalam daya upaya mengembangkan kemampuan kita untuk mengambil desisi mengenai problema-problema yang menghendaki suatu keputusan dari kita.⁸¹ Faktor-Faktor yang terkait dengan Pengambilan Keputusan untuk menentukan pilihan dari berbagai teori pengambilan

79 Dyah Tantri Efrina Putri, Pengaruh Hasil Polling Terhadap Pembentukan Opini Pemilih Pemula, Bunga

Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, September 2020, file:///C:/Users/u/Downloads/234-Article%20Text1030-2-10-20201026.pdf

80 Ahmad Faisol dkk, *Media, Pemilu, Dan Politik*, (Jakarta: Kecenderungan Media Dalam Pemilu, Institusi Studi Arus Informasi, 2009. hlm. 10.

81 S. Prajudi Atmosudirjo, *Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan: Decisions Making*, cetakan ke 3 , (Jakarta : 1974) hlm . 30-35.

keputusan baik itu rasional, inkremental atau pengamatan terpadu dengan beberapa alternatif pilihan yang tersedia. Tapi keputusan memiliki ketentuannya masing-masing seperti nilai, norma ataupun pedoman dalam mengambil suatu keputusan.⁸²

Menurut George R. Terry, dalam blog Komunitas Diamond faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan sebagai berikut: Pertama, Semua hal yang terlihat maupun tidak terlihat seperti emosional ataupun rasional harus diperhatikan dalam menentukan keputusan. Kedua, Setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi, perhatikan kepentingan orang lain. Ketiga, Jarang sekali ada 1 pilihan yang memuaskan. Keempat, Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Kelima, Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama, Keenam, Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. Ketujuh, Apapun keputusannya haruslah dikembangkan terlebih dahulu agar kita dapat menentukan benarkah keputusan yang akan diambil. Kedelapan, Setiap keputusan itu merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan berikutnya.⁸³

E. Pendapat Umum dalam Kebijakan Publik

Secara struktur, pendapat biasanya lebih banyak dinyatakan dalam media massa (pers, tv, radio) baik melalui wawancara (talking news) dengan wartawan maupun ketersediaan tempat dalam media (public sphere) untuk memuat suara pembaca, artikel, tulisan kolom, SMS, dan sebagainya. Para pengambilan kebijakan (public makers) sangat memperhatikan pendapat (opinion) dukungan dari pembaca. Selain itu, opini juga dapat disalurkan melalui organisasiorganisasi masyarakat yang berkepentingan, misalnya LSM yang kadang turun ke jalan untuk memengaruhi orang lain, atau mendatangi DPR dan eksekutif dengan jalan mendesak untuk diambil tindakan dan aksi.⁸⁴ Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan

82 Harbani Pasalong, *Teori Pengambil Keputusan*, (Bandung: ALFABETA, 2023), hlm. 34.

83 Resta Andriana dan Hade Afriansyah, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pengambilan Keputusan Putrifile://C:/Users/u/Downloads/Resta%20Andriana%20Putri%2018002176%20(Artikel%20Pengambilan%20Keputusan).pdf

84 Yusrin Ahmad Tosepu, *Pendapat Umum dan Jajak Pendapat (Teori, Konsep dan Aplikasi)*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2017), hlm. 12-13.

kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁸⁵

F. Mengukur Pendapat Umum melalui Jejak Pendapat (Polling)

Bagi negara yang menganut prinsip keterbukaan demokrasi, setiap pejabat negara atau pegawai negeri sangat mementingkan opini publik, karena keputusan yang diambilnya harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, jajak pendapat menempati tempat pengukuran dan analisis yang penting di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Bisa dikatakan, di negara-negara tersebut, kepala negara yang lolos dari pemilu tidak tergantikan. Bagi para pemimpin nasional, pemimpin politik, atau kandidat yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu, umumnya menggunakan jasa lembaga jajak pendapat publik untuk memahami sejauh mana dukungan publik terhadap citra kandidat tersebut. Jajak pendapat publik di masyarakat Amerika bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari budaya demokrasinya.

Jejak pendapat atau polling adalah sebuah metode ilmiah yang dapat mengukur secara tepat (valid) pendapat masyarakat.⁸⁶ Melalui polling, pemerintah dapat mengetahui pendapat masyarakat tentang satu hal, baik masalah politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Polling bukan hanya ekspresi pendapat yang sifatnya privat, tetapi juga makin terstruktur. Lewat polling ekspresi pendapat umum menjadi baku, ada aturan yang tegas dan jelas. Lewat polling, ekspresi pendapat umum menjadi seragam. Cara melakukan polling adalah menggunakan interviewer terlatih untuk mewancari responden, melalui telepon, atau dengan cara lainnya. Salah satu cara agar bisa mengetahui dan mengukur opini publik adalah dengan melakukan polling atau jajak pendapat. Terdapat beberapa metode dan teknik dalam jajak pendapat, antara lain: survei opini publik dari sampel tertentu, dan dirancang untuk mewakili opini suatu populasi.⁸⁷

G. Media Masa dan Pendapat Umum

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk pendapat umum masyarakat. Salah satu fungsi media massa adalah sebagai alat untuk menyalurkan

⁸⁵ Taufiqurokhaman, *Kebijakan Publik “Pendeklasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hlm. 2.

⁸⁶ Ery Muchyar Hasiri, Asniati, Nur Israwati, Aplikasi E-Voting Untuk Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Arah Kebijakan Pemerintah Kota Baubau Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, *Jurnal Informatika*, Volume 11, No.2, Desember 2022, file:///C:/Users/u/Downloads/1083-2915-1-PB.pdf

⁸⁷ Universitas Medan Area, Fakultas Isipol, Mengukur Opini Publik, <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2021/07/31/mengukur-opini-publik/>

informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah dalam memperoleh informasi.⁸⁸ Media massa juga memiliki fungsi pengawasan sosial, fungsi interpretasi, fungsi transmisi nilai, dan fungsi hiburan. Melalui media massa, seseorang atau kelompok tertentu dapat menanamkan pesan tertentu melalui informasi-informasi yang penyajiannya seringkali disetting terlebih dahulu.

Dalam perkembangan teori komunikasi massa, konsep masyarakat dipandang sangat dipengaruhi oleh pesan-pesan media utamanya dalam bentuk pendapat umum. Oleh karena itu, media massa dapat dikatakan sebagai senjata yang ampuh bagi perebutan citra (*image*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat dalam proses pembentukan opini atau sudut pandangnya.⁸⁹ Pendapat umum tentang suatu efek komunikasi ialah suatu respon yang langsung, isomorfik atau satu demi satu. Dalam komunikasi media massa, hal ini menunjukkan juga suatu dampak yang segera, yang sama kemungkinannya untuk setiap orang dalam suatu khalayak, seperti pada teori peluru atau jarum suntik.⁹⁰

H. Tujuan Jajak Pendapat (Polling)

Penetapan tujuan polling merupakan langkah amat penting. Tujuan polling adalah mengetahui respons publik terhadap persoalan aktual yang tengah terjadi di masyarakat. Tujuan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Pertama untuk mengetahui respons persetujuan publik (setuju – tidak dengan isu atau kebijakan tertentu).
2. Untuk mengetahui preferensi atau intensitas sikap publik terhadap isu aktual tersebut.⁹¹

I. Pembentukan Pendapat Umum

Pembentukan pendapat umum merupakan suatu proses di mana individu-individu membentuk pandangan atau keyakinan bersama terhadap suatu isu atau topik

88 Husnul Khatimah, Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Tasâmu* Volume 16, No. 1, Desember 2018,
file:///C:/Users/u/Downloads/aufklarung12,+Journal+manager,+POSISI+DAN+PERAN+MEDIA+DALAM+KEHI DUPAN+MASYARAKAT.pdf

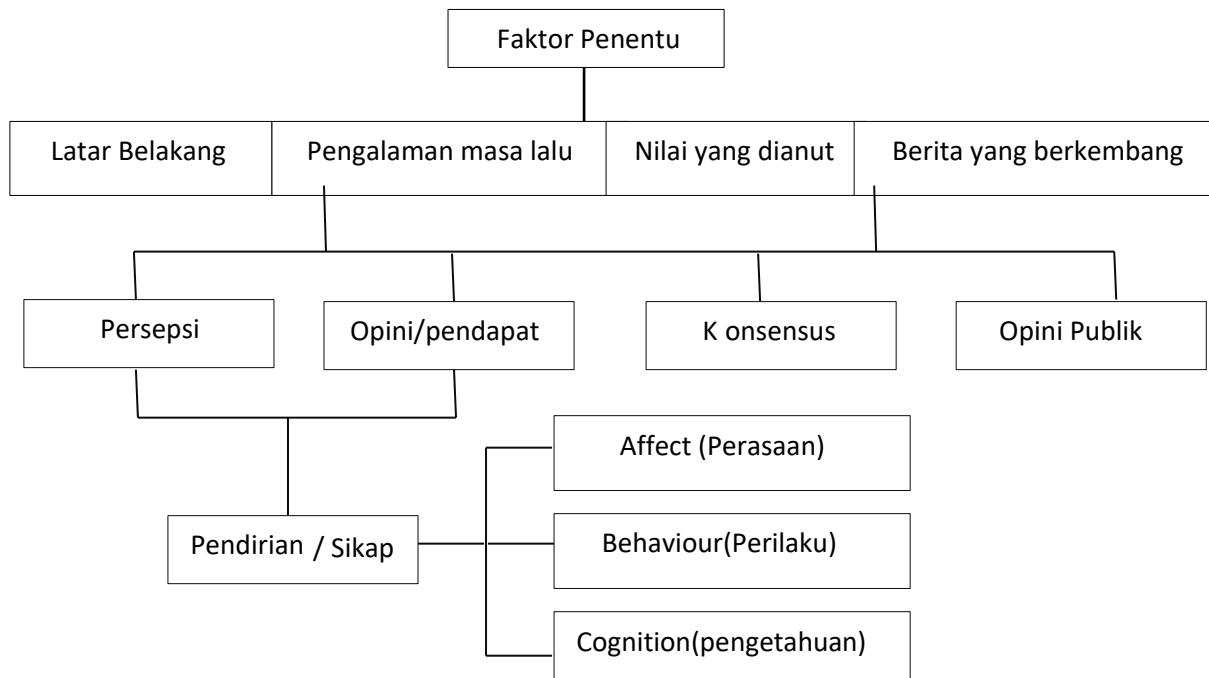
89 Mohd Hamdan, Peranan Media Massa Memartabatkan Integriti Nasional,
<https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/jkob/article/view/156>

90 Hamdani Thaha, Media Massa Dan Masyarakat, *Jurnal Al-Tajdid*, Vol. I No. 1/Maret, file:///C:/Users/u/Downloads/570-1210-1-SM.pdf.

91 Taufiqurohman, *Kebijakan Publik “Pendeklasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hlm. 10

tertentu. Proses ini melibatkan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi cara orang-orang membentuk pandangan mereka. Pembentukan pendapat umum bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai faktor tersebut. Individu-individu memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda, sehingga pandangan mereka dapat bervariasi meskipun terpapar pada faktor-faktor yang serupa.⁹² Adapun faktor-faktor beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu :

Proses Pembentukan Pendapat Umum



Sumber : R.P. Abelson (dalam Ruslan, 2004: 68)

Bagan di atas merupakan gambaran dari proses pembentukan opini publik, yang diawali oleh 4 faktor penentu seperti latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan berita yang berkembang. Keempat hal ini diolah kembali menjadi persepsi. Persepsi yang akan dipengaruhi oleh pendirian dapat membentuk sebuah opini. Opini yang melewati proses consensus akan segera menjadi opini publik

Dengan begitu Tahap awal dalam pembentukan pendapat umum adalah persepsi. Persepsi adalah cara individu atau kelompok menginterpretasikan informasi yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Persepsi dapat dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai, dan keyakinan individu atau kelompok. Setelah terbentuknya persepsi, individu

92 Fauzi Syarief, Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana

Twitter Sby), Jurnal Komunikasi, Volume VIII Nomor 3, September 2017, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/article/view/3092/1963>

atau kelompok dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti media massa, kelompok sosial, pemimpin pendapat, dan pengalaman pribadi. Pengaruh ini dapat membentuk pandangan dan sikap individu atau kelompok terhadap suatu isu.⁹³ Dalam hal ini Komunikasi memainkan peran penting dalam pembentukan pendapat umum. Melalui komunikasi, individu atau kelompok dapat berbagi informasi, gagasan, dan pandangan mereka dengan orang lain. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti media massa, diskusi kelompok, atau platform online.

J. Tipe Pendapat Umum

Tipe pendapat umum adalah pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Dalam pelaksanaan sistem demokrasi, Indonesia mengenal beberapa bentuk demokrasi, salah satunya adalah demokrasi parlementer. Dalam demokrasi, diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan ini dijamin oleh pemerintah melalui UUD 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pendapat umum juga merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak mengemukakan pendapat di muka umum harus dilaksanakan secara benar dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa pendapat umum adalah pendapat yang mencerminkan pandangan dan kepentingan banyak orang dalam masyarakat. Pendapat ini bisa berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, atau topik lainnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

K. Penutup

Pendapat umum, atau opini umum, merujuk pada pandangan atau keyakinan yang diterima atau dipegang oleh sebagian besar orang dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Ini mencerminkan suatu konsensus atau pola pikir yang dominan di antara individu-individu dalam komunitas tertentu pada waktu tertentu. Pendapat umum

⁹³ Muhammad Hafizh, Peran Sosial Terhadap Persepsi Aktifis Mahasiswa Fisip Undip Sebagai Pemilih Pemula Dalam Pilpres 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/138044-ID-peranan-media-sosial-terhadappersepsi-a.pdf>

bisa terkait dengan berbagai hal, termasuk nilai-nilai moral, kebijakan politik, isu-isu sosial, atau bahkan tren budaya. Terkadang, pendapat umum tercermin dalam hasil polling atau survei di mana orang-orang diwawancara atau memilih untuk menyatakan pandangan mereka terhadap suatu topik tertentu.

Polling adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur opini, preferensi, atau pandangan masyarakat terhadap suatu isu atau topik tertentu. Proses ini biasanya melibatkan pengumpulan tanggapan dari sejumlah orang yang diwakili sebagai sampel yang mewakili populasi yang lebih besar. Hasilnya kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang mungkin menjadi pendapat umum.

REFERENSI

- Wiguna, Media Sosial dan Komunikasi Politik Era Digital, jurnal Komunikasi Indonesia Vo.3, No.2, 2014,
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1176&context=jkmi>
- Faris Budiman Annas, Opini Publik Dalam Polarisasi Politik Di Media Sosial Public Opinion Of Political Polarizationon Social Media, JURNAL PIKOM(Penelitian Komunikasi dan Pembangunan),
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkp/article/view/2006/pdf>.
- Nadilla Ryana Ananda, Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat Dari Transisi Politik Hukum Di Indonesia, Jurnal Sharia dan Humanities,
<https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/94/77>
- Pangi Syarwi, Diskursus Teori dan Praktik Model Demokrasi Konsensus Di Indonesia, Jurnal Communitarian Vol.3 ,No.2, 24 Februari 2022, file:///C:/Users/u/Downloads/174-394-1-PB.pdf.
- Hafied Cangara. 2016. Komunikasi Politik, Konsep, teori, dan Strategi, Edisi Revisi,cet ke 5 Jakarta: Rajawali Pers
- Helena Olli & Novi Erlita. 2011. Opini Publik Edisi Kedua, (Jakarta: INDEKS Permata Puri Media
- William Albig. 1956. Modern Public Opinion, (New York : McGraw – Hill Book Company and Inc.
- Sahya Anggara. 2013. Sistem Politik di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia,

- Dyah Tantri Efrina Putri, Pengaruh Hasil Polling Terhadap Pembentukan Opini Pemilih Pemula, Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, September 2020, file:///C:/Users/u/Downloads/234-Article%20Text-1030-2-10-20201026.pdf
- Ahmad Faisol dkk. 2009. Media, Pemilu, Dan Politik, Jakarta: Kecenderungan Media Dalam Pemilu, Institusi Studi Arus Informasi,
- S. Prajudi Atmosudirjo. 1974. Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan: Decisions Making, cetakan ke 3 , Jakarta.
- Harbani Pasalong. 2023. Teori Pengambil Keputusan, Bandung: ALFABETA
- Resta Andriana dan Hade Afriansyah. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pengambilan Keputusan
Putrifile:///C:/Users/u/Downloads/Resta%20Andriana%20Putri%2018002176%20 (Artikel%20Pengambilan%20Keputusan).pdf Yusrin Ahmad Tosepu, Pendapat Umum dan Jajak Pendapat (Teori, Konsep dan Aplikasi), Surabaya, Jakad Media Publishing
- Taufiqurokhaman. 2014. Kebijakan Publik “Pendeklasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Ery Muchyar Hasiri, Asniati, Nur Israwati, Aplikasi E-Voting Untuk Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Arah Kebijakan Pemerintah Kota Baubau Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Jurnal Informatika, Volume 11, No.2, Desember 2022, file:///C:/Users/u/Downloads/1083-2915-1-PB.pdf
- Universitas Medan Area, Fakultas Isipol, Mengukur Opini Publik,
<https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2021/07/31/mengukur-opini-publik/>
- Husnul Khatimah, Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat, Jurnal Tasâmu Volume 16, No. 1, Desember 2018,
file:///C:/Users/u/Downloads/aufklarung12,+Journal+manager,+POSISI+DAN+PERAN+MEDIA+DALAM+KEHIDUPAN+MASYARAKAT.pdf
- Mohd Hamdan, Peranan Media Massa Memartabatkan Integriti Nasional,
<https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/jkob/article/view/156>
- Hamdani Thaha, Media Massa Dan Masyarakat, Jurnal Al-Tajdid, Vol. I No. 1/Maret, file:///C:/Users/u/Downloads/570-1210-1-SM.pdf.
- Taufiqurokhaman. 2014. Kebijakan Publik “Pendeklasian Tanggung Jawab Negara

Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)

Fauzi Syarief. 2017. Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana Twitter Sby), Jurnal Komunikasi, Volume VIII Nomor 3, September

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/article/view/3092/1963>

Muhammad Hafizh. 2014. Peran Sosial Terhadap Persepsi Aktifis Mahasiswa Fisip Undip Sebagai Pemilih Pemula Dalam Pilpres.
<https://media.neliti.com/media/publications/138044-ID-peranan-media-sosialterhadap-persepsi-a.pdf>

Eko Harry Susanto. 2013. Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum, Jurnal

Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember,
<https://media.neliti.com/media/publications/102943-ID-dinamika-komunikasipolitik-dalam-pemili.pdf>

Pangi Syarwi. 2022. Diskursus Teori dan Praktik Model Demokrasi Konsensus Di Indonesia, Jurnal Communitarian Vol.3 ,No.2, 24 Februari,
<file:///C:/Users/u/Downloads/174-394-1-PB.pdf>

Raden Mas Jerry Indrawan. 2017. Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat, Jurnal WACANA, Volume 16 No. 2, Desember
[file:///C:/Users/u/Downloads/14-562-2-PB%20\(8\).pdf](file:///C:/Users/u/Downloads/14-562-2-PB%20(8).pdf)

Cora Elly Noviati. 2013. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni.
<file:///C:/Users/u/Downloads/melisafd,+7-Cora+Elly+Noviati.pdf>

Partai Politik dan Pemilu

Tua Dalimunthe

Email: tuadalmunthe123@gmail.com

Abstrak: Analisis mengenai Politik dan Tindakan Anarkis, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Keanggotaan Partai Politik, dan peran Partai Politik menunjukkan kompleksitas dan dinamika dalam sistem politik suatu negara. Tindakan anarkis, meskipun dapat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik, juga dapat merugikan stabilitas dan keamanan. Pemilihan kepala daerah dan presiden menjadi pijakan penting dalam demokrasi, mencerminkan suara rakyat, namun tantangan terkait adil dan transparannya perlu diatasi untuk memastikan integritas sistem demokratis. Keanggotaan dalam partai politik memainkan peran krusial dalam membentuk kebijakan dan mendukung calon pemimpin. Kemudian, peran satu partai politik menimbulkan pertanyaan terkait pluralisme politik dan alternatif dalam merumuskan kebijakan yang mencerminkan kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hubungan antara politik, tindakan anarkis, pemilihan kepala daerah dan presiden, keanggotaan partai politik, serta peran satu partai politik, menjadi esensial untuk merumuskan kebijakan yang mendukung dinamika demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Politik, Tindakan Anarkis, Pilkada, Pilpres, Partai Politik.

A. Pendahuluan

Demokrasi modern terdiri dari partai politik, yang merupakan salah satu komponennya. Keterwakilan adalah sistem yang dibangun oleh demokrasi kontemporer. Ini mencakup perwakilan dalam institusi partai politik dan lembaga formal negara seperti DPR dan DPRD.⁹⁴

Meskipun partai politik harus melakukan fungsinya dengan baik untuk menjadikan suatu negara demokratis, mereka belum melakukan semua fungsi tersebut. Karena peran partai politik sangat penting, keberadaan dan prestasi partai politik seringkali merupakan indikator utama kemajuan demokrasi suatu negara.⁹⁵ Meskipun ia bukan pemerintahan atau pelaksana, keberadaannya akan memengaruhi bagaimana dan ke mana pemerintahan dijalankan. Pendidikan politik partai politik mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban dan keterlibatan aktif dan kreatif dalam kehidupan nasional.⁹⁶ Nama “Partai Politik” sering dikaitkan dengan reputasi buruk orang. Orang-orang yang berpartisipasi dalam partai dianggap sebagai penipu, omong kosong, gila kekuasaan, dan selalu menjual kepentingan umum untuk keuntungan mereka sendiri.⁹⁷

Salah satu elemen penting dalam dinamika politik suatu negara adalah partai politik. Salah satu cara seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan kekuasaan adalah dengan berpartisipasi dalam partai politik. Kita sudah sering mendengar argumen seperti ini di berbagai media dan di seminar-seminar yang kita ikuti, terutama yang berkaitan dengan partai politik.⁹⁸ Indikator atau tolak ukur sesuatu dapat dikatakan ideal atau tidak ideal karena sifatnya sangat relatif karena ini menyangkut penghakiman nilai, yang sangat berbeda antara negara, tempat, masyarakat, dll.⁹⁹ Karena makna dari istilah "ideal" yang berbeda, definisi hubungan ideal antara partai politik (parpol) dalam sistem konstitusi Jerman dan Indonesia mungkin sama atau

94 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Ed.I-Cet. 5; Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.401

95 A. Gau Kadir, Dinamika partai politik di Indonesia, Sosiohumaniora, Volume 16 No. 2 Juli 2014: 132 – 136.

96 Payerli Pasaribu, “Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 5 (1) (2017): 51-59.

97 Ellya Rosana, “Partai politik dan pembangunan politik”, Jurnal TAPIs Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012.

98 Karini Kartono, “Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa”, (Bandung : Mandar Maju, 2009),hlm. 89.

99 Mansour Fakih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. (yogyakarta : Insis Press, 2009), h. 8-9.

berbeda.¹⁰⁰

Partisi politik adalah representasi dari gagasan atau representasi dari keyakinan tentang negara dan masyarakat yang ingin diperjuangkan. Filosofi, platfrom, dan visi dan misi partai menjadi penggerak dan motivasi utama kegiatan partai.¹⁰¹ Menurut RH Soltau dalam An Introduction to Politics, batas-batas partai politik ternyata sama dengan batas-batas yang ditetapkan oleh Raymond Garfield Gettel dalam Political Science. Jadi, secara umum, partai politik adalah kumpulan orang atau golongan yang berusaha untuk mendapatkan dan menggunakan kekuasaan.¹⁰² Menurut Budiardjo (2000: 166-168) partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: 1) Partai sebagai sarana komunikasi politik. 2) Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik. 3) Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik.¹⁰³

B. Partai Politik

1. Defenisi Partai Politik

Secara umum, partai politik adalah kelompok orang yang berbagi nilai, prinsip, dan semangat. Tujuan kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik, biasanya dengan cara konstitutionil untuk melaksanakan kebijakan mereka.¹⁰⁴ Carl J. Friedrich menggambarkan partai politik sebagai sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan kekuasaan ini memberikan kepada anggota partainya keuntungan yang bersifat materiil maupun inderawi, seperti yang dikutip Miriam Budiardjo.¹⁰⁵ Setelah melihat beberapa definisi partai politik, dapat mengatakan bahwa partai politik adalah hasil dari pengorganisasian sekelompok orang untuk mendapatkan kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

2. Tim Sukses Partai Politik

100 Muhammad Siddiq Armia, Hinungan Ideal Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam pengesian jabatan publik, Jurnal Review Politik Volume 07, Nomor 01, Juni 2017.

101 Akbar Tanjung, Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal, Jurnal Al-Dustur; VOLUME 2 NO 1, JUNI 2019.

102 Yeby Ma'asan Mayrudin, "Dinamika partai politik dan positioning", Journal of Governance, Desember 2017, Volume 2, no. 2.

103 Putri Handayani Nurdin, Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik, Volume 1 Issue 02 , 2019, JALREV 1.

104 Nofal Liata, "Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik", Jurnal Sosiologi Agama Indonesia Vol. 1, No. 1, 79-95, 2020.

105 Ibid., h. 167

Pemilihan Indonesia, baik eksekutif maupun legislatif, biasanya menggunakan tim pemenangan di luar partai politik pengusungnya. Tim pemenangan membantu kandidat memenangkan pemilu dengan memberi mereka suara pemilih. Dalam masyarakat Indonesia, tim sukses lebih sering disebut sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mendukung calon yang diusungnya agar menang dalam pemilihan (Capres, Cagub, Cabup/Cawakot).¹⁰⁶ Mereka yang membentuk tim sukses memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pemenangan pasangan calon, terutama mereka yang memiliki kemampuan manajerial yang kuat, setia, dan memiliki visi dan misi jangka panjang untuk orientasi dalam pemenangan calon, dan tidak mengenal waktu untuk menyelesaikan kegiatan sebagai tim sukses. Tim Sukses membantu calon kandidat dalam semua aspek.

Tim yang sukses harus memiliki daya ikat yang dapat membuat anggota tumbuh dari pengalaman bersama dan bekerja sebagai suatu kelompok dalam waktu yang cukup lama, serta daya padu yang menjunjung tinggi integrasi tim untuk menyatukan tujuan tim secara keseluruhan, untuk dapat bekerja sama dalam memperjuangkan Program Kerja calon kandidat dan memenangkan calon kandidat dalam Pemilihan Umum. Tim yang sukses juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan program serta dapat meningkatkan hasilnya.¹⁰⁷

3. Keanggotaan Partai Politik

a. Sistem Kepartaian

Dieter Nohlen dan Elmar Wiesenthal mengatakan bahwa sistem kepartaian adalah keseluruhan organisasi partai politik di sebuah negara. Faktor-faktor yang menentukan sistem kepartaian adalah sebagai berikut: jumlah partai politik; tingkat fragmentasi atau pengelompokan partai politik; hubungan ideologis atau polarisasi; pola interaksi partai politik, baik koalisi maupun oposisi; hubungannya dengan masyarakat; posisi partai politik terhadap sistem politik saat ini, apakah mereka mendukung atau tidak; dan derajat kelembagaan atau stabilitas sistem kepartaian.¹⁰⁸ Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perbedaan jika dilihat dari sudut pandang sejarah politik.

106 George Towar Ikbal Tawakkal, Jejaring sosial dalam pembentukan tim sukses mandiri di pemilu DPRD 2019.

107 Nanda Pratiwi Khalik,dkk, PENGARUH KOMUNIKASI TIM SUKSES PARTAI POLITIK TERHADAP HASIL PEMENANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH, E-Journal UNSRAT <https://ejurnal.unsrat.ac.id> › article › download, diakses pada 4 januari 2024.

108 A Adlin, Sistem Kepartaian dan Model Sistem Kepartaian di Asia Tenggara, <https://repository.unri.ac.id> , diakses pada 4 januari 2024.

Perbedaan ini di antaranya akibat dari tipikal sistem politik yang berlaku.

Di Indonesia, secara bergantian, sistem politik mengalami sejumlah perubahan dari Demokrasi Liberal tahun 1950 hingga tahun 1955, Rezim Politik Otoritarian dari tahun 1959 hingga tahun 1965, Rezim Kediktatoran Militer dari tahun 1966 hingga tahun 1971, Rezim Otoritarian Kontemporer dari tahun 1971 hingga tahun 1998 dan kembali menjadi Demokrasi Liberal dari tahun 1998 hingga sekarang. Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, dapat dilihat dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu.¹⁰⁹

b. Aktifitas Partai

Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang mengontrol dan pihak yang diberi kuasa; mereka mengumpulkan informasi dari masyarakat untuk diberikan kepada pihak yang mengontrol dan sebaliknya dari pihak yang mengontrol kepada masyarakat. Informasi masyarakat, yang terdiri dari pendapat dan aspirasi, disusun dan diproses sehingga dapat diakses oleh pihak yang mengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, partai politik memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana, program, dan kebijakan pemerintah. Partai politik melakukan berbagai fungsi dalam komunikasi politik di berbagai negara.¹¹⁰

c. Kepartaian dan Pemilu Umum di Indonesia

Sistem kepartaian di negara maju sangat stabil sehingga, meskipun negara tersebut memiliki banyak partai, partai-partai kecil pada akhirnya akan membentuk koalisi permanen dengan dua partai besar. Ini seperti yang terjadi di Amerika Serikat, di mana peran dan posisi Partai Republik dan Partai Demokrat jelas. Sudah jelas bahwa sistem kepartaian menghasilkan kestabilan politik di negara tersebut, yang pada gilirannya memberikan "ruang" untuk pembangunan ekonomi, penyelarasan sistem sosial, dan lain-lain untuk mencapai tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat relatif.

Di sisi lain, di negara-negara berkembang (negara berkembang), sebagian besar

¹⁰⁹ Aditiya warman, "Sistem kepartaian dan pembangunan politik di Indonesia", Jurnal Unigal <https://jurnal.unigal.ac.id/article/view>, diakses pada 4 januari 2024.

¹¹⁰ Atie rachmiatie,dkk, "Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai

negaranya adalah negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaan atau negara yang pernah menjadi jajahan, dan mereka mengadopsi partai politik dari struktur politik negara maju sebagai salah satu bagian atau alat pembangunan politik untuk membangun negara demokratis. Di negara berkembang, sistem kepartaian sering berubah karena tidak stabil seperti di negara maju. Misalnya, meskipun transisi dari sistem politik satu partai ke sistem multipartai tidak selalu menghasilkan sistem politik yang stabil, sehingga tidak jarang terjadi ketidakpastian dan ketidakpastian politik yang tidak kunjung selesai.¹⁸

Dieter Nohlen dan Elmar Wiesenthal mengatakan bahwa sistem kepartaian adalah keseluruhan organisasi partai politik di sebuah negara. Faktor-faktor yang menentukan sistem kepartaian adalah sebagai berikut: jumlah partai politik; tingkat fragmentasi atau pengelompokan partai politik; hubungan ideologis atau polarisasi; pola interaksi partai politik, baik koalisi maupun oposisi; hubungannya dengan masyarakat; posisi partai politik terhadap sistem politik saat ini, apakah mereka mendukung atau tidak; dan derajat kelembagaan atau stabilitas sistem kepartaian.¹⁹

4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi rakyat seluasluasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai: Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Hak Memilih; Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pendaftaran Pemilih; Pencalonan; Kampanye dan Dana Kampanye;

Pemungutan dan Penghitungan Suara; Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan; Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan; Pengawasan, Penegakan Hukum, dan Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Ketentuan Pidana.²⁰

5. Pemilihan Kepala Daerah

“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, menurut Pasal 18 Perubahan Kedua UUD 1945, ayat (4). Menurut sejarah, Pasal 6A Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara demokratis,” terlepas dari apakah presiden dipilih melalui pemilu²⁰ DPR RI, “Pemilihan presiden dan Wakil presiden”, 31 juli 2003, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/206>, diakses pada 4 januari 2024. Presiden dan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dipilih melalui pemilu.¹¹¹ Pendapat lain mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah rezim otonomi daerah karena diatur di bawah Bab VI Pemerintahan Daerah, yang berbeda dengan rezim pemilu yang diatur dalam Bab VIIIB Pemilihan Umum, sehingga pemilihan kepala daerah bukan pemilu. Perdebatan rezim otonomi versus rezim pemilu berdasar lokasi pengaturan dalam konstitusi tersebut sesungguhnya tidak relevan, sebab DPRD yang merupakan perangkat otonomi daerah tidak hanya diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, tetapi juga dalam Bab VIIIB Pemilihan Umum. Oleh karena itu penafsiran original intent bahwa pemilihan kepala daerah bukan pemilu sulit dipertanggungjawabkan.¹¹²

6. Politik dan Tindakan Anarkis

Anarkis adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Tapi beberapa penulis telah mendefinisikan sebagai lembaga yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas non-hierarkis. Anarkisme berpegangan pada konsep bahwa negara menjadi tidak diinginkan, tidak perlu, atau berbahaya. Sementara anti-statisme adalah pusat dari pemikiran inianarkisme juga menentang otoritas atau organisasi hierarkis dalam pelaksanaan hubungannya dengan manusia, sehingga tidak terbatas pada sistem negara

111 H.M. Surya Respatiromo, “Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi electoral”, *jurnal MMH*, Jilid 42, No.3, 2013.

112 Suyatno, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia”, w <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php> , diakses pada 4 januari 2024.

saja.¹¹³Dalam konteks bahasa Indonesia, anarkisme adalah sebuah teori dan gerakan sosial dan politik yang mengklaim hak individu untuk memiliki kemandirian ekonomi, sosial, dan politik yang tidak terbatas, serta melawan segala bentuk dominasi terhadap orang lain.²⁴ Seperti dijelaskan pada bagian latar belakang bahwa Anarkis tidak bertujuan kepada “without order” tetapi lebih kepada “without leader”.

Anarkisme menolak otoritas dalam bentuk apapun, terutama otoritas politik, yang termanifestasikan dalam bentuk Negara. Anarki adalah teori dan praktik kebebasan membela martabat individu yang menolak segala bentuk penindasan. Jika penindas itu pemerintah, anarki akan memilih masyarakat tanpa pemerintah. Jika penindas itu hierarki, anarki akan antihierarki. Jadi yang ditekankan di sini bukan pemerintah atau hierarki yang jadi target perlawanan, melainkan penindasan dalam dua otoritas tersebut.¹¹⁴ Walaupun anarkisme filosofis menggambarkan teori legitimasi politik yang skeptis, anarkisme juga merupakan konsep yang digunakan dalam teori filosofis dan sastra untuk menggambarkan semacam anti-fondasionalisme. Anarkisme filosofis dapat berarti teori kehidupan politik yang skeptis terhadap upaya untuk membenarkan otoritas negara atau teori filosofis yang skeptis terhadap upaya untuk menegaskan landasan kokoh bagi pengetahuan.¹¹⁵

C. Penutup

Demokrasi modern terdiri dari partai politik, yang merupakan salah satu komponennya. Keterwakilan adalah sistem yang dibangun oleh demokrasi kontemporer. Ini mencakup perwakilan dalam institusi partai politik dan lembaga formal negara seperti DPR dan DPRD. Nama “Partai Politik” sering dikaitkan dengan reputasi buruk orang. Orang-orang yang berpartisipasi dalam partai dianggap sebagai penipu, omong kosong, gila kekuasaan, dan selalu menjual kepentingan umum untuk keuntungan mereka sendiri. Sistem kepartaian di negara maju sangat stabil sehingga, meskipun negara tersebut memiliki banyak partai, partai-partai kecil pada akhirnya akan membentuk koalisi permanen dengan dua partai besar. Ini seperti yang terjadi di Amerika Serikat, di mana peran dan posisi Partai Republik dan Partai Demokrat jelas.

113 Moh. Ikma, “Anarkisme Politik di Aras Lokal”, JIPP : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Vol 06 No 02 ,hlm. 123 – 152.

114 Muhammad Fahmi Nur Cahya, Fenomennologi anarkisme, <https://journal.unair.ac.id> , , diakses pada 4 jannuari 2024.

115 Bali Widodo, Membangun kedewasaan berpolitik masyarakat akademis melalui pendidikan kewarganegaraan”, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, volume 3, nomor 1, 2018.

Sudah jelas bahwa sistem kepartaian menghasilkan kestabilan politik di negara tersebut, yang pada gilirannya memberikan “ruang” untuk pembangunan ekonomi, penyelarasan sistem sosial, dan lain-lain untuk mencapai tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat relatif. Di sisi lain, di negara-negara berkembang (negara berkembang), sebagian besar negaranya adalah negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaan atau negara yang pernah menjadi jajahan, dan mereka mengadopsi partai politik dari struktur politik negara maju sebagai salah satu bagian atau alat pembangunan politik untuk membangun negara demokratis. Di negara berkembang, sistem kepartaian sering berubah karena tidak stabil seperti di negara maju. Misalnya, meskipun transisi dari sistem politik satu partai ke sistem multipartai tidak selalu menghasilkan sistem politik yang stabil, sehingga tidak jarang terjadi ketidakpastian dan ketidakpastian politik yang tidak kunjung selesai.

REFERENSI

- Adlin, A. *Sistem Kepartaian dan Model Sistem Kepartaian di Asia Tenggara*. n.d.
<https://repository.unri.ac.id> (accessed Januari 4, 2024).
- Agustino, Leo. *Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum (PEMILU)*. modul, IPEM4318/MODUL, 2012.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Hinungan Ideal Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam pengesian jabatan publik." *Jurnal Review Politik*, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Cahya, Muhammad Fahmi Nur. *Fenomennologi anarkisme*,. n.d.
<https://journal.unair.ac.id> (accessed Januari 4, 2024).
- DPR RI. *Pemilihan presiden dan Wakil presiden*. Juli 31, 2003.
<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/206>, (accessed Januari 4, 2024).
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insis Press, 2009.
- Johannes, Ayu Widowati. *Pilkada mencari pemimpin daerah* . Cv. Cendikia Press, 2020.
- Kadir, A. Gau. "Dinamika partai politik di Indonesia." *Sosiohumaniora*, Juli 2014: 132 – 136.
- Kartono., Karini. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*.

- Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Liata, Nofal. "Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 2020: 79-95.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan. "Dinamika partai politik dan positioning." *Journal of Governance*, 2017.
- Moh. Ikma, "Anarkisme Politik di Aras Lokal", JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Vol 06 No 02 ,hlm. 123 – 152. "Anarkisme Politik di Aras Lokal." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, n.d.: 123 – 152.
- Nanda Pratiwi Khalik, dkk. *Nanda Pratiwi Khalik,dkk, Pengaruh Komunikasi Tim Sukses Partai Politik Terhadap Hasil Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah*. n.d. <https://ejournal.unsrat.ac.id> › article › download, (accessed januari 4, 2024).
- Nurdin, Putri Handayani. "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik." *JALREV 1*, 2019.
- Pasaribu, Payerli. " Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2017: 51-59.
- Rachmiatie, Atie. "Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik." *MIMBAR*, 2013: 123-132.
- Respatino, H.m. Surya. "Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi electoral." *jurnal MMH*, 2013.
- Rosana, Ellya. "Partai politik dan pembangunan politik." *Jurnal TAPI*, 2012.
- Siahaan, Hotrnna M. "Anarki sebagai upaya mempertahankan substansi di pedesaan." *JSP*, 1999: 60.
- Tanjung, Akbar. "Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal." *Jurnal Al-Dustur*, 2019.
- Tawakkal, George Towar Ikbal. "Jejaring sosial dalam pembentukan tim sukses mandiri di pemilu DPRD 2019." 2019. (accessed januari 4, 2024).
- Warman, Aditiya. *Sistem kepartaian dan pembangunan politik di Indonesia*. n.d. Jurnal Unigal <https://jurnal.unigal.ac.id> › article › view (accessed Januari 4, 2024).
- Widodo, Bali. "Membangun kedewasaan berpolitik masyarakat akademis melalui pendidikan kewarganegaraan." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2018.
- Yana Indrawan. *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Secara Realita Dan Dinamika*. Jakarta: Sekretaris Jenderal, 2006.

Kampanye untuk Pemasaran Politik

Masdewati

Email: masdewati@gmail.com

Abstrak: Pemasaran politik tidak terlepas dari terapan ilmu marketing, penggunaan metode marketing dalam bidang politik sendiri dikenal sebagai marketing politik atau *political marketing*, dengan penekanan pada pendekatan dan metode marketing dapat membantu politikus atau partai politik dalam menarik simpatik masyarakat dan tujuan organisasi. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pemasaran politik dan kampanye, peran perempuan dalam kancang politik dan fenomena banyaknya artis yang menjadi politisi. Suksesnya sebuah kampanye untuk pemasaran politik tidak hanya dilihat dari kemampuan politikus untuk memilih sebuah tema dan menyampaikan isi kampanye, lebih luas lagi, ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah tim, calon pemimpin dan parpol itu sendiri untuk meningkatkan elektabilitas, dan mempengaruhi calon pemilih.

Kata Kunci: Pemasaran Politik, Kampanye, politisi perempuan, politisi artis, politik selebritis.

A. Pendahulu

Iklim demokrasi yang berkembang di Indonesia semenjak era reformasi telah membuka kesempatan bagi berbagai partai politik untuk berkembang. Praktek politik di Indonesia sendiri telah berkembang sedemikian pesat dengan memanfaatkan aplikasi berbagai disiplin ilmu manajemen seperti marketing. Hal ini didorong oleh heterogenitas masyarakat Indonesia serta meningkatnya taraf ekonomi dan pendidikan masyarakat yang membuat partai politik harus mengaplikasikan berbagai praktek marketing untuk dapat bersentuhan dengan masyarakat. Semakin banyaknya pilihan media komunikasi juga mendorong kebutuhan aplikasi konsep marketing dalam berpolitik di Indonesia. Political Marketing sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai suatu disiplin ilmu, karena aplikasinya di lapangan memerlukan metodologi yang kuat untuk dapat memberikan hasil yang efektif. Sekedar ikut-ikutan saja tidak akan memberikan hasil selain membuang biaya percuma. Dalam hal ini institusi kampus harus mampu mengembangkan dan menawarkan ilmu ini sebagai suatu bidang studi. Ahli-ahli political marketing akan semakin dibutuhkan di Indonesia. Banyak hal yang dapat mendukung kesuksesan kampanye politik di Indonesia, diantaranya adalah popularitas dari seorang kandidat seperti artis yang terbukti cukup efektif sebagai pendongkrak suara dan peran spin doctor Umumnya parpol besar di Indonesia sudah memanfaatkan pula jasa konsultan political marketing untuk membantu dalam meramu pesan yang akan diangkat untuk setiap segmen pemilih yang dibidik serta memilih media komunikasi yang sesuai. Bahkan pilihan warna yang digunakan dalam kampanye juga menentukan kesuksesan. Advertising melalui media televisi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan popularitas kandidat maupun parpol walaupun diragukan apakah dapat efektif pula mendongkrak tingkat elektabilitas seorang kandidat atau parpol tersebut.

Tingkat pendidikan masyarakat harus diperhatikan, karena masyarakat berpendidikan tinggi mungkin cenderung merasa muak jika dibombardir dengan pesan-pesan yang sifatnya menonjolkan kandidat atau parpol. Black campaign juga dinilai kurang efektif untuk Indonesia. Salah satu cara yang sering dipakai adalah soft campaign melalui aksi-aksi sosial seperti perbaikan sekolah, layanan kesehatan, pembangunan tempat ibadah maupun infrastruktur masyarakat. Menurut pengalaman selama ini, cara soft campaign tersebut terbukti paling ampuh dan efektif. Memang

diakui banyak parpol yang sifatnya jorjoran untuk meraih suara dalam waktu singkat, namun untuk keberlangsungan sebuah parpol dalam jangka panjang, kontinuitas dalam pemasaran menjadi sebuah keharusan. Memang semua aktivitas ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, untuk itu bagi parpol yang keuangannya tidak terlalu kuat akan memilih jalan pemasaran secara gradual dengan cara mempertahankan basis pemilih yang sudah diperoleh melalui aksi-aksi nyata mewujudkan program-program yang diangkat saat kampanye sebelumnya dengan harapan pemilih atau simpatisan baru akan dapat direkrut seiring semakin kuatnya track record parpol dalam mewujudkan program-programnya.

B. Pembahasan

1. Pemasaran Politik dan Tim Sukses Pemasaran Politik

Ilmu marketing biasanya dikenal sebagai sebuah disiplin yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Semua usaha marketing dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang “dijual” memang memiliki kualitas yang lebih baik dibanding produk yang dijajakan pesaing. Metode dan pendekatan yang terdapat dalam ilmu marketing dapat membantu institusi politik untuk membawa produk politik kepada konstituen dan masyarakat secara luas.

Penggunaan metode marketing dalam bidang politik dikenal sebagai marketing politik atau political marketing. Dalam marketing politik yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan dan metode marketing untuk membantu politikus dan partai agar lebih efisien dan efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Hubungan ini diartikan secara luas, dari kontak fisik selama periode kampanye sampai dengan komunikasi tidak langsung melalui pemberitaan di media massa.

Pemasaran politik didefinisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang beraneka ragam individu, organisasi, prosedur-prosedur dan melibatkan analisis, pengembangan, eksekusi dan strategi manajemen kampanye oleh kandidat, partai politik, pemerintah, pelobi, kelompok-kelompok tertentu yang bisa digunakan untuk mengarahkan opini publik terhadap ideologi mereka. Tujuan pemasaran politik tidak jauh beda dengan prinsip pemasaran komersial, yakni proses perencanaan dan penetapan harga, promosi dan penyebarluasan ide-ide, barang dan layanan

jasa untuk menciptakan pertukaran guna memenuhi kepuasan individu dan tujuan organisasi.¹¹⁶

Komunikator politik, dalam komunikasi politik, dibedakan kedalam tiga jenis: (1) aktivis sebagai komunikator politik, yang menyuarakan kepentingan kelompok dengan idealisme tertentu, biasanya dalam rangka perubahan politik; (2) profesional sebagai komunikator politik, yaitu mereka yang bekerja dan dibayar untuk kepentingan politik tertentu dari partai, kandidat, atau pejabat politik; dan (3) pejabat sebagai komunikator politik, yaitu mereka yang bercita-cita menduduki atau mempertahankan posisi tertentu dalam suatu jaringan kekuasaan. Adapun efek komunikasi politik secara umum adalah timbulnya opini publik yang diorientasikan pada munculnya dukungan dan partisipasi politik. Dalam konteks pemilu, pilpres, pilkada, bentuk partisipasi politik ini yang paling diharapkan adalah pemberian suara untuk partai atau kandidat politik. Selanjutnya, dari partisipasi politik itu para aktor politik menginginkan diperolehnya kekuasaan, jabatan, atau keuntungan material.

Secara lebih khusus, efek sebuah komunikasi politik sangat tergantung pada tujuan dan cara masing-masing komunikator politik memanfaatkan proses komunikasi politik. Bagi aktivis politik, efek komunikasi politik yang diinginkan adalah perubahan politik. Bagi profesional politik, efek komunikasi politik yang hendak dicapai adalah sesuai keinginan aktor politik yang dibela sang profesional. Sedangkan bagi pejabat politik, efek komunikasi politik yang ingin diciptakan lazimnya adalah pencapaian posisi tertentu dalam jaringan politik.¹¹⁷ Dimensi *political marketing mix* menurut Jain Kumar & dash (2015) dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu: 1) Produk (*product*), 2) Harga (*price*), 3) Tempat (*place*), dan 4) Promosi (*promotion*).¹¹⁸

Sebuah kegiatan pemasaran politik sedapat mungkin diawali dengan kegiatan pembentukan tim kerja yang biasa disebut “Tim Sukses”. Tim sukses direkrut dari tenaga-tenaga potensial sesuai tugas dan fungsinya. Sebuah tim sukses biasanya terdiri dari: 1) Penasehat, 2) Tim Ahli, 3) Tim Riset dan Litbang, 4) Tim Pengumpul Dana, 5)

116 Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 240-241.

117 Ibnu Hamad, “Memahami Komunikasi Politik”, *MediaTor*, Vol. 9, No. 1, Juni 2008, hlm. 149150.

118 Arpit Jain, Anil Kumar and Manoj Kumar Dash, “Information Technology Revolution and Transition Marketing Strategies of Political Parties: Analysis Through AHP”, *Int. J. Business Information System*, Vol. 20, No. 1, 2015, hlm. 73-74.

Tim Kampanye, 6) Tim Penggalangan Massa, 7) Tim Hubungan Antardaerah, 8) Tim Pengamat, 9) Tim Pengamanan dan 10) Tim Pengumpul Suara.¹¹⁹

2. Kampanye, Tema dan Isi Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.¹²⁰ Menurut Rogers dan Storey, yang dikutip dari buku (Ruslan Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, 2008), menjelaskan bahwa kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisir dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu.¹²¹ Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip: a) jujur, b) terbuka dan c) dialogis
- b. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- c. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.¹²²

Dalam praktiknya, tidak sedikit kegiatan kampanye yang dilakukan menemui kegagalan, tetapi banyak juga yang berhasil karena dirancang dengan baik oleh seorang ahli yang berperan sebagai *spin doctor*.

a. Spin Doctor dan Langkah-langkah Kampanye

Pembentukan *image* kandidat dalam hubungannya dengan pembentukan opini publik dilakukan oleh kandidat melalui media cetak dan media elektronik dalam bentuk iklan politik maupun materi pemberitaan. Iklan politik dan materi pemberitaan di media massa ini bertujuan untuk menciptakan *image* positif kandidat.

119 Hafied Cangara, *Komunikasi Politik...*, hlm, 242-245.

120 Emilsyah Nur, “Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk memenangkan Calon Legislatif Kota Makassar”, *Jurnal Diakom*, Vol. 2, No, 1, 2019.

121 Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23.

122 UU No 23 Tahun 2018, hlm. 8, <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-466554577067253344253344>, (diakses pada tanggal 24 Nopember 2023 pukul 22:44 WIB).

Kegiatan *spin doctoring* di Indonesia pertama kali dilakukan pada penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan presiden 2004. Pada pemilihan presiden saat itu, *spin doctor* berhasil membentuk *image* SBY-Kalla sebagai figur yang cerdas, berwibawa, sederhana dan merakyat. Disamping itu, keberhasilan SBY-Kalla juga ditentukan oleh kemampuan tim *spin doctornya* dalam memanfaatkan kontroversi antara SBY dan Megawati untuk meraih simpati publik melalui media massa. Pemilihan presiden 2004 membuktikan pula bahwa keterlibatan *spin doctor* menjadi sangat penting dalam kancah politik, karena *spin doctor* berperan dalam pembentukan *image* kandidat melalui media massa serta kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pembentukan opini publik.¹²³ Dalam strategi perencanaan komunikasi dikenal beberapa langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan sebuah kampanye, Assifi dan French (1982), yang dikutip dalam jurnal Anggeh Afelina Hutagaol, Perencanaan Komunikasi Indonesian Youth Educate And Social Dalam Mengimplementasikan Program I-YES Mengajar (2019), menyusun delapan langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi untuk kampanye yaitu sebagai berikut: 1) Menganalisis Masalah, 2) Menganalisis Khalayak, 3) Merumuskan Tujuan, 4) Memilih Media dan Saluran Komunikasi, 5) Mengembangkan Pesan, 6) Merencanakan Produksi Media, 7) Merencanakan Manajemen, 8) Merencanakan Monitoring dan Evaluasi¹²⁴

3. Tema, Isi Kampanye dan Iklan Politik

Penentuan tema kampanye merupakan suatu hal yang sangat penting. Tema ibaratnya sebuah produk yang mau dipasarkan, sehingga ia harus dikemas dengan baik. Tema menjadi penting karena dalam setiap pemilu partai selalu mengetengahkan tiga hal, yakni program, citra dan kepribadian calon yang relevan dengan tema. Tema harus dikemas dengan baik agar bisa menarik perhatian, sekaligus menjadi *icon* partai. Hal ini penting karena banyak isu yang diangkat secara nasional, tetapi tidak dikemas dengan baik, sehingga tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Dari berbagai jajak pendapat (*polling*) yang pernah dilakukan menjelang pemilu presiden, maka tema-tema yang banyak mendapat perhatian oleh masyarakat berkisar pada isu: 1) Suksesi, 2) Lapangan

123 Rivi Handayani, "Peran *Spin Doctor* Dalam Pembentukan Opini Publik Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Kendari Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa*, Vol. 16, No. 1, April 2013, hlm. 50.

124 Anggeh Afelina Hutagaol, "Perencanaan Komunikasi Indonesian Youth Educate And Social Dalam Mengimplementasikan Program I-Yes", *JOM FISIP*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 6-7. ¹¹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik....*, hlm, 299-300.

Kerja, 3) Korupsi, 4) Keadilan Sosial, dan 5) Pembangunan Ekonomi. Begitu pentingnya masalah ekonomi, sehingga boleh dikatakan masyarakat memandang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas para kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden. Oleh karena itu, masalah ekonomi tidak pernah terlewati sebagai isu kampanye dalam setiap pemilu presiden.¹¹

Iklan Politik adalah salah satu bentuk pemasaran, bentuk iklan yang dibentuk untuk mempersuasi orang sehingga menciptakan kebutuhan audiensnya, membujuk pihak lain agar sepakat dengan pendapat pihak yang membujuk. Iklan politik adalah alat jualan untuk menimbulkan kebutuhan akan konstituen terhadap parpol atau tokoh yang beriklan, sehingga mendapatkan dukungan, dan ada 3 efek dalam merauk konstituen dalam beriklan, yaitu: mengenal, kemudian mendukung lalu terakhir adalah memilih.

Tiga macam Iklan /Kampanye Politik menurut Jamieson, (2003), yang dikutip dari Jurnal Kheyene Molekandella Boer Iklan Partai Politik dan Media Politik, (2014), (1) Iklan advokasi kandidat: memuji-muji (kualifikasi) seorang calon, pendekatannya bisa, *retrospective policiesatisfaction* (pujian atas prestasi masa lalu kandidat), atau *benevolent-leader appeals* (kandidat memang bermaksud baik, bisa dipercaya, dan mengidentifikasi diri selalu bersama/menjadi bagian pemilih) iklan advokasi isu, dipasang oleh pihak independen untuk menyampaikan isu-isu penting (lingkungan hidup, pengangguran dll) yang diarahkan pada satu atau beberapa iklan atau ungkapanungkapan kampanye dari satu atau beberapa kandidat. (2) iklan menyerang (*attacking*), berfokus pada kegagalan dan masa lalu yang jelek dari kompetitor, pendekatannya bisa *ritualistic* (mengikuti alur permainan lawannya, ketika diserang, akan balik menyerang), (3) Iklan memperbandingkan (*contrasting*): menyerang tapi dengan memperbandingkan data tentang kualitas, rekam jejak dan proposal antar kandidat.¹²⁵ Dampak iklan politik dalam mempengaruhi audiens berlangsung dalam dua tingkatan, menurut Bryan Mc Nair dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction to political communication*”, yang dikutip dalam jurnal Uyun Sufyan Sauri, Komunikasi Politik dalam Perspektif Iklan Politik dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik, (2016). Pertama, iklan politik menyebarkan informasi mengenai visi, misi dan platform kandidat kedalam detail dimana wartawan jarang melakukannya. Kedua, karena iklan politik berbeda dalam dunia perdagangan, periklanan tidak hanya ditujukan untuk

125 Kheyene Molekandella Boer, “Iklan Partai Politik dan Politik Media”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, 2014, hlm. 298.

memberikan informasi kepada audiens, tetapi juga dirancang untuk membujuk (*to persuade*). Dengan demikian, periklanan politik mempunyai keuntungan yang jelas bagi kandidat, yakni kemampuannya dalam menjangkau audiens yang luas dan dalam melakukan persuasi terhadap mereka. Selain itu, diatas segalanya, kontrol atas materi publikasi berada di tangan politisi dan bukan pada media.¹²⁶

4. Kampanye Hitam dan Humor Politik

Kampanye hitam merupakan model kampanye dengan menggunakan rayuan yang merusak. Penyebaran rumor tersebut ditujukan agar para kandidat atau calon kepada masyarakat yang disasar agar mendapatkan persepsi negatif yang dianggap tidak etis. Kampanye hitam umumnya dilakukan oleh kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih, tujuannya agar meninggalkan kandidat atau calon pilihannya. Kampanye hitam merupakan suatu cara untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat calon tertentu dengan menjatuhkan lawanpolitiknya melalui isu-isu yang tidak mendasar. Metode tersebut seringkali digunakan untuk membunuh karakter seseorang, dengan propaganda negatif agar mempengaruhi proses keputusan masyarakat dalam memilih atau yang belum menentukan pilihannya.¹²⁷

Kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya. Hal ini bisa dipahami karena si calon tersebut merasa terancam kalah jika tidak melakukan cara-cara tertentu.¹²⁸ Berdasarkan dari konsep Brian Mcnair terkait elemen dasar komunikasi politik, yang dikutip dari Jurnal Cadek Teguh, dkk, dengan Judul Humor sebagai Bentuk Komunikasi Politik di Indonesia, (2018), terdapat tiga elemen dasar yang membentuk komunikasi politik yakni, masyarakat sebagai penerima atau objek dari komunikasi politik, organisasi politik sebagai komunikator politik, dan media sebagai penyampai pesan dari organisasi politik kepada masyarakat. Dalam elemen-elemen yang membentuk komunikasi politik diatas terdapat beberapa aspek yang terdapat dalam ketiga elemen dasar tersebut. Dari aspek-aspek tersebut dapat

126 Uyun Sufyan Sauri, “Komunikasi Politik dalam Perspektif Iklan Politik dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik”, *Jurnal Ilmu Komunikasi, ProListik*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, hlm. 24.

127 Irwan Hafid, “Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 2, No. 1, Juli 2020, hlm. 82.

128 Siti Fatimah, “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemili”, *Jurnal Sosial Politik RESOLUSI*, Vol. 1, No. 1 Juni 2018, hlm. 11-12.

dilihat, *stand-up comedy* sebagai salah satu bentuk dari *pleasure grup* yang merupakan salah satu bentuk dari *politic organization*. *Pleasure grup* sendiri merupakan sebuah kelompok yang bergerak dengan membawa sebuah isu yang ada, sebagai contoh gerakan anti nuklir, gerakan peduli lingkungan dan lain sebagainya. *Pleasure grup* ini merupakan gerakan yang memiliki misi tertentu, mereka juga cenderung mengkampanyekan pesan yang dibawa terkait isu yang digunakan sebagai fokus dalam gerakan tersebut.¹²⁹

Tiap jenis humor membawa implikasi berbeda terhadap proses komunikasi. Karena itulah, politisi musti berhati-hati menyesuaikan gaya humor dengan maksud yang ingin disampaikannya. Pilihan yang keliru bukan hanya membuatnya tidak lucu, tapi membuatnya mendapat penolakan brutal. Pilihan keliru juga akan membuat pesan politik yang diinjeksi dalam humor tidak akan sampai.¹³⁰

5. Perempuan dan Politik

Data Badan Pusat Statistik, jumlah dan distribusi penduduk, menerangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 270.203.917 jiwa, dengan persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 136.661.899 untuk penduduk laki-laki dan 133.542.018 untuk penduduk perempuan.¹³¹ Gambaran tentang persebaran penduduk Indonesia menurut jenis kelamin, tidak serta merta memberikan peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik. Dari data KPU, menjabarkan Sebanyak 575 anggota DPR RI 2019-2024 terpilih resmi dilantik dan diambil sumpahnya pada 1 Oktober 2019 lalu. Dari jumlah itu sebanyak 463 orang (80,52 %) adalah laki-laki dan 112 orang (19,48 %) perempuan.

Pada pemilu serentak pertama ini terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen bahkan jika ditarik lebih kebelakang jumlahnya jadi yang tertinggi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Kita bisa lihat pada Pemilu 1999, jumlah anggota DPR RI perempuan yang terpilih sebanyak 44 orang (9 %), angkanya meningkat di pemilu 2004 menjadi 65 orang (11,3 %). Dipemilu berikutnya, 2009 keterwakilan perempuan

129 Cadek Teguh Aryawangsa, dkk, "Humor Sebagai Bentuk Komunikasi Politik di Indonesia (Studi Kasus: Stand-up Comedy Sammy Notaslimboy Menjelang Pilpres 2014)", *Jurnal OJS Umud*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 11.

Rahmat Petuguran, Humor Politik dan Politik Humor, 29 Agustus 2019, <https://news.detik.com/kolom/d-4685477/humor-politik-dan-politik-humor>, (diakses pada tanggal 24 Nopember 2023 pukul 22:50 WIB).

131 <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, (diakses pada tanggal 24 Nopember 2023 pukul 23:00 WIB).

meningkat kembali menjadi 100 orang (18 %), namun di pemilu 2014 angkanya sempat menurun menjadi 97 perempuan (17 %) yang lolos ke Senayan.¹³²

Prospek positif bagi keterwakilan politik perempuan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral baik secara idealisme maupun implementasinya. Semua tergantung dari seberapa kuat idealisme dan konsistensi perjuangan kaum perempuan dalam panggung politik. Prospek keterwakilan perempuan di parlemen sangat tergantung pada sejumlah korelasi kuat antara sistem pemilu, partai politik, mekanisme pencalonan dan elemen teknis pemilu seperti formula penentuan calon terpilih dan tata cara pemberian suara.¹³³ Deputi Femmy juga menjelaskan perlunya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen melalui sebuah Rancangan Peraturan Presiden tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan. “Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik”.

Tujuan dari Rancangan Perpres Grand Design tersebut dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politiknya. Peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik di parlemen guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender.¹³⁴ Beberapa mekanisme untuk meningkatkan kehadiran perempuan di lembaga legislatif yang terinspirasi dari James L. Creighton, dalam *The Public Participation Handbook*, yang dikutip pada jurnal Vira Nurul Fitriyani, dkk, Pemerintah dan Gender Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Secara umum, partai politik dapat mengembangkan insentif bagi kehadiran perempuan untuk menjalani kampanye, penyediaan jejaring, pelatihan, pengembangan keterampilan atau rancangan suatu target tertentu.

¹³²[¹³³ Very Wahyuni, “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”, *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 68-70.](https://www.kpu.go.id/berita/baca/7829/Sebanyak-575-anggota-DPR-RI-2019-2024-terpilihresmi-dilantik-dan-diambil-sumpahnya-pada-1-Okttober-2019-lalu.-Dari-jumlah-itu-sebanyak-463-orang-80-52-persen--adalah-laki-laki-dan-112-orang--19-48-persen--perempuan, (diakses pada tanggal 25 Nopember 2023 pukul 19:30 WIB).</p></div><div data-bbox=)

¹³⁴[95](https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagikemajuan-bangsa, (diakses pada tanggal 25 Nopember 2023 pukul 20:01 WIB).</p></div><div data-bbox=)

- b. Electoral quota masih dipasang sebagai mekanisme yang paling banyak digunakan. Beberapa bukti di berbagai negara menunjukkan bahwa quota berdampak cepat dan langsung terhadap partisipasi perempuan.
- c. Pengembangan pelatihan dan keterampilan. Sekalipun di kantor, perempuan dapat memperoleh keuntungan untuk meningkatkan efisiensi dan menjamin keberlangsungan.¹³⁵

Kesetaraan Gender dalam perspektif Al-Qur'an.¹³⁶

No.	Kategori	Ayat Dalam Al-Qur'an
1.	Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai hamba	1. QS. Al-Dzariyat: 56 2. QS. Al-Hujurat: 13
2.	Laki-laki dan Perempuan sebagai khalifah di bumi	1. QS. Al-An'am: 165 2. QS. Al-Baqarah: 30
3.	Laki-laki dan Perempuan menerima perjanjian primordial	1. QS. Al-A'raf: 172
4.	Adam dan Hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis	1. QS. Al-Baqarah: 35 2. QS. Al-A'raf: 20 3. QS. Al-A'raf: 22-23 4. QS. Al-Baqarah: 187.
5.	Laki-laki dan Perempuan berpotensi meraih prestasi	1. QS. Ali Imran: 195 2. QS. An-Nisa: 124 3. QS an-Nahl: 97 4. QS Ghafir: 40

(Sumber: Jurnal Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam")

6. Politisi, Artis dan Selebritis

Menghadirkan artis ternama dalam kampanye merupakan cara yang paling ampuh dalam menyedot partisipasi masyarakat. Hal ini terjadi karena banyaknya penggemar dari artis ternama tersebut yang ingin menyaksikan idola mereka. Pemilihan artis sebagai media kampanye harus melalui beberapa pertimbangan, dimana calon

¹³⁵ Vira Nurul Fitriyani, dkk, "Pemerintah dan Gender Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 3, Maret 2022, hlm. 189190.

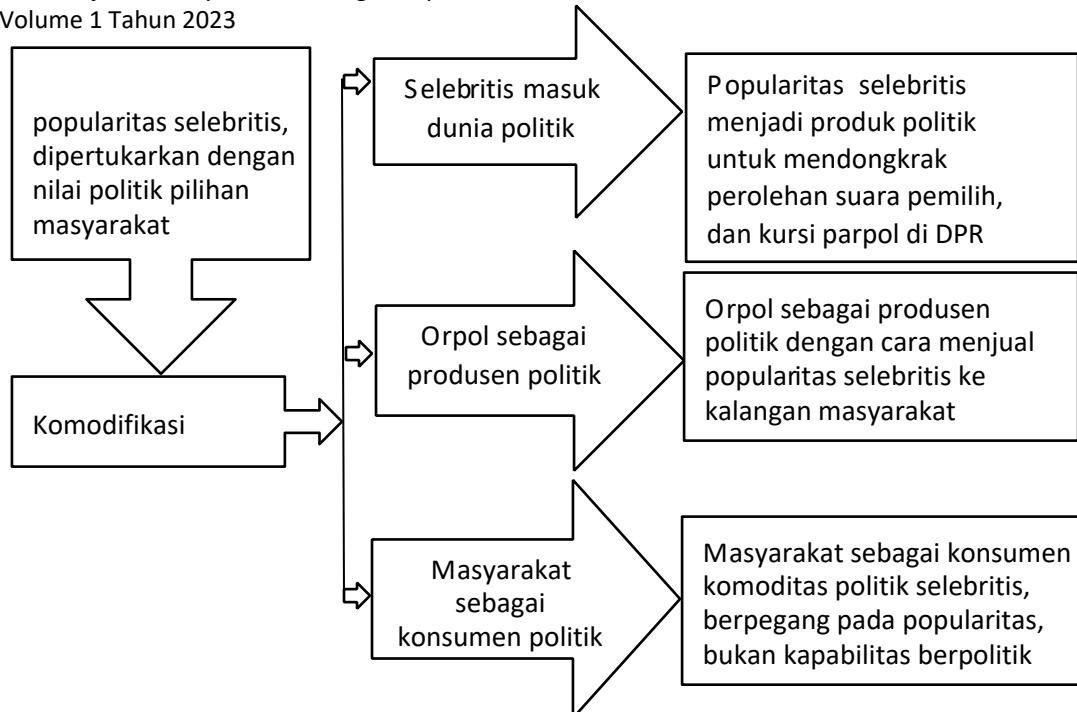
¹³⁶ Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", *Sawwa*, Vol. 9, No. 2, April 2014, hlm. 335-336.

kandidat harus mengetahui minat dari masyarakat itu sendiri. Meski dalam menghadirkan artis hanya bertujuan untuk memikat hati calon pemilih dalam menghadiri kampanye akbar itu juga menjadi kepuasan bagi calon kandidat dan timnya. Semakin banyak massa yang datang dalam kampanye akbar itu, maka semakin memberikan citra yang positif bagi calon kandidat kepada masyarakat, meski masyarakat yang hadir tidak semua akan memilih calon kandidat tersebut. Persaingan yang terjalin antara calon kandidat bukan hanya terjadi dalam menggait pilihan masyarakat, namun juga persaingan itu terjalin dalam menghadirkan artis ternama yang dijadikan sebagai media kampanye. Semakin terkenal dan banyak penggemar dari artis tersebut maka semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh calon kandidat beserta tim. Semakin terkenal dan mahalnya artis yang didatangkan oleh calon kandidat tersebut semakin banyak masyarakat yang hadir dan semakin berkualitas pula calon kandidat itu dimata masyarakat.¹³⁷

Hubungan antara selebriti dan politik dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah keterlibatan selebriti dalam politik. Ada dua tipe keterlibatan selebriti dalam politik. Pertama, *celebrity endorser*, selebriti menggunakan endorsement tersebut dengan tujuan menarik calon pemilih. Dengan endorsementnya, selebriti membentuk bagaimana seorang calon yang ikut dalam pemilu dilihat oleh publik. Kedua, *celebrity politician*. adalah mereka yang terpilih atau dicalonkan dalam pemilu dan berlatar belakang dari kalangan entertainment, industri pertunjukan, olahraga, dan menggunakan popularitasnya untuk terpilih. Aspek kedua adalah mengapa selebriti terlibat dalam politik. Selebriti menjadi komoditas yang penting ketika mereka secara besar-besaran menjadi bahan isi dari media. Politisi sukses perlu membangun *public face* sehingga selebriti harus terlibat dalam partai politik. Selebriti memainkan peran penting dalam hal menjual dengan tujuan agar seorang politisi terpilih.¹³⁸ Lebih jelas dapat dilihat pada bagan di bawah.

137 Novita, “Artis Dangdut Nasional Sebagai Media Kampanye Bupati Terpilih Tahun 2015 Di Kabupaten Soppeng”, *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya TEBAR SCIENCE*, Vo. 3, No 2, 2019, hlm. 5-6.

138 Ikhsan Darmawan, “Keterlibatan Selebriti Dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru”, *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 3, 2015, hlm. 237-238.
<https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/8341>



Proses transformasi

Sumber: Jurnal Rieka Mustika dan S. Arifianto.¹³⁹

Melibatkan selebriti dalam partai politik bertujuan untuk mendulang suara partai mereka sehingga lolos dari *parliamentary threshold*. Strategi mencalonkan banyak artis-artis tampaknya merupakan satu-satunya cara yang dapat mendongkrak suara partai mereka. Hal itu mereka lakukan karena beberapa alasan, salah satunya adalah agar partainya tetap eksis “hidup” dan tidak sekadar “menghiasi” arena politik di Indonesia. Karena mudah merekrut partai politik jika calon memiliki kekuasaan di daerah dengan dukungan publik yang kuat, hal ini setara dengan pragmatisme politik melalui proses rekrutmen partai politik yang seringkali hanya mengutamakan daya tarik dan elektabilitas. Akibat langsung dari hal itu, tidak sedikit pengurus partai yang dianggap kompeten kehilangan kesempatan untuk ikut serta. Hal ini disebabkan mereka kalah dalam pemilu oleh tokoh atau pesaing yang memiliki elektabilitas tinggi untuk menang. Akibatnya, ada sejumlah besar rekan partai yang dianggap kompeten tetapi tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi.²⁷

139 Rieka Mustika dan S. Arifianto, “Komodifikasi “Popularitas Selebritis” Untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 22, No. 2, Desember 2018, hlm.

143. ²⁷ Aza Rifda Khamimiya, dkk, “Keterlibatan Selebriti Sebagai Politisi: Penguanan Partai Politik atau Penggalangan Suara”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 163164. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2608>

C. Penutup

Berdasarkan penyajian makalah ini, maka pemakalah membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemasaran politik adalah sebuah konsep baru yang belum begitu lama dikenal dalam kegiatan politik. konsep ini diintrodusir dari penyebaran ide-ide sosial di bidang pembangunan dengan meniru cara-cara pemasaran komersial, tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran penyadaran, sikap dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru. Cara penyebaran seperti ini dilihat dari konteks dan orientasinya disebut “pemasaran sosial”, yang secara substantif tidak jauh beda dengan istilah penyuluhan, sosialisasi dan kampanye.
2. kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisir dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu.
3. Beberapa tema yang sering diangkat saat kampanye dan tema-tema yang banyak mendapat perhatian oleh masyarakat berkisar pada isu: 1) Suksesi, 2) Lapangan Kerja, 3) Korupsi, 4) Keadilan Sosial, dan 5) Pembangunan Ekonomi.
4. Rancangan Perpres tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif. Tujuan dari Rancangan Perpres Grand Design tersebut dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politiknya. Peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik di parlemen guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender. Hubungan antara selebriti dan politik dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah keterlibatan selebriti dalam politik. Ada dua tipe keterlibatan selebriti dalam politik. Pertama, *celebrity endorser* dan *celebrity politician*

REFERENSI

- Aryawangsa, Cadek Teguh, dkk, (2016), “Humor Sebagai Bentuk Komunikasi Politik di Indonesia (Studi Kasus: Stand-up Comedy Sammy Notaslimboy Menjelang Pilpres 2014)”, *Jurnal OJS Umud*, Vol. 1, No. 1, hlm. 11. Boer, Kheyene Molekandella, (2014), “Iklan Partai Politik dan Politik Media”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, hlm. 298

- Cangara, Hafied, (2016), *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Ikhsan, (2015), “Keterlibatan Selebriti Dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru”, *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 3, hlm. 237-238.
- Fatimah, Siti, (2018), “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemili”, *Jurnal Sosial Politik RESOLUSI*, Vol. 1, No. 1 Juni, hlm. 11-12
- Fitriyani, Vira Nurul, dkk, (2022), “Pemerintah dan Gender Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 3, Maret, hlm. 189-190.
- Hafid, Irwan, (2020), “Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 2, No. 1, Juli, hlm. 82.
- Hamad, Ibnu, (2008), “Memahami Komunikasi Politik”, *MediaTor*, Vol. 9, No. 1, Juni, hlm. 149-150.
- Handayani, Rivi, (2013), “Peran *Spin Doctor* Dalam Pembentukan Opini Publik Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Kendari Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa*, Vol. 16, No. 1, April, hlm. 50.
- <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, (2023, Nopember 24).
- <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-pentingbagi-kemajuan-bangsa>, (2023, Nopember 25).
- <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7829/Sebanyak-575-anggota-DPR-RI-2019-2024terpilih-resmi-dilantik-dan-diambil-sumpahnya-pada-1-Okttober-2019-lalu.Dari-jumlah-itu-sebanyak-463-orang--80-52-persen--adalah-laki-laki-dan112-orang--19-48-persen--perempuan>, (2023, Nopember 25).
- Hutagaol, Anggeh Afelina, (2019), “Perencanaan Komunikasi Indonesian Youth Educate And Social Dalam Mengimplementasikan Program I-Yes”, *JOM FISIP*, Vol. 6, No. 1, hlm. 6-7.
- Jain, Arpit, Anil Kumar and Manoj Kumar Dash, (2015), “Information Technology Revolution and Transition Marketing Strategies of Political Parties: Analysis Through AHP”, *Int. J. Business Information System*, Vol. 20, No. 1, hlm. 73-74.

- Khamimiya, Aza Rifda, dkk, (2023), “Keterlibatan Selebriti Sebagai Politisi: Penguatan Partai Politik atau Penggalangan Suara”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Vol. 12, No. 2, hlm. 163-164.
- Mazaya, Viky, (2014), “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam”, *Sawwa*, Vol. 9, No. 2, April, hlm. 335-336.
- Mustika, Rieka dan S. Arifianto, (2018), “Komodifikasi “Popularitas Selebritis” Untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 22, No. 2, Desember, hlm. 143.
- Novita, (2019), “Artis Dangdut Nasional Sebagai Media Kampanye Bupati Terpilih Tahun 2015 Di Kabupaten Soppeng”, *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya TEBAR SCIENCE*, Vo. 3, No 2, hlm. 5-6.
- Nur, Emilsyah, (2019), “Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk memenangkan Calon Legislatif Kota Makassar”, *Jurnal Diakom*, Vol. 2, No, 1.